

Aswaja Sebagai Pemikiran Dan Gerakan: Genealogi Intelektual, Moderasi Keagamaan, Dan Transformasi Sosial Di Madura

Abdullah¹, Ach. Maimun²

Universitas Annuqoyah, Abdullahfajar1969@gmail.com

Universitas Annuqoyah, mymoon221@gmail.com

Abstract

This article examines Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) as both a framework of thought and a movement within the dynamics of Islam in Madurace . Aswaja is understood not merely as a theological doctrine, but also as a *manhaj al-fikr* that shapes ways of understanding religion, social reality, and changing times, as well as a *harakah* manifested through educational, da'wah, social, national, and community empowerment practices. This study employs a qualitative approach using library research and historical-critical analysis. The research sources include the works of classical Muslim scholars, pesantren literature, the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, and contemporary studies on Islamic moderation and social transformation. The findings indicate that Aswaja thought is constructed through a synthesis of Ash'ari-Maturidi theology, the four Sunni schools of jurisprudence, and Sunni Sufism. This intellectual framework is subsequently translated into the principles of *tawassuth* (moderation), *tawazun* (balance), *tasamuh* (tolerance), and *i'tidal* (justice and uprightness). As a movement, Aswaja has developed through pesantren institutions, socio-religious organizations, education, da'wah, and community empowerment. This article argues that the strength of Aswaja lies in its ability to connect the continuity of tradition with social change, enabling it to serve as a moderate, inclusive, and adaptive Islamic paradigm in responding to modernity, digitalization, and the development of artificial intelligence.

Keywords: *Aswaja, Thought, Movement, Pesantren, Islamic Moderation, Social Transformation.*

Abstrak

Artikel ini membahas Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai pemikiran dan gerakan dalam dinamika Islam Madura. Aswaja tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai *manhaj al-fikr* yang membentuk cara memahami agama, realitas sosial, dan perubahan zaman, sekaligus sebagai *harakah* yang diwujudkan melalui praksis pendidikan, dakwah, sosial, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis historis-kritis. Sumber penelitian meliputi karya-karya ulama klasik, literatur pesantren, pemikiran Nahdlatul Ulama, serta kajian kontemporer mengenai moderasi Islam dan transformasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Aswaja dibangun di atas sintesis antara teologi Asy'ariyah-Maturidiyah, fikih empat mazhab, dan tasawuf Sunni. Kerangka pemikiran tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*. Sebagai gerakan, Aswaja berkembang melalui institusi pesantren, organisasi sosial-keagamaan, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Artikel ini berargumen bahwa kekuatan Aswaja terletak pada kemampuannya menghubungkan kontinuitas tradisi dengan perubahan sosial, sehingga dapat menjadi paradigma keislaman yang moderat, inklusif, dan adaptif dalam menghadapi modernitas, digitalisasi, dan perkembangan kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Aswaja, Pemikiran, Gerakan, Pesantren, Moderasi Islam, Transformasi Sosial*

Corresponding Author:

Abdullah

Universitas Annuqoyah, Abdullahfajar1969@gmail.com

PENDAHULUAN

Ahlussunnah wal Jama'ah, yang lazim disingkat Aswaja, merupakan salah satu arus utama dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam yang memiliki akar panjang dalam dinamika intelektual umat Islam. Secara etimologis, istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* terdiri atas kata *ahl*, *al-sunnah*, dan *al-jama'ah*. *Ahl* berarti kelompok atau pengikut, *al-sunnah* merujuk pada jalan, tradisi, atau tuntunan Nabi Muhammad saw., sedangkan *al-jama'ah* menunjuk pada komunitas yang berpegang pada kesatuan umat dan tradisi keagamaan yang diwariskan dari generasi awal Islam. Dalam perkembangan sejarahnya, istilah tersebut tidak selalu memiliki satu definisi yang tunggal dan statis. Berbagai kelompok Muslim menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jama'ah untuk menjelaskan posisi keagamaan mereka, sehingga konsep Aswaja senantiasa mengalami proses artikulasi dan pemaknaan sesuai dengan konteks sejarah dan intelektual yang melingkupinya¹

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dalam perkembangan pemikiran Islam tidak hanya dapat dipahami sebagai identitas teologis atau afiliasi kelompok keagamaan, tetapi juga sebagai *manhaj al-fikr*, yaitu metodologi atau kerangka berpikir dalam memahami, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam pengertian ini, Aswaja merupakan suatu paradigma keagamaan yang memiliki seperangkat prinsip epistemologis, teologis, fikih, spiritual, dan sosial yang digunakan untuk merespons persoalan keagamaan maupun perubahan kehidupan masyarakat. Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* tidak berhenti pada persoalan “apa yang diyakini”, tetapi juga mencakup “bagaimana keyakinan itu diperoleh, dipahami, ditafsirkan, dan diwujudkan dalam kehidupan”.²

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dalam sejarah perkembangan Islam tidak hanya hadir sebagai suatu konstruksi pemikiran keagamaan (*manhaj al-fikr*), tetapi juga berkembang menjadi gerakan sosial-keagamaan yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan umat. Sebagai gerakan, Aswaja merupakan proses transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam tindakan nyata melalui pendidikan, dakwah, pengembangan masyarakat, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perjuangan kebangsaan. Dengan demikian, Aswaja sebagai gerakan dapat dipahami sebagai proses artikulasi antara pemikiran keagamaan dan praksis sosial. Pemikiran Aswaja memberikan landasan normatif dan metodologis, sedangkan gerakan menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat.³

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai tradisi pemikiran dan gerakan Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam konteks perubahan sosial kontemporer. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan, tetapi juga dengan transformasi teknologi, globalisasi, perubahan budaya, politik identitas, radikalisme, intoleransi, krisis otoritas keagamaan, serta perubahan pola produksi dan distribusi pengetahuan. Dalam konteks ini, Aswaja dituntut untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar tradisinya sekaligus mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan

¹ Mohammad Asrori, “Ahlussunnah wal Jama'ah: Sejarah Perkembangan Pemikiran pada Era Awal, Pertengahan, dan Sekarang,” dalam *NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi, dan Aksi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 95–114. Kajian tersebut juga menegaskan bahwa definisi Ahlussunnah wal Jama'ah secara historis mengalami perdebatan dan pemaknaan yang beragam.

² Mohammad Asrori, “Ahlussunnah wal Jama'ah: Sejarah Perkembangan Pemikiran pada Era Awal, Pertengahan, dan Sekarang,” dalam *NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi, dan Aksi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 95–114.

³ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

zaman. Tantangan utama Aswaja bukan sekadar bagaimana mempertahankan identitas tradisional, tetapi bagaimana menjadikan tradisi tersebut tetap relevan sebagai *manhaj al-fikr* dan gerakan sosial dalam menghadapi realitas baru.⁴

Kajian mengenai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) telah berkembang dalam berbagai perspektif dan disiplin keilmuan. Dalam literatur keislaman dan studi sosial-keagamaan di Indonesia, Aswaja telah dikaji sebagai doktrin teologis, ideologi keagamaan *Nahdlatul Ulama*

(NU), identitas sosial-keagamaan pesantren, serta paradigma moderasi beragama. Keragaman perspektif tersebut menunjukkan bahwa Aswaja memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Muslim Madura. Namun demikian, sebagian kajian cenderung menempatkan Aswaja dalam satu dimensi tertentu, sehingga hubungan antara konstruksi pemikiran Aswaja dan praksis gerakannya belum selalu dianalisis secara integratif.⁵

Pertama, kajian Aswaja sebagai doktrin teologi umumnya berfokus pada aspek historis dan epistemologis pembentukan Ahlussunnah wal Jama'ah serta perkembangan mazhab teologi Sunni, khususnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kajian dalam perspektif ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan posisi Aswaja dalam sejarah pemikiran Islam, terutama dalam relasinya dengan berbagai aliran teologi seperti Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dan kelompok teologis lainnya.

Kedua, sejumlah penelitian menempatkan Aswaja sebagai ideologi atau kerangka pemikiran Nahdlatul Ulama. Dalam perspektif ini, Aswaja dipahami sebagai landasan keagamaan yang menjadi dasar identitas dan orientasi organisasi NU. Aswaja tidak hanya berkaitan dengan akidah, fikih, dan tasawuf, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan sikap sosial dan kebangsaan

Ketiga, penelitian mengenai Aswaja juga banyak menghubungkannya dengan identitas pesantren. Dalam konteks ini, pesantren dipandang sebagai salah satu institusi utama yang menjaga, mentransmisikan, dan mereproduksi tradisi Aswaja melalui pengajaran kitab kuning, sanad keilmuan, *sorogan*, *bandongan*, *bahtsul masail*, dan relasi guru-murid. Tradisi pesantren menjadi ruang penting bagi pembentukan identitas keagamaan yang berakar pada mazhab fikih, teologi Asy'ariyah-Maturidiyah, dan tasawuf Sunni.⁴ Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana Aswaja diwariskan dari generasi ke generasi melalui institusi pendidikan Islam tradisional.

Keempat, perkembangan studi tentang Aswaja juga memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap Aswaja sebagai paradigma moderasi beragama. Dalam konteks ini, prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* dipahami sebagai nilai-nilai yang relevan untuk membangun keberagamaan yang moderat, toleran, adil, dan seimbang.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa kajian Aswaja selama ini telah memberikan kontribusi penting, tetapi masih terdapat ruang penelitian yang perlu diperkuat, khususnya dalam menghubungkan dimensi pemikiran dan dimensi gerakan secara simultan. Aswaja tidak hanya merupakan seperangkat doktrin yang diyakini, ideologi yang dianut, identitas yang diwariskan, atau paradigma moderasi yang dipraktikkan, tetapi juga

⁴ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

⁵ Mohammad Asrori, "Ahlussunnah wal Jama'ah: Sejarah Perkembangan Pemikiran pada Era Awal, Pertengahan, dan Sekarang," dalam *NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi, dan Aksi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 95–114

merupakan suatu metodologi berpikir dan kerangka praksis yang terus berinteraksi dengan perubahan sosial. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk melihat Aswaja sebagai suatu kesatuan antara epistemologi dan aksiologi, pemikiran dan praksis, *manhaj* dan *harakah*, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana Aswaja berkembang dari suatu tradisi intelektual menjadi *manhaj al-fikr* dan kemudian bertransformasi menjadi *harakah al-ijtima'iyah* dalam konteks kehidupan sosial-keagamaan Indonesia.

Pertanyaan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab empat pertanyaan; 1) Bagaimana genealogi intelektual Aswaja dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam dan proses transmisinya hingga berkembang dalam konteks Islam di Madura? 2) Bagaimana konstruksi Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* membentuk metodologi berpikir keagamaan yang mengintegrasikan wahyu, akal, tradisi, dan realitas sosial? 3) Bagaimana prinsip-prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* dikonstruksi dan diaktualisasikan sebagai paradigma moderasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Madura? 4) Bagaimana Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* ditransformasikan menjadi *harakah al-ijtima'iyah* melalui pesantren, pendidikan, dakwah, organisasi sosial-keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) secara integratif sebagai tradisi pemikiran sekaligus gerakan sosial-keagamaan dalam konteks perkembangan Islam di Madura. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa Aswaja tidak dapat direduksi hanya sebagai doktrin teologis, ideologi organisasi, identitas pesantren, atau paradigma moderasi beragama, tetapi perlu dilihat sebagai konstruksi intelektual yang memiliki basis epistemologis dan sebagai gerakan yang memiliki orientasi praksis dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mempertemukan dimensi pemikiran (*manhaj al-fikr*) dan dimensi gerakan (*harakah al-ijtima'iyah*) dalam satu kerangka analisis yang utuh.⁶

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pemahaman yang komprehensif mengenai Aswaja sebagai pemikiran dan gerakan dengan menelusuri genealogi intelektualnya, menganalisis prinsip-prinsip moderasi keagamaannya, serta mengkaji transformasinya menjadi gerakan sosial-keagamaan yang relevan dengan dinamika masyarakat Madura kontemporer.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk pertama, merekonstruksi genealogi intelektual Aswaja dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* atau metodologi berpikir keagamaan. Ketiga, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi moderasi keagamaan dalam perspektif Aswaja. Keempat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Aswaja dari *manhaj al-fikr* menuju *harakah al-ijtima'iyah*. Kelima, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan dialektis antara Aswaja sebagai pemikiran dan Aswaja sebagai gerakan. Keenam, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan kontemporer yang dihadapi Aswaja dalam konteks perubahan sosial di Indonesia. Ketujuh, penelitian ini bertujuan merumuskan relevansi dan strategi revitalisasi Aswaja dalam menghadapi tantangan masyarakat kontemporer. Kedelapan, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan studi Aswaja dengan

⁶ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995); Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).

menawarkan suatu kerangka integratif antara genealogi intelektual, *manhaj al-fikr*, moderasi keagamaan, *harakah al-ijtima'iyah*, dan transformasi sosial. Kerangka tersebut dapat dirumuskan dalam alur:

Genealogi Intelektual Aswaja → *Manhaj al-Fikr* → Moderasi Keagamaan → *Harakah al-Ijtima'iyah* → Transformasi Sosial.

Kerangka ini menempatkan Aswaja sebagai suatu tradisi yang bergerak secara dinamis dari sumber pemikiran menuju praksis social Kebaruan (*novelty*) artikel berjudul “Aswaja sebagai Pemikiran dan Gerakan: Genealogi Intelektual, Moderasi Keagamaan, dan Transformasi Sosial di Madura” terletak pada upaya membangun suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* dan Aswaja sebagai *harakah al-ijtima'iyah* dalam satu kesatuan analisis. Kajian tentang Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) selama ini telah berkembang dalam berbagai perspektif, antara lain sebagai doktrin teologis, identitas keagamaan, ideologi organisasi, tradisi pesantren, dan paradigma moderasi beragama.

Meskipun demikian, kajian yang secara eksplisit menghubungkan dimensi pemikiran dengan dimensi gerakan sosial-keagamaan dalam suatu alur transformasi yang sistematis masih perlu diperkuat.⁷

Atas dasar *research gap* tersebut, artikel ini menawarkan proposisi konseptual:

ASWAJA = MANHAJ AL-FIKR + HAKAKAH AL-IJTIMAIYYAH

Kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* dan Aswaja sebagai *harakah al-ijtima'iyah*. Model ini memandang Aswaja sebagai suatu proses transformatif yang bergerak dari pemikiran Aswaja menuju nilai-nilai *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*, kemudian ditransmisikan dan diinternalisasikan melalui tradisi pesantren, dikembangkan menjadi gerakan sosial-keagamaan, dan diarahkan pada penguatan moderasi serta transformasi sosial. Dengan demikian, formula kebaruan penelitian ini adalah ASWAJA = MANHAJ AL-FIKR + HAKAKAH AL-IJTIMAIYYAH. Artikel ini menawarkan perspektif bahwa Aswaja bukan hanya doktrin teologis, ideologi organisasi, identitas pesantren, atau paradigma moderasi, tetapi merupakan integrasi antara sistem pemikiran dan praksis gerakan yang memiliki kapasitas transformatif dalam merespons dinamika masyarakat Indonesia kontemporer.

Dalam konteks penelitian ini, konsep Aswaja sebagai *manhaj keberagamaan* menjadi landasan teoritis untuk memahami hubungan antara pemikiran dan gerakan. Sebagai *manhaj al-fikr*, Aswaja membentuk cara pandang; sebagai *manhaj keberagamaan*, ia membentuk cara menjalankan agama; dan sebagai *harakah al-ijtima'iyah*, ia mendorong aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, konsep Aswaja dapat dirumuskan dalam suatu konstruksi teoritis sebagai berikut:

Aswaja sebagai Tradisi Sunni

↓

Genealogi Intelektual

↓

Aswaja sebagai *Manhaj al-Fikr*

↓

Prinsip *Tawassuth – Tawazun – Tasamuh – I'tidal*

↓

Aswaja sebagai *Manhaj Keberagamaan*

↓

⁷ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995); Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011)

Tradisi Pesantren dan Transmisi Keilmuan

↓

Aswaja sebagai *Harakah al-Ijtima'iyah*

↓

Moderasi Keagamaan dan Transformasi Sosial

Kerangka tersebut menjadi dasar teoritis penelitian ini. Aswaja dipahami sebagai suatu tradisi yang memiliki genealogi intelektual, metodologi berpikir, nilai keberagamaan, dan dimensi praksis sosial. Dengan perspektif ini, Aswaja tidak hanya ditempatkan sebagai “identitas siapa yang mengikuti siapa”, tetapi sebagai pertanyaan mengenai bagaimana seseorang berpikir, memahami agama, membangun relasi sosial, dan melakukan transformasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak diarahkan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam konsep Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai pemikiran sekaligus gerakan dalam konteks sejarah perkembangan Islam dan kehidupan sosial-keagamaan di Madura. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha mengungkap genealogi intelektual Aswaja, konstruksi Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*, serta transformasinya menjadi *harakah al-ijtima'iyah* yang berkontribusi terhadap moderasi keagamaan dan perubahan sosial.

Studi kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian berupa gagasan, konsep, pemikiran, doktrin, tradisi intelektual, dan konstruksi sosial-keagamaan yang dapat ditelusuri melalui berbagai sumber tertulis

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan lima pendekatan analisis yang saling melengkapi, yaitu pendekatan historis, filosofis, sosiologis, interpretatif, dan analisis isi (*content analysis*). Kelima pendekatan tersebut digunakan secara integratif agar Aswaja dapat dipahami secara komprehensif, baik dari dimensi sejarah pemikiran, struktur epistemologis, fungsi sosial, makna teks, maupun pola gagasan yang terkandung dalam sumber-sumber penelitian.

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri genealogi dan perkembangan pemikiran Ahlussunnah wal Jama'ah dari periode awal sejarah Islam hingga perkembangannya di Madura. Pendekatan ini diperlukan karena Aswaja merupakan konstruksi intelektual dan sosial yang terbentuk melalui proses sejarah yang Panjang

2. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji struktur pemikiran dan landasan epistemologis Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*. Pendekatan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, kriteria kebenaran, dan orientasi nilai yang terdapat dalam tradisi pemikiran Aswaja.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis Aswaja sebagai fenomena sosial dan gerakan keagamaan. Jika pendekatan filosofis menekankan dimensi pemikiran, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana pemikiran dan nilai-nilai Aswaja diwujudkan dalam kehidupan masyarakat

4. Pendekatan Interpretatif

Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks keagamaan dan literatur yang menjadi sumber penelitian. Pendekatan ini diperlukan

karena teks keagamaan tidak hanya mengandung informasi literal, tetapi juga memiliki konteks historis, struktur argumentasi, dan makna yang harus dipahami secara mendalam.

5. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis tema-tema utama yang terdapat dalam sumber penelitian. Analisis isi dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan terhadap kata atau istilah tertentu, tetapi juga terhadap gagasan, konsep, argumentasi, dan pola pemikiran yang berkaitan dengan Aswaja sebagai pemikiran dan gerakan.⁸

Kategori analisis utama dalam penelitian ini meliputi: (1) genealogi intelektual Aswaja; (2) Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*; (3) fondasi akidah, fikih, dan tasawuf; (4) prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*; (5) tradisi pesantren sebagai ruang transmisi keilmuan; (6) Aswaja sebagai *harakah al-ijtima'iyah*; (7) moderasi keagamaan; dan (8) transformasi sosial

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dibaca secara intensif, dicatat, diklasifikasikan, dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian. Teknik dokumentasi digunakan karena penelitian ini berfokus pada data tekstual dan konseptual yang terdapat dalam sumber primer maupun sekunder.⁹

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, komparasi, dan sintesis. Pada tahap reduksi, data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti genealogi Aswaja, *manhaj al-fikr*, moderasi keagamaan, tradisi pesantren, gerakan sosial, dan transformasi sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Pemikiran Aswaja

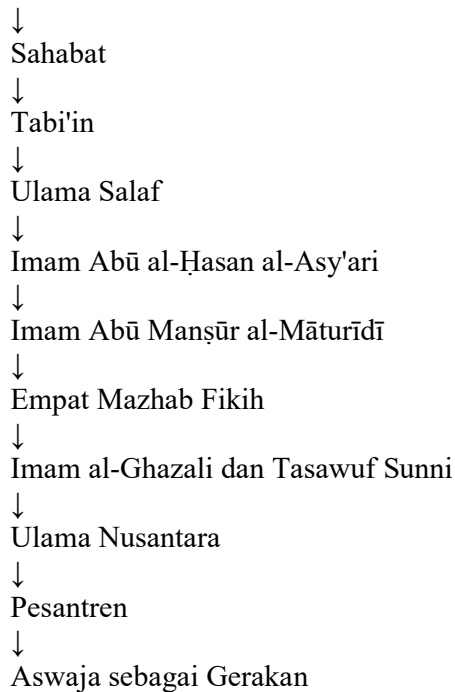
Genealogi pemikiran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) merupakan suatu proses historis dan intelektual yang panjang, yang tidak lahir secara tiba-tiba dalam bentuk organisasi atau identitas tertentu. Secara substantif, akar Aswaja dapat ditelusuri pada praktik keberagamaan Nabi Muhammad saw., diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, dan generasi ulama salaf, kemudian mengalami proses sistematisasi dalam bidang teologi, fikih, dan tasawuf. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi tersebut ditransmisikan melalui jaringan ulama ke berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Nusantara, hingga menemukan bentuk kelembagaan yang kuat melalui tradisi pesantren dan organisasi sosial-keagamaan.¹⁰

⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

⁹ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design*; Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013); Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995).

Secara genealogis, perjalanan tersebut dapat digambarkan melalui skema berikut:
Nabi Muhammad saw.



Skema tersebut perlu dipahami bukan sebagai garis keturunan intelektual yang bersifat linear dan tunggal, melainkan sebagai suatu jaringan transmisi keilmuan yang melibatkan kesinambungan, seleksi, interpretasi, dan kontekstualisasi. Aswaja berkembang melalui proses panjang ketika warisan keagamaan generasi awal Islam dibaca, dirumuskan, dikembangkan, dan diterapkan sesuai dengan tantangan zaman. Dengan demikian, genealogi Aswaja merupakan proses dialektis antara tradisi dan perubahan, antara warisan keilmuan dan realitas sosial, serta antara norma agama dan kebutuhan masyarakat.

1. Nabi Muhammad saw. sebagai Sumber Awal Tradisi Ahlussunnah

Titik awal genealogi Aswaja dapat ditelusuri kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah Islam sekaligus sumber utama keteladanan dalam kehidupan keagamaan. Al-Qur'an menjadi sumber utama ajaran Islam, sedangkan sunnah Nabi menjadi penjelas dan model implementasi ajaran tersebut dalam kehidupan. Dalam perspektif Ahlussunnah, mengikuti sunnah bukan hanya berarti mengikuti teks hadis secara literal, tetapi juga memahami pola keberagamaan Nabi yang mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan kehidupan sosial.

Konsep *Ahl al-Sunnah* secara substantif memiliki hubungan erat dengan upaya mempertahankan ajaran Nabi dan generasi awal Islam. Sunnah menjadi orientasi normatif, sementara *al-jamā'ah* menunjukkan pentingnya kebersamaan umat dan kesinambungan tradisi keilmuan. Karena itu, akar pemikiran Aswaja dapat dipahami sebagai usaha menjaga kesinambungan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah sekaligus mengembangkan pemahaman keagamaan melalui otoritas keilmuan yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹¹

¹¹ Abū al-Ḥasan al-Ash'arī, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*, ed. Hellmut Ritter (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1980); W. Montgomery Watt, *The Formative Period of Islamic Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973).

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. menjadi sumber utama bagi dua dimensi yang kemudian berkembang dalam tradisi Aswaja, yaitu dimensi normatif dan praksis. Dimensi normatif bersumber dari wahyu dan sunnah, sedangkan dimensi praksis tercermin dalam keteladanan Nabi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, menghargai perbedaan, menjaga keseimbangan, dan mengedepankan kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan pemikiran moderat dalam tradisi Sunni.

2. Sahabat: Transmisi dan Kontekstualisasi Ajaran Islam

Generasi sahabat merupakan mata rantai penting dalam genealogi Aswaja. Para sahabat tidak hanya menerima ajaran Islam secara langsung dari Nabi Muhammad saw., tetapi juga menjadi generasi pertama yang melakukan interpretasi dan penerapan ajaran Islam dalam konteks masyarakat yang terus berkembang.

Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya memiliki jawaban eksplisit dalam teks. Para sahabat kemudian menggunakan Al-Qur'an, sunnah, pengalaman keagamaan, musyawarah, dan pertimbangan kemaslahatan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa sejak masa awal Islam telah terdapat dinamika antara teks dan realitas, serta antara wahyu dan penggunaan nalar. Dalam perspektif genealogi pemikiran, praktik sahabat tersebut menjadi salah satu fondasi bagi berkembangnya tradisi ijtihad. Perbedaan pendapat di antara sahabat dalam persoalan tertentu juga menunjukkan bahwa keberagaman interpretasi telah menjadi bagian dari sejarah awal Islam. Tradisi tersebut kemudian berkembang dalam berbagai aliran pemikiran dan mazhab keilmuan.¹²

Dengan demikian, generasi sahabat memberikan warisan penting berupa dua prinsip sekaligus: pertama, kesetiaan terhadap sumber utama Islam; dan kedua, kemampuan membaca realitas melalui ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan. Dua prinsip tersebut kemudian menjadi karakter penting dalam perkembangan *manhaj* Aswaja.

3. Tabi'in dan Ulama Salaf: Pembentukan Tradisi Keilmuan

Generasi tabi'in dan ulama salaf melanjutkan proses transmisi ilmu dan praktik keberagaman dari generasi sahabat. Pada periode ini, wilayah Islam berkembang semakin luas sehingga muncul berbagai persoalan baru dalam bidang teologi, hukum, politik, dan sosial. Perkembangan tersebut mendorong lahirnya pusat-pusat keilmuan Islam di berbagai wilayah. Tradisi keilmuan yang berkembang pada masa ini menjadi fondasi bagi pembentukan disiplin ilmu Islam. Ilmu hadis, fikih, tafsir, kalam, dan tasawuf berkembang melalui proses transmisi dan kodifikasi. Dalam konteks ini, konsep *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* secara bertahap memperoleh bentuk yang lebih sistematis sebagai identitas arus utama Sunni dalam menghadapi berbagai perdebatan teologis dan politik yang muncul dalam sejarah Islam.¹³

Tradisi ulama salaf juga memberikan prinsip penting berupa penghormatan terhadap sanad keilmuan dan kesinambungan transmisi pengetahuan. Pengetahuan agama tidak hanya diperoleh melalui teks, tetapi juga melalui proses belajar kepada guru yang memiliki otoritas keilmuan. Tradisi tersebut kelak menjadi salah satu karakter utama pendidikan Islam di Nusantara, khususnya pesantren.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.).

¹³ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974)

Dengan demikian, pada tahap ini genealogi Aswaja tidak hanya berupa transmisi doktrin, tetapi juga transmisi metodologi keilmuan. Yang diwariskan bukan hanya “apa yang harus diyakini”, tetapi juga “bagaimana cara memahami dan mengembangkan ajaran agama”.

4. Imam Abū al-Ḥasan al-Asy'ari: Sistematisasi Teologi Sunni

Salah satu tonggak penting dalam genealogi intelektual Aswaja adalah pemikiran Abū al-Ḥasan al-Asy'ari (w. 324 H/935 M). Kehadiran al-Asy'ari dalam sejarah pemikiran Islam berkaitan erat dengan upaya membangun formulasi teologi Sunni yang mampu memberikan respons terhadap berbagai perdebatan teologis pada masanya. Pemikiran Asy'ariyah berusaha mempertemukan otoritas wahyu dengan argumentasi rasional. Akal digunakan sebagai instrumen untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan keagamaan, tetapi tetap ditempatkan dalam kerangka otoritas wahyu. Pola tersebut menjadikan teologi Asy'ariyah sebagai salah satu representasi penting dari upaya membangun keseimbangan antara naql dan 'aql, antara teks wahyu dan argumentasi rasional.¹⁴

Dalam konteks genealogi Aswaja, kontribusi al-Asy'ari bukan hanya terletak pada rumusan teologi tertentu, tetapi juga pada pembentukan suatu metodologi yang mampu menghadapi perubahan intelektual. Tradisi Asy'ariyah kemudian berkembang luas di dunia Islam dan menjadi salah satu fondasi teologis utama dalam tradisi Sunni.

Karena itu, posisi al-Asy'ari dalam genealogi Aswaja dapat dipahami sebagai fase sistematisasi intelektual. Warisan keagamaan generasi awal Islam mulai dirumuskan dalam kerangka teologi yang lebih sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjawab berbagai tantangan pemikiran pada zamannya.

5. Imam Abū Manṣūr al-Māturīdī: Penguatan Rasionalitas Teologi Sunni

Selain tradisi Asy'ariyah, tradisi Maturidiyah yang dikembangkan oleh Abū Manṣūr al-Māturīdī (w. 333 H/944 M) juga menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan teologi Sunni. Maturidiyah berkembang terutama dalam lingkungan Hanafiyah dan memiliki perhatian besar terhadap penggunaan akal dalam memahami persoalan-persoalan teologis. Meskipun terdapat perbedaan tertentu antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam beberapa persoalan teologis, keduanya memiliki posisi penting dalam sejarah Sunni. Kedua tradisi tersebut sama-sama berusaha mempertahankan prinsip dasar keimanan Sunni dengan menggunakan argumentasi rasional yang terstruktur.¹⁵

Dalam genealogi Aswaja, tradisi Asy'ariyah dan Maturidiyah menunjukkan bahwa tradisi Sunni memiliki kapasitas untuk mengembangkan argumentasi intelektual tanpa melepaskan keterikatannya pada wahyu. Hal tersebut menjadi salah satu fondasi epistemologis bagi Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*.

Dengan demikian, pada ranah akidah, genealogi Aswaja dapat dirumuskan dalam prinsip:

Wahyu → Akal → Argumentasi → Moderasi Teologis

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Aswaja tidak membangun keberagaman hanya berdasarkan tekstualisme semata, tetapi juga tidak menempatkan akal sebagai otoritas yang bebas dari wahyu. Keseimbangan keduanya menjadi salah satu ciri penting tradisi intelektual Sunni.

¹⁴ Abū al-Ḥasan al-Ash'arī, *Al-Ibānah 'an Uṣūl al-Diyānah* (Beirut: Dār Ibn Zaydūn, n.d.).

¹⁵ Abū Manṣūr al-Māturīdī, *Kitāb al-Tawḥīd*, ed. Fathallah Kholeif (Beirut: Dar El-Machreq, 1970); Ulrich Rudolph, *Al-Maturidi and the Development of Sunni Theology in Samarqand* (Leiden: Brill, 2015).

6. Empat Mazhab Fikih: Keragaman Metodologi dalam Tradisi Sunni

Genealogi Aswaja tidak hanya berkembang dalam bidang teologi, tetapi juga dalam bidang fikih. Tradisi Sunni mengakui empat mazhab fikih utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keempat mazhab tersebut menunjukkan keragaman metodologi dalam memahami sumber hukum Islam. Keberadaan empat mazhab memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat dalam fikih merupakan bagian dari dinamika intelektual Islam. Setiap mazhab memiliki metodologi tersendiri dalam memahami Al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, dan berbagai sumber hukum lainnya. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kesatuan umat, tetapi justru menunjukkan keluasan tradisi hukum Islam.¹⁶

Dalam konteks Aswaja, penerimaan terhadap empat mazhab melahirkan sikap yang relatif terbuka terhadap keragaman pendapat. Hal ini menjadi salah satu basis bagi prinsip *tasamuh* atau toleransi terhadap perbedaan. Perbedaan fikih dipahami sebagai bagian dari dinamika ijtihad, bukan sebagai alasan untuk melakukan eksklusi terhadap kelompok lain. Tradisi fikih tersebut juga memiliki relevansi terhadap prinsip *tawassuth* dan *tawazun*. *Tawassuth* mengajarkan sikap moderat, sedangkan *tawazun* menekankan keseimbangan. Keduanya memungkinkan tradisi Aswaja menjaga kesinambungan dengan warisan ulama sekaligus memberikan ruang bagi pembacaan kontekstual terhadap persoalan baru.

7. Imam al-Ghazali dan Tasawuf Sunni: Integrasi Syariat dan Spiritualitas

Genealogi Aswaja kemudian memperoleh dimensi yang lebih lengkap melalui perkembangan tasawuf Sunni. Salah satu tokoh terpenting dalam proses tersebut adalah Abū Hāmid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). Al-Ghazali berperan besar dalam mengintegrasikan dimensi fikih, akidah, spiritualitas, dan akhlak dalam suatu kerangka keilmuan Islam yang komprehensif.

Dalam pemikiran al-Ghazali, syariat dan tasawuf tidak dipandang sebagai dua wilayah yang saling bertentangan. Syariat memberikan pedoman normatif, sedangkan tasawuf memberikan kedalaman batin dan penyucian jiwa. Keduanya diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki ilmu, iman, dan akhlak.¹⁷

Kontribusi al-Ghazali menjadi penting dalam genealogi Aswaja karena memberikan dimensi etis dan spiritual terhadap pemikiran keagamaan. Jika teologi memberikan landasan keyakinan dan fikih memberikan aturan tindakan, tasawuf memberikan orientasi batin, sedangkan akhlak menjadi manifestasi nyata dari keseluruhan proses tersebut.

Dengan demikian, konstruksi Aswaja dapat dirumuskan:

Akidah → Keyakinan

Fikih → Pedoman Tindakan

Tasawuf → Kedalaman Spiritual

Akhlak → Aktualisasi Sosial

Sintesis tersebut menjadi karakter penting dalam tradisi pesantren di Madura. Kitab-kitab fikih, akidah, dan tasawuf diajarkan secara berdampingan, sehingga pembentukan keilmuan santri tidak hanya diarahkan pada penguasaan hukum agama, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak.

8. Ulama Nusantara: Transmisi dan Kontekstualisasi Aswaja

¹⁶ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

¹⁷ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.); W. Montgomery Watt, *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963).

Genealogi Aswaja kemudian bergerak menuju wilayah Nusantara melalui jaringan ulama dan proses transmisi keilmuan Islam. Islamisasi Nusantara berlangsung melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan, dakwah, pendidikan, jaringan ulama, dan lembaga-lembaga keagamaan. Dalam proses tersebut, tradisi Islam Sunni berkembang melalui interaksi dengan budaya dan struktur sosial masyarakat setempat (masyarakat Madura).¹⁸

Jaringan ulama Nusantara memiliki peran penting dalam menghubungkan tradisi keilmuan Islam di kepulauan Nusantara termasuk Madura dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah. Azyumardi Azra menunjukkan pentingnya jaringan intelektual ulama Nusantara dengan Haramain dalam proses transmisi dan pembaruan pemikiran Islam di Nusantara (wilayah Madura).¹⁹

Proses transmisi tersebut tidak berlangsung secara pasif. Ulama Nusantara melakukan proses seleksi dan kontekstualisasi terhadap tradisi keilmuan yang mereka terima. Nilai-nilai Islam Sunni berinteraksi dengan budaya lokal sehingga membentuk corak keberagamaan yang relatif akomodatif terhadap tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dalam konteks inilah Aswaja berkembang sebagai tradisi keberagamaan yang mampu mempertemukan norma agama dan budaya lokal. Sikap tersebut menjadi salah satu karakter penting Islam Nusantara dan kemudian berpengaruh terhadap pembentukan tradisi pesantren serta corak keberagamaan masyarakat Muslim Madura.

9. Pesantren sebagai Ruang Reproduksi dan Transmisi Aswaja

Pesantren menjadi salah satu institusi paling penting dalam proses transmisi dan reproduksi tradisi Aswaja di Madura. Melalui pesantren, tradisi keilmuan Islam diwariskan dari kiai kepada santri melalui pembelajaran kitab kuning, *sorogan*, *bandongan*, musyawarah, *bahtsul masā'il*, dan berbagai bentuk interaksi keilmuan lainnya.²⁰

Pesantren tidak hanya mentransmisikan isi kitab, tetapi juga mentransmisikan adab, sanad, tradisi intelektual, dan etika sosial. Hubungan antara kiai dan santri menjadi mekanisme penting dalam proses pewarisan otoritas keilmuan. Dalam konteks ini, Aswaja menjadi suatu tradisi yang hidup karena tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi pesantren juga memperlihatkan integrasi tiga fondasi utama Aswaja: akidah, fikih, dan tasawuf. Kitab-kitab akidah Asy'ariyah, fikih mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya, serta karya-karya tasawuf Sunni dipelajari dalam satu ekosistem pendidikan. Integrasi tersebut menghasilkan pola pendidikan yang menempatkan ilmu dan akhlak sebagai dua unsur yang tidak terpisahkan.

Dalam konteks genealogi, pesantren dapat dipahami sebagai ruang reproduksi sosial dan intelektual Aswaja. Pesantren tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menjadi ruang untuk menafsirkan kembali tradisi dalam menghadapi persoalan masyarakat. Melalui *bahtsul masā'il*, misalnya, tradisi fikih dikembangkan untuk menjawab persoalan baru dengan tetap merujuk pada khazanah klasik dan metodologi keilmuan yang telah diwariskan.²¹

¹⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011); Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*.

²¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926–1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

Dengan demikian, pesantren menjadi jembatan antara warisan intelektual klasik dan realitas sosial kontemporer. Di sinilah Aswaja memperoleh kemampuan untuk mempertahankan kesinambungan tradisi sekaligus melakukan adaptasi terhadap perubahan.

10. Dari Tradisi Pemikiran Menuju Aswaja sebagai Gerakan

Tahap terakhir dalam genealogi yang dibahas dalam penelitian ini adalah transformasi Aswaja dari tradisi pemikiran menjadi gerakan sosial-keagamaan. Transformasi tersebut terjadi ketika nilai-nilai Aswaja tidak hanya berhenti dalam ruang kajian teologi, fikih, tasawuf, atau pendidikan pesantren, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan kolektif dalam kehidupan masyarakat.

Pada tahap ini, Aswaja dapat dipahami melalui dua dimensi yang saling berhubungan: Aswaja sebagai *Manhaj al-Fikr*

↓
Nilai: Tawassuth – Tawazun – Tasamuh – I'tidal
↓
Internalisasi melalui Pesantren dan Tradisi Keilmuan
↓
Aswaja sebagai *Harakah al-Ijtima'iyah*
↓
Moderasi Keagamaan dan Transformasi Sosial

Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* memberikan dasar intelektual bagi cara memahami agama, sedangkan Aswaja sebagai *harakah al-ijtima'iyah* merupakan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, gerakan Aswaja tidak dapat dipisahkan dari tradisi pemikiran yang mendasarinya. Dalam konteks Madura, Nahdlatul Ulama merupakan salah satu bentuk artikulasi kelembagaan yang menjadikan Aswaja sebagai dasar pemikiran dan gerakan. Aswaja diterjemahkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan penguatan moderasi keagamaan.²²

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa Aswaja memiliki dimensi praksis yang kuat. Prinsip *tawassuth* diterjemahkan menjadi sikap moderat; *tawazun* menjadi keseimbangan dalam kehidupan; *tasamuh* menjadi penghargaan terhadap perbedaan; dan *i'tidal* menjadi komitmen terhadap keadilan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi basis etika sosial dalam membangun kehidupan masyarakat yang plural.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman agama, etnis, budaya, dan kelompok sosial, Aswaja sebagai gerakan memiliki relevansi strategis. Moderasi tidak berarti menghilangkan identitas keagamaan, tetapi menempatkan identitas tersebut dalam hubungan yang konstruktif dengan realitas kemajemukan. Dengan demikian, Aswaja dapat menjadi basis bagi pengembangan keberagaman yang inklusif tanpa kehilangan akar tradisinya.

11. Genealogi Aswaja sebagai Kesinambungan Tradisi dan Transformasi Sosial

Berdasarkan uraian di atas, genealogi pemikiran Aswaja dapat dipahami sebagai suatu proses kesinambungan dan transformasi. Kesinambungan terlihat dari adanya transmisi nilai dan tradisi keilmuan dari Nabi Muhammad saw., sahabat, tabi'in, ulama salaf, para imam

²² Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001); Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

teologi dan fikih, ulama tasawuf, hingga ulama Nusantara dan pesantren. Sementara itu, transformasi terlihat dari proses reinterpretasi dan kontekstualisasi tradisi tersebut dalam menghadapi perubahan zaman.

Oleh karena itu, genealogi Aswaja tidak dapat dipahami sebagai sejarah doktrin semata. Ia merupakan sejarah transmisi pengetahuan, pembentukan otoritas, pengembangan metodologi, pelembagaan tradisi, dan aktualisasi nilai. Dalam perspektif tersebut, Aswaja memiliki tiga lapisan genealogi:

1. Genealogi Normatif, yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama ajaran.
2. Genealogi Intelektual, yaitu perkembangan teologi, fikih, dan tasawuf yang membentuk struktur pemikiran Aswaja.
3. Genealogi Sosial, yaitu transmisi dan aktualisasi nilai melalui ulama, pesantren, organisasi keagamaan, dan gerakan sosial.

Ketiga lapisan tersebut membentuk hubungan yang saling berkelindan. Genealogi normatif menyediakan sumber nilai; genealogi intelektual menyediakan metodologi pemikiran; sedangkan genealogi sosial menyediakan ruang aktualisasi. Dengan demikian, Aswaja dapat bergerak dari teks menuju pemikiran, dari pemikiran menuju tradisi, dari tradisi menuju gerakan, dan dari gerakan menuju transformasi sosial.

Secara konseptual, hasil penelitian pada subbab ini dapat dirumuskan dalam skema berikut:

NABI MUHAMMAD SAW.

Al-Qur'an dan Sunnah

↓

SAHABAT

Transmisi dan Ijtihad

↓

TABI'IN & ULAMA SALAF

Pembentukan Tradisi Keilmuan

↓

ASY'ARIYAH & MATURIDIYAH

Formulasi Teologi Sunni

↓

EMPAT MAZHAB FIKIH

Keragaman Metodologi Hukum

↓

AL-GHAZALI & TASAWUF SUNNI

Integrasi Syariat, Spiritualitas, dan Akhlak

↓

ULAMA NUSANTARA

Transmisi dan Kontekstualisasi

↓

PESANTREN di MADURA

Reproduksi Keilmuan dan Tradisi Aswaja

↓

ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR

Cara Berpikir dan Metodologi Keberagamaan

↓

ASWAJA SEBAGAI HAKAKAH AL-IJTIMAIYYAH

Gerakan Sosial-Keagamaan

↓

MODERASI KEAGAMAAN



TRANSFORMASI SOSIAL

Dengan demikian, temuan konseptual pada subbab ini memperlihatkan bahwa Aswaja sebagai gerakan bukanlah fenomena yang terpisah dari Aswaja sebagai pemikiran. Keduanya merupakan dua dimensi dari satu kesinambungan historis dan intelektual. Pemikiran Aswaja memberikan fondasi epistemologis, teologis, normatif, dan etis, sedangkan gerakan Aswaja merupakan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Genealogi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa Aswaja memiliki kemampuan adaptif dalam konteks Madura. Aswaja tidak hanya membawa warisan teologis dan fikih Sunni, tetapi juga memiliki tradisi intelektual yang memungkinkan terjadinya dialog antara teks dan konteks, tradisi dan modernitas, agama dan budaya, serta nilai Islam dan kehidupan kebangsaan. Pesantren menjadi salah satu institusi utama yang menjaga kesinambungan tersebut, sementara gerakan sosial-keagamaan menjadi ruang aktualisasinya.

Pada akhirnya, genealogi pemikiran Aswaja menunjukkan bahwa perjalanan Aswaja dari Nabi Muhammad saw. hingga menjadi gerakan sosial di Madura merupakan proses transmisi, interpretasi, institusionalisasi, dan transformasi. Aswaja tidak berhenti sebagai warisan masa lalu, tetapi terus mengalami reproduksi dan aktualisasi dalam konteks sosial yang berubah. Karena itu, Aswaja sebagai pemikiran dan gerakan memiliki relevansi penting dalam membangun moderasi keagamaan dan transformasi sosial di Madura.

Dengan perspektif ini, tesis utama penelitian dapat ditegaskan bahwa Aswaja merupakan tradisi intelektual yang berkembang secara genealogis dari warisan sunnah Nabi, disistematisasi melalui teologi Sunni, diperkaya oleh tradisi fikih dan tasawuf, ditransmisikan melalui jaringan ulama Nusantara dan pesantren, kemudian diaktualisasikan sebagai gerakan sosial-keagamaan yang berorientasi pada moderasi, kemaslahatan, dan transformasi sosial.

Aswaja sebagai Pemikiran Teologis

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai pemikiran teologis merupakan salah satu dimensi fundamental dalam konstruksi pemikiran Islam Sunni. Secara historis, teologi Aswaja berkembang sebagai respons terhadap dinamika pemikiran keagamaan yang muncul dalam sejarah Islam, khususnya perdebatan mengenai hubungan antara wahyu dan akal, hakikat iman, sifat-sifat Tuhan, kebebasan manusia, serta hubungan antara kehendak Tuhan dan tindakan manusia. Dalam proses perkembangannya, tradisi teologi Aswaja yang direpresentasikan terutama oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah berusaha membangun posisi moderat di antara kecenderungan rasionalisme ekstrem dan literalisme ekstrem.²³

Dalam konteks penelitian ini, Aswaja sebagai pemikiran teologis tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan doktrin yang harus diterima secara dogmatis, tetapi sebagai suatu manhaj berpikir yang memiliki cara tertentu dalam memahami hubungan antara Tuhan, manusia, wahyu, akal, dan realitas. Karena itu, teologi Aswaja memiliki dimensi epistemologis sekaligus aksiologis. Dimensi epistemologis berkaitan dengan sumber dan metode memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan agama, sedangkan dimensi aksiologis berkaitan dengan implikasi keyakinan teologis terhadap perilaku manusia dan kehidupan sosial.

²³ W. Montgomery Watt, *The Formative Period of Islamic Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973); Richard M. Frank, *Creation and the Cosmic System: Al-Ghazālī and Avicenna* (Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1992).

Secara konseptual, konstruksi teologi Aswaja dapat dirumuskan:

Teologi Aswaja = Wahyu + Akal + Moderasi

Rumus tersebut menunjukkan bahwa Aswaja menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran agama, akal sebagai instrumen untuk memahami dan menjelaskan wahyu, sedangkan moderasi sebagai prinsip metodologis dalam menghindari sikap ekstrem. Dengan demikian, Aswaja tidak mempertentangkan wahyu dan akal secara diametral, tetapi berusaha menempatkan keduanya dalam hubungan yang proporsional.

1. Relasi Akal dan Wahyu

Salah satu persoalan utama dalam sejarah teologi Islam adalah hubungan antara akal (*'aql*) dan wahyu (*naql*). Perdebatan ini melahirkan berbagai kecenderungan teologis, mulai dari kelompok yang memberikan otoritas sangat besar kepada akal hingga kelompok yang lebih menekankan keterikatan pada teks wahyu.

Dalam tradisi Aswaja, wahyu memiliki posisi sebagai sumber utama ajaran agama. Al-Qur'an dan sunnah menjadi dasar fundamental dalam menentukan prinsip-prinsip keimanan. Namun demikian, penggunaan akal tidak ditolak. Akal memiliki fungsi penting untuk memahami, menjelaskan, dan mempertahankan kebenaran ajaran agama. Tradisi Asy'ariyah dan Maturidiyah menunjukkan bahwa argumentasi rasional dapat digunakan dalam menjelaskan persoalan teologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip wahyu.²⁴

Posisi tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk keseimbangan epistemologis. Wahyu memberikan orientasi dan batas normatif, sementara akal berfungsi sebagai instrumen interpretatif dan argumentatif. Dengan demikian, wahyu tidak kehilangan otoritasnya, sementara akal tidak kehilangan perannya.

Dalam konteks ini, hubungan wahyu dan akal dapat digambarkan sebagai berikut:

Wahyu → Sumber Kebenaran Normatif

Akal → Instrumen Pemahaman dan Argumentasi

Moderasi → Prinsip Penggunaan Akal

Konstruksi tersebut membedakan Aswaja dari dua kecenderungan ekstrem. Di satu sisi, Aswaja tidak menerima rasionalisme yang menempatkan akal sebagai otoritas tertinggi yang dapat mengesampingkan wahyu. Di sisi lain, Aswaja juga tidak menolak fungsi akal dalam memahami persoalan keagamaan.

Dalam pemikiran al-Asy'ari, penggunaan argumentasi rasional menjadi bagian dari upaya mempertahankan prinsip-prinsip teologi Sunni. Sementara itu, al-Maturidi memberikan ruang yang relatif luas terhadap kemampuan akal dalam mengenali sebagian kebenaran teologis. Perbedaan metodologis antara kedua tradisi tersebut menunjukkan bahwa teologi Sunni

²⁴ Abū al-Ḥasan al-Ash'arī, *Al-Ibānah 'an Uṣūl al-Diyānah* (Beirut: Dār Ibn Zaydūn, n.d.); Abū Manṣūr al-Māturīdī, *Kitāb al-Tawḥīd*, ed. Fathallah Kholeif (Beirut: Dar El-Machreq, 1970).

memiliki keragaman internal, tetapi tetap berada dalam kerangka umum Ahlussunnah wal Jama'ah.²⁵

Relasi akal dan wahyu tersebut memiliki relevansi besar bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer. Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial, Aswaja dapat mengembangkan sikap yang tidak defensif terhadap rasionalitas dan ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak kehilangan orientasi transendentalnya. Dengan demikian, paradigma Aswaja dapat menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran keislaman yang responsif terhadap perubahan tanpa kehilangan akar normatifnya.

2. Konsep Iman

Konsep iman merupakan salah satu tema sentral dalam teologi Islam. Perdebatan mengenai iman mencakup persoalan hakikat iman, hubungan antara iman dan amal, serta status seseorang yang melakukan dosa besar. Dalam sejarah pemikiran Islam, persoalan tersebut menjadi salah satu titik perbedaan antara Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok teologis lainnya.

Dalam tradisi Aswaja, iman secara umum dipahami sebagai pembenaran dalam hati terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. dan pengakuan terhadapnya. Sementara itu, amal saleh memiliki hubungan erat dengan iman sebagai konsekuensi dan manifestasi dari keimanan. Dengan demikian, iman tidak dipahami sebagai konsep yang terlepas dari perilaku moral, meskipun terdapat perbedaan teologis mengenai apakah amal merupakan bagian hakiki dari definisi iman atau merupakan konsekuensi dari iman.²⁶

Posisi Aswaja dalam persoalan iman menunjukkan kecenderungan moderat. Aswaja tidak mudah mengeluarkan seorang Muslim dari lingkup keimanan hanya karena melakukan dosa besar, selama ia tidak mengingkari prinsip dasar keimanan. Sikap ini berbeda dengan kecenderungan Khawarij yang menganggap dosa besar dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam.

Dalam perspektif sosial, konsep iman yang moderat tersebut memiliki implikasi penting. Ia membentuk etika keberagamaan yang menghindari sikap mudah mengkafirkan (*takfir*) dan menghakimi orang lain. Perbedaan dalam persoalan cabang tidak serta-merta menjadi dasar untuk meniadakan identitas keislaman seseorang.

Dengan demikian, konsep iman dalam tradisi Aswaja memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi teologis, yaitu keyakinan terhadap Allah, rasul, dan prinsip-prinsip dasar agama. Kedua, dimensi etis, yaitu tuntutan agar iman diwujudkan dalam amal saleh dan akhlak. Hubungan keduanya dapat dirumuskan:

²⁵ Ulrich Rudolph, *Al-Maturidi and the Development of Sunni Theology in Samarqand* (Leiden: Brill, 2015); Richard M. Frank, *Al-Ghazālī and the Ash'arites* (Durham, NC: Duke University Press, 1994).

²⁶ Abū Ja'far al-Ṭahāwī, *Al-'Aqīdah al-Ṭahāwīyyah*; Abū al-Ḥasan al-Ash'arī, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*, ed. Hellmut Ritter (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1980).

Iman → Keyakinan
Amal → Manifestasi
Akhlak → Aktualisasi

Konsep ini menunjukkan bahwa teologi Aswaja tidak berhenti pada aspek kognitif atau doktrinal, tetapi diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki integritas moral. Dengan demikian, keimanan menjadi sumber bagi pembentukan akhlak dan tanggung jawab sosial.

3. Konsep Tauhid

Tauhid merupakan inti utama ajaran teologi Aswaja. Tauhid menegaskan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatan-Nya. Dalam tradisi Asy'ariyah dan Maturidiyah, pembahasan mengenai tauhid dikembangkan secara sistematis melalui kajian tentang sifat-sifat Allah, hubungan antara zat dan sifat, serta persoalan perbuatan Tuhan dan manusia.

Tauhid dalam tradisi Aswaja bukan hanya pengakuan verbal terhadap keesaan Allah, tetapi juga menjadi dasar pandangan hidup. Pengakuan terhadap keesaan Tuhan mengandung konsekuensi bahwa manusia tidak boleh menuhankan selain Allah, baik dalam bentuk kekuasaan, materi, maupun kepentingan duniawi. Dengan demikian, tauhid memiliki dimensi teologis sekaligus sosial.

Dalam perspektif ini, tauhid dapat menjadi dasar pembentukan kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk dominasi manusia atas manusia lainnya. Jika hanya Allah yang memiliki otoritas mutlak, maka tidak ada manusia yang memiliki kekuasaan absolut atas manusia lainnya. Kesadaran tauhid dengan demikian dapat menjadi landasan bagi penghormatan terhadap martabat manusia dan penolakan terhadap kesewenang-wenangan.

Pemikiran Aswaja juga menempatkan pembahasan sifat-sifat Allah dalam kerangka afirmasi terhadap kesempurnaan Tuhan tanpa menyerupakan-Nya dengan makhluk. Prinsip *tanzih* menjadi penting untuk menjaga transendensi Allah, sedangkan afirmasi terhadap sifat-sifat-Nya menjaga agar konsep ketuhanan tidak menjadi abstraksi yang kehilangan makna.

Dengan demikian, tauhid dalam pemikiran Aswaja memiliki tiga dimensi:

1. Dimensi ontologis, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam.
2. Dimensi epistemologis, yaitu menjadikan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan mengenai Tuhan.
3. Dimensi etis-sosial, yaitu menjadikan tauhid sebagai dasar pembentukan manusia yang bebas dari penghambaan kepada selain Allah dan bertanggung jawab terhadap sesama.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa tauhid tidak hanya berfungsi sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai paradigma kehidupan.

4. Posisi Manusia dalam Teologi Aswaja

Dalam teologi Aswaja, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan khusus dalam ciptaan Allah. Manusia memiliki kemampuan berpikir, kehendak, dan

tanggung jawab moral. Namun, kemampuan tersebut tetap berada dalam keterbatasan sebagai makhluk.

Pandangan ini menempatkan manusia di antara dua ekstrem. Di satu sisi, manusia tidak dianggap sepenuhnya bebas dan terlepas dari kehendak Tuhan. Di sisi lain, manusia juga tidak dipandang sebagai makhluk yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memilih dan bertindak.

Manusia dalam perspektif Aswaja merupakan makhluk yang memiliki amanah dan tanggung jawab. Ia diberi kemampuan untuk memilih, tetapi pilihan tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Konsep ini menjadikan manusia sebagai subjek moral yang aktif dalam kehidupan.

Pandangan tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap kehidupan sosial. Jika manusia memiliki tanggung jawab moral, maka ia memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, lingkungan, dan kehidupan bersama. Dengan demikian, teologi tidak berhenti pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga melahirkan tanggung jawab horizontal dalam hubungan antarmanusia.

Dalam konteks ini, manusia dapat dipahami sebagai:

Hamba Allah ('*abd Allāh*)
dan sekaligus
Khalifah di bumi (*khalīfat Allāh fī al-arḍ*)

Sebagai '*abd*', manusia memiliki orientasi penghambaan kepada Allah. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan secara amanah. Sintesis kedua posisi tersebut menjadi dasar penting bagi etika sosial Aswaja.

5. Kehendak Tuhan dan Ikhtiar Manusia

Persoalan kehendak Tuhan dan kebebasan manusia merupakan salah satu tema penting dalam sejarah teologi Islam. Perdebatan tersebut berkaitan dengan pertanyaan: sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk bertindak jika Allah memiliki kehendak dan kekuasaan mutlak atas segala sesuatu?

Dalam tradisi Asy'ariyah, persoalan tersebut dijelaskan melalui konsep *kasb* atau perolehan tindakan. Konsep ini berusaha menjelaskan bahwa Allah merupakan pencipta segala perbuatan, tetapi manusia tetap memiliki hubungan dengan tindakan yang dilakukannya sehingga ia memiliki tanggung jawab moral. Dengan demikian, teori *kasb* berusaha mempertahankan dua prinsip sekaligus: kemahakuasaan Allah dan tanggung jawab manusia.²⁷

Sementara itu, tradisi Maturidiyah memberikan ruang yang lebih besar terhadap kemampuan dan pilihan manusia, tetapi tetap menempatkan kehendak dan kekuasaan Allah sebagai dasar

²⁷ Abū al-Ḥasan al-Ash'arī, *Al-Luma' fī al-Radd 'alā Ahl al-Zaygh wa al-Bida'* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1952); Richard M. Frank, *Creation and the Cosmic System*.

tertinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi internal dalam teologi Sunni mengenai hubungan antara kehendak Tuhan dan ikhtiar manusia.²⁸

Dalam perspektif Aswaja, hubungan tersebut dapat dipahami melalui prinsip keseimbangan antara takdir dan ikhtiar. Manusia tidak boleh bersikap fatalistik dengan menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak berusaha. Sebaliknya, manusia juga tidak boleh menganggap dirinya memiliki kekuasaan mutlak yang terlepas dari kehendak Tuhan.

Prinsip tersebut memiliki implikasi etis yang sangat penting. Manusia dituntut untuk berusaha secara maksimal, tetapi tetap menyadari keterbatasannya sebagai makhluk. Dalam kehidupan sosial, prinsip ini dapat mendorong sikap aktif, bertanggung jawab, dan optimistis sekaligus rendah hati.

Secara konseptual:

Kehendak Tuhan → Kekuasaan Absolut Allah
Ikhtiar Manusia → Tanggung Jawab Moral
Kasb → Relasi antara Perbuatan dan Tanggung Jawab
Tawakkal → Kesadaran atas Keterbatasan Manusia

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa teologi Aswaja tidak mendorong fatalisme. Sebaliknya, manusia tetap memiliki ruang untuk berusaha dan melakukan perubahan. Kesadaran akan takdir tidak boleh menjadi alasan untuk pasif, tetapi harus menjadi dasar bagi sikap tawakal setelah melakukan ikhtiar.

6. Teologi Aswaja sebagai Jalan Moderasi

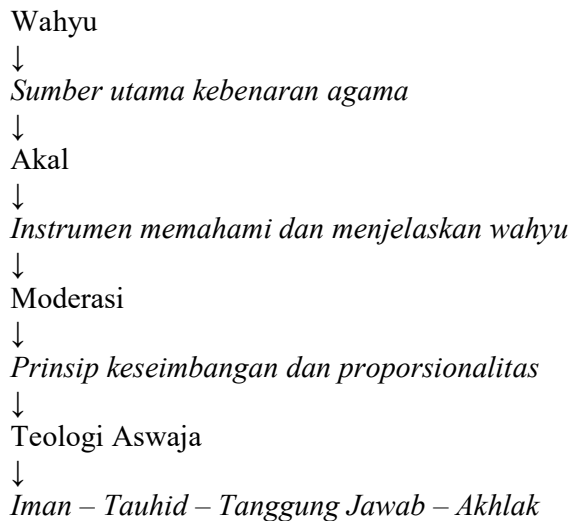
Dari pembahasan mengenai akal dan wahyu, iman, tauhid, posisi manusia, serta kehendak Tuhan dan ikhtiar manusia, terlihat bahwa teologi Aswaja memiliki karakter moderatif. Moderasi tersebut bukan sekadar sikap politik atau sosial, tetapi memiliki akar epistemologis dan teologis yang kuat.

Dalam hubungan akal dan wahyu, Aswaja mengambil posisi antara rasionalisme ekstrem dan tekstualisme ekstrem. Dalam persoalan iman, Aswaja menghindari sikap mudah mengafirkan. Dalam persoalan tauhid, Aswaja menegaskan transendensi Tuhan sekaligus mempertahankan makna sifat-sifat-Nya. Dalam persoalan manusia, Aswaja mengakui tanggung jawab manusia tanpa mengingkari kekuasaan Tuhan. Sementara dalam persoalan takdir, Aswaja menggabungkan kesadaran terhadap kehendak Tuhan dengan kewajiban manusia untuk berikhtiar.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa moderasi dalam teologi Aswaja merupakan hasil dari proses menempatkan berbagai unsur secara proporsional. Moderasi bukan berarti mengambil posisi tengah secara mekanis, tetapi menemukan keseimbangan yang tepat antara dua kutub yang berpotensi ekstrem.

²⁸ Abū Maṣṣūr al-Māturīdī, *Kitāb al-Tawḥīd*; Ulrich Rudolph, *Al-Maturidi and the Development of Sunni Theology in Samarqand*.

Dengan demikian, konstruksi teologi Aswaja dapat dirumuskan:



Dalam kerangka ini, Aswaja dapat dipahami sebagai pemikiran teologis yang mengintegrasikan dimensi normatif dan rasional. Wahyu memberikan arah, akal memberikan kemampuan memahami, sedangkan moderasi memberikan prinsip untuk menempatkan keduanya secara proporsional.

7. Implikasi Teologi Aswaja terhadap Moderasi Keagamaan

Teologi Aswaja memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan moderasi keagamaan. Moderasi yang lahir dari kerangka teologi tidak hanya berarti toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga mencakup cara memahami agama secara seimbang dan tidak ekstrem.

Pertama, relasi akal dan wahyu mendorong keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan intelektual. Kedua, konsep iman yang tidak mudah melakukan *takfir* mendorong penghormatan terhadap keragaman internal umat Islam. Ketiga, konsep tauhid menegaskan kesetaraan manusia sebagai makhluk Allah. Keempat, konsep ikhtiar mendorong tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam perubahan masyarakat.

Dengan demikian, teologi Aswaja dapat menjadi basis bagi moderasi keagamaan yang bersifat substantif. Moderasi bukan hanya slogan, tetapi lahir dari konstruksi teologis yang mengajarkan keseimbangan antara wahyu dan akal, iman dan amal, kebebasan dan tanggung jawab, serta hak individu dan kepentingan sosial.

Dalam konteks Indonesia yang plural, konstruksi tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Masyarakat Indonesia membutuhkan model keberagamaan yang mampu mempertahankan keyakinan sekaligus menghargai perbedaan. Teologi Aswaja memberikan kerangka yang memungkinkan seorang Muslim memiliki keyakinan yang kuat tanpa harus bersikap eksklusif terhadap kelompok lain.

8. Sintesis: Teologi Aswaja sebagai Wahyu, Akal, dan Moderasi

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dirumuskan bahwa teologi Aswaja merupakan konstruksi pemikiran yang berusaha mengintegrasikan wahyu, akal, dan moderasi. Ketiga

unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu kesatuan epistemologis dan teologis.

Wahyu menjadi sumber utama orientasi keimanan dan kebenaran agama. Akal menjadi instrumen untuk memahami, menginterpretasikan, dan mempertahankan ajaran agama. Sementara moderasi menjadi prinsip metodologis agar hubungan antara wahyu dan akal tidak jatuh pada ekstremitas.

Dari perspektif ini, teologi Aswaja dapat digambarkan:

WAHYU

Al-Qur'an dan Sunnah

↓

AKAL

Pemahaman, interpretasi, dan argumentasi

↓

MODERASI

Tawassuth – Tawazun – I'tidal

↓

TEOLOGI ASWAJA

↓

Iman yang kuat

+

Tauhid yang murni

+

Ikhtiar dan tanggung jawab

+

Akhlak dan kemaslahatan

↓

MODERASI KEAGAMAAN

↓

TRANSFORMASI SOSIAL

Dengan demikian, hasil penelitian pada subbab ini menunjukkan bahwa Aswaja sebagai pemikiran teologis memiliki struktur yang tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga metodologis dan praksis. Teologi Aswaja memberikan cara pandang terhadap Tuhan, manusia, dan alam yang menekankan keseimbangan, proporsionalitas, dan tanggung jawab.

Pada akhirnya, teologi Aswaja dapat diposisikan sebagai fondasi penting bagi konstruksi Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*. Jika aspek teologis memberikan dasar tentang apa yang diyakini, maka *manhaj al-fikr* menjelaskan bagaimana cara berpikir dan memahami realitas. Dari sini dapat dilihat hubungan antara teologi dan gerakan sosial: keyakinan tentang Tuhan melahirkan etika, etika melahirkan nilai, nilai membentuk perilaku, dan perilaku yang terorganisasi dapat berkembang menjadi gerakan sosial-keagamaan.

Dengan kata lain, teologi Aswaja tidak berhenti pada wilayah metafisik, tetapi memiliki konsekuensi etis dan sosial. Tauhid melahirkan kesadaran kemanusiaan, iman melahirkan akhlak, ikhtiar melahirkan tanggung jawab, dan moderasi melahirkan sikap toleran. Keseluruhan unsur tersebut menjadi fondasi konseptual bagi Aswaja untuk

berkembang sebagai kekuatan sosial yang mampu berkontribusi terhadap moderasi keagamaan dan transformasi sosial di Madura

Aswaja sebagai Pemikiran Fikih

Aswaja sebagai pemikiran fikih merupakan salah satu dimensi penting dalam konstruksi *manhaj al-fikr* Ahlussunnah wal Jama'ah. Jika teologi Aswaja memberikan dasar tentang bagaimana manusia memahami Tuhan, iman, dan hubungan antara wahyu dengan akal, maka fikih memberikan kerangka metodologis untuk menerjemahkan nilai-nilai normatif Islam ke dalam tindakan konkret. Dalam perspektif ini, fikih tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan hukum yang bersifat statis, tetapi sebagai hasil pemahaman manusia terhadap sumber-sumber syariat yang selalu berinteraksi dengan konteks kehidupan.

Tradisi fikih Aswaja berkembang melalui penghormatan terhadap khazanah mazhab, pengakuan terhadap otoritas ulama, penggunaan metode *ijtihad*, *qiyas*, *ijma'*, dan pertimbangan *maslahah*. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa tradisi fikih Sunni memiliki struktur epistemologis yang memungkinkan adanya kesinambungan antara teks dan konteks. Dengan demikian, Aswaja tidak memahami fikih sebagai sekadar pengulangan pendapat masa lalu, tetapi sebagai proses intelektual yang menghubungkan warisan keilmuan dengan persoalan aktual masyarakat.

Secara konseptual, pola pemikiran fikih Aswaja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Teks → Interpretasi → Konteks → Masalah

Model tersebut menunjukkan bahwa proses pemikiran fikih dimulai dari sumber normatif, dilanjutkan dengan pemahaman dan interpretasi melalui perangkat metodologis, kemudian dikaitkan dengan realitas konkret, dan akhirnya diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan. Pola ini memungkinkan fikih tetap memiliki kesinambungan dengan tradisi sekaligus memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, Aswaja sebagai pemikiran fikih dapat dipahami melalui enam prinsip utama, yaitu penghormatan terhadap mazhab, taqlid dan ittiba', ijtihad, qiyas, ijma', dan maslahah. Keenam unsur tersebut tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk suatu sistem epistemologi fikih yang menghubungkan otoritas teks, metodologi interpretasi, dan kebutuhan masyarakat.

1. Penghormatan terhadap Mazhab sebagai Tradisi Intelektual

Salah satu karakter utama fikih Aswaja adalah penghormatan terhadap mazhab-mazhab fikih yang telah berkembang dalam sejarah Islam. Dalam tradisi Sunni, empat mazhab fikih yang dikenal luas adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keempat mazhab tersebut merupakan hasil dari proses ijtihad para imam mujtahid dalam memahami sumber-sumber syariat dengan menggunakan metodologi yang sistematis.²⁹

²⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.).

Penghormatan terhadap mazhab dalam tradisi Aswaja tidak semestinya dipahami sebagai fanatisme buta terhadap pendapat tertentu. Mazhab lebih tepat dipahami sebagai warisan metodologis yang menyediakan perangkat untuk memahami hukum Islam. Di dalam mazhab terdapat prinsip-prinsip usul fikih, kaidah istinbat, hierarki sumber hukum, dan metode menghadapi persoalan baru.

Dalam konteks ini, mengikuti mazhab memiliki fungsi epistemologis. Seorang Muslim yang belum memiliki kemampuan ijtihad dapat merujuk kepada hasil ijtihad ulama yang memiliki kompetensi. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap otoritas keilmuan dan sekaligus mekanisme untuk menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam.

Tradisi mazhab juga memberikan ruang bagi keragaman pendapat. Perbedaan antara mazhab menunjukkan bahwa satu teks dapat dipahami melalui berbagai pendekatan metodologis. Oleh karena itu, keberadaan mazhab justru dapat menjadi sumber pembelajaran tentang toleransi intelektual (*tasamuh*) dalam Islam.³⁰

Dalam konteks Indonesia, mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam tradisi keislaman pesantren. Namun, pengaruh tersebut tidak berarti bahwa seluruh tradisi keilmuan pesantren tertutup terhadap mazhab lain. Kajian fikih di pesantren juga mengenal perbandingan pendapat (*muqaranah al-madhahib*) dan proses *bahtsul masail* yang memungkinkan para ulama mendiskusikan berbagai persoalan hukum berdasarkan khazanah fikih yang luas.

Dengan demikian, penghormatan terhadap mazhab dalam Aswaja dapat dirumuskan sebagai:

Mazhab = Otoritas Keilmuan + Metodologi + Tradisi + Keragaman Pendapat

Mazhab menjadi jembatan antara umat dengan warisan intelektual Islam. Ia menjaga agar proses pemahaman agama tidak terputus dari tradisi keilmuan, tetapi sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran hukum.

2. Taqlid dan Ittiba': Otoritas Keilmuan dan Kesadaran Metodologis

Dalam tradisi fikih Aswaja, *taqlid* dan *ittiba'* merupakan dua konsep yang berkaitan dengan cara seseorang mengikuti pendapat ulama. *Taqlid* secara umum berarti mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui secara terperinci dalil dan metode istinbat yang digunakan. Sementara *ittiba'* mengandung pengertian mengikuti suatu pendapat dengan mengetahui dasar atau argumentasinya.³¹

Dalam perspektif Aswaja, persoalan taqlid tidak dapat dilepaskan dari tingkat kemampuan intelektual seseorang. Tidak semua Muslim memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad

³⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

³¹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985).

secara mandiri. Oleh karena itu, bagi masyarakat awam, mengikuti pendapat ulama yang memiliki kompetensi merupakan hal yang dapat diterima dalam kerangka tradisi fikih Sunni.

Namun, taqlid tidak seharusnya dipahami sebagai pembenaran terhadap sikap fanatik dan anti-intelektual. Tradisi keilmuan Islam justru mendorong umat untuk meningkatkan kemampuan memahami dalil dan metodologi hukum. Dalam konteks ini, *ittiba'* dapat menjadi bentuk perkembangan dari taqlid menuju pemahaman yang lebih sadar terhadap argumentasi.

Relasi keduanya dapat dipahami melalui skema:

Awam → Taqlid → Mengikuti Otoritas Ulama

Mujtahid/Muta'allim → Ittiba' → Mengikuti dengan Kesadaran Dalil

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Aswaja menempatkan otoritas ulama secara proporsional. Otoritas diperlukan untuk menjaga kesinambungan tradisi, tetapi otoritas tidak boleh menghilangkan proses belajar dan pengembangan intelektual.

Dalam konteks pesantren, hubungan antara *taqlid*, *ittiba'*, dan *ijtihad* berlangsung secara bertahap. Santri terlebih dahulu mempelajari teks-teks fikih dasar, memahami pendapat mazhab, menguasai kaidah bahasa Arab dan usul fikih, kemudian dilatih melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan hukum melalui *bahtsul masail*. Proses tersebut memperlihatkan bahwa tradisi pesantren tidak hanya mempertahankan taqlid, tetapi juga mempersiapkan proses peningkatan kapasitas intelektual menuju pemahaman yang lebih mendalam.

Dengan demikian, taqlid dalam tradisi Aswaja dapat dipahami sebagai mekanisme transmisi otoritas, sedangkan *ittiba'* sebagai mekanisme peningkatan kesadaran metodologis.

3. Ijtihad sebagai Dinamika Pemikiran Fikih

Ijtihad merupakan salah satu instrumen utama dalam pengembangan hukum Islam. Secara konseptual, ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang ahli hukum Islam untuk menemukan atau merumuskan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat dengan menggunakan metodologi tertentu.³²

Tradisi Aswaja tidak menolak ijtihad. Sebaliknya, ijtihad merupakan bagian integral dari perkembangan hukum Islam. Yang menjadi perhatian adalah bahwa ijtihad harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. Seorang mujtahid dituntut menguasai Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, usul fikih, kaidah fikih, serta berbagai disiplin pendukung lainnya.

Dengan demikian, ijtihad dalam Aswaja memiliki dua karakter utama. Pertama, berorientasi pada teks dan sumber syariat. Kedua, responsif terhadap perubahan konteks. Ijtihad

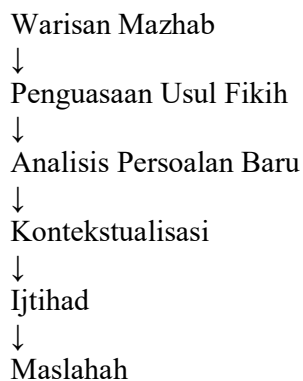
³² Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik.

Dalam konteks modern, persoalan seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, transaksi ekonomi digital, bioetika, lingkungan, perubahan iklim, dan persoalan sosial kontemporer memerlukan pendekatan ijtihad yang mampu menghubungkan warisan fikih dengan perkembangan realitas.

Oleh karena itu, Aswaja dapat mengembangkan model ijtihad yang tidak terputus dari mazhab, tetapi juga tidak terjebak dalam reproduksi pendapat lama secara mekanis. Model tersebut dapat disebut sebagai ijtihad kontekstual berbasis tradisi.

Skemanya:



Dengan model ini, tradisi dan pembaruan tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Tradisi menyediakan fondasi metodologis, sementara ijtihad memungkinkan tradisi tersebut menjawab tantangan zaman.

4. Qiyas: Menghubungkan Kasus Baru dengan Prinsip Syariat

Qiyas merupakan salah satu metode penting dalam tradisi usul fikih untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru berdasarkan kesamaan *'illah* atau alasan hukum dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum.³³

Dalam perspektif Aswaja, qiyas menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk merespons persoalan yang terus berkembang. Tidak semua persoalan baru memiliki jawaban tekstual yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, diperlukan metode analogis yang tetap berakar pada prinsip syariat.

Qiyas dapat digambarkan melalui pola:

Kasus Asal (*Aṣl*)
↓

³³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*.

Hukum Asal
↓
'Illah
↓
Kasus Baru (*Far'*)
↓
Kesamaan 'Illah
↓
Hukum Baru

Metode tersebut menunjukkan bahwa qiyas bukanlah kebebasan rasional tanpa batas. Qiyas tetap bekerja dalam kerangka sumber dan prinsip syariat. Karena itu, qiyas menjadi salah satu bentuk keseimbangan antara teks dan realitas.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, prinsip qiyas dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan baru dengan mencari kesamaan substansial antara persoalan klasik dan persoalan modern. Namun, penerapan qiyas membutuhkan kehati-hatian karena tidak semua persoalan dapat disamakan hanya berdasarkan kemiripan lahiriah. Yang menjadi perhatian utama adalah kesamaan '*illah* yang relevan secara hukum.

Dengan demikian, qiyas menjadi instrumen penting dalam membangun fikih yang adaptif tanpa kehilangan basis normatifnya.

5. Ijma': Konsensus dan Otoritas Kolektif

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa mengenai suatu persoalan hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Dalam teori hukum Islam, ijma' menempati posisi penting sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam tradisi Sunni.³⁴

Dalam konteks Aswaja, ijma' memiliki nilai epistemologis dan sosial. Secara epistemologis, ijma' menunjukkan pentingnya otoritas kolektif dalam proses penetapan hukum. Secara sosial, ijma' menunjukkan bahwa persoalan keagamaan tidak selalu harus diselesaikan secara individual, tetapi dapat dibahas melalui mekanisme musyawarah dan deliberasi keilmuan.

Prinsip ini memiliki relevansi dengan tradisi *bahtsul masail* di lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan. Dalam forum tersebut, persoalan masyarakat dibahas secara kolektif dengan merujuk kepada khazanah kitab fikih dan usul fikih. Meskipun tidak selalu dapat dikategorikan sebagai ijma' dalam pengertian teknis usul fikih, mekanisme tersebut memperlihatkan semangat kolektif dalam produksi pengetahuan hukum Islam.

Dengan demikian, tradisi ijma' memberikan pelajaran bahwa otoritas keagamaan idealnya dibangun melalui dialog, musyawarah, argumentasi, dan tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata melalui klaim individual.

³⁴ Ibid.

Prinsip ini juga memiliki hubungan erat dengan karakter moderasi Aswaja. Musyawarah membuka ruang bagi perbedaan pendapat dan mendorong pencarian solusi yang paling sesuai dengan prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat.

6. Masalah: Orientasi Kemaslahatan dalam Fikih

Masalah merupakan salah satu konsep penting dalam pengembangan hukum Islam. Secara umum, masalah mengacu pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia dalam kerangka tujuan syariat. Pemikiran mengenai masalah memperoleh elaborasi penting dalam karya para ulama usul fikih, khususnya al-Ghazali dan al-Syathibi.³⁵

Dalam perspektif Aswaja, masalah tidak dapat dipahami sebagai pertimbangan manfaat secara bebas tanpa batas. Masalah harus berada dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Al-Ghazali menghubungkan masalah dengan perlindungan terhadap tujuan-tujuan fundamental syariat, yang secara umum mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶ Sementara al-Syathibi mengembangkan pemikiran maqāṣid secara lebih sistematis dengan menekankan bahwa syariat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁷

Dalam konteks kehidupan kontemporer, pendekatan masalah memungkinkan fikih memberikan respons terhadap persoalan yang kompleks. Misalnya, persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi digital, pendidikan, dan teknologi memerlukan pertimbangan yang tidak hanya melihat aspek legal-formal, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Dengan demikian, masalah menjadi jembatan antara norma dan realitas. Ia memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya benar secara tekstual, tetapi juga memiliki relevansi terhadap kebutuhan manusia.

Dalam konteks Aswaja, prinsip masalah dapat dirumuskan:

Syariat → Maqāṣid → Masalah → Keadilan → Kemaslahatan Sosial

Pola tersebut menunjukkan bahwa fikih memiliki orientasi etik. Hukum tidak hanya bertujuan menentukan halal dan haram, tetapi juga mewujudkan keadilan, menjaga kehidupan, dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan.

7. Teks, Interpretasi, Konteks, dan Masalah

³⁵ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993); Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

³⁶ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*.

³⁷ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa pemikiran fikih Aswaja bekerja melalui suatu proses epistemologis yang menghubungkan empat unsur utama:

Teks → Interpretasi → Konteks → Masalah

Pertama, teks. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber utama hukum Islam. Teks memberikan landasan normatif dan batas-batas dasar dalam menentukan hukum.

Kedua, interpretasi. Teks tidak selalu berbicara secara langsung terhadap seluruh persoalan kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan proses interpretasi melalui ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, usul fikih, dan kaidah-kaidah istinbat.

Ketiga, konteks. Hukum diterapkan dalam realitas tertentu. Karena itu, seorang ahli fikih perlu memahami kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemahaman terhadap konteks menjadi penting agar penerapan hukum tidak menghasilkan ketidakadilan atau kemudharatan.

Keempat, masalah. Hasil pemahaman dan penerapan hukum diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Masalah menjadi orientasi etik yang memastikan bahwa hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan syariat.

Keempat unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai model:

TEKS

Al-Qur'an – Sunnah

↓

INTERPRETASI

Usul Fikih – Ijtihad – Qiyas – Ijma'

↓

KONTEKS

Realitas Sosial – Budaya – Ekonomi – Teknologi

↓

MASLAHAH

Maqāṣid al-Syarī'ah – Keadilan – Kemaslahatan

↓

FIKIH KONTEKSTUAL

Model tersebut menunjukkan bahwa fikih Aswaja memiliki karakter dinamis. Teks tetap menjadi fondasi, tetapi pemahaman terhadap teks membutuhkan metodologi. Metodologi membutuhkan pemahaman konteks, sedangkan penerapan hukum harus diarahkan pada kemaslahatan.

8. Aswaja dan Moderasi dalam Pemikiran Fikih

Pemikiran fikih Aswaja memiliki hubungan erat dengan prinsip moderasi (*wasathiyyah*). Moderasi dalam fikih bukan berarti mengabaikan ketentuan syariat, tetapi menempatkan hukum secara proporsional berdasarkan dalil, metodologi, dan realitas.

Penghormatan terhadap mazhab menjaga kesinambungan tradisi. Ijtihad membuka ruang pembaruan. Qiyas memungkinkan analogi terhadap persoalan baru. Ijma' memperkuat dimensi kolektif. Masalah memastikan orientasi hukum kepada kemanfaatan dan keadilan.

Dengan demikian, unsur-unsur tersebut membentuk keseimbangan:

Tradisi ↔ Pembaruan
Teks ↔ Konteks
Otoritas ↔ Kreativitas
Kepastian Hukum ↔ Kemaslahatan
Kecinambungan ↔ Perubahan

Keseimbangan inilah yang menjadi salah satu karakter utama pemikiran fikih Aswaja. Fikih tidak diposisikan sebagai sesuatu yang beku, tetapi juga tidak dibebaskan dari tradisi dan metodologi. Pembaruan hukum harus tetap memiliki akar dalam khazanah keilmuan Islam.

Dalam konteks Indonesia, pola tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Masyarakat Indonesia memiliki karakter plural dan terus mengalami perubahan. Persoalan baru muncul dalam berbagai bidang kehidupan sehingga membutuhkan respons keagamaan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual.

Tradisi *bahtsul masail* di lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan menjadi salah satu contoh bagaimana fikih Aswaja berusaha menjawab persoalan kontemporer melalui dialog antara teks klasik dan realitas baru. Dalam forum tersebut, ulama dan intelektual agama melakukan pembacaan terhadap masalah aktual dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih, usul fikih, kaidah fikih, dan pertimbangan kemaslahatan.¹⁰

9. Implikasi Pemikiran Fikih Aswaja terhadap Transformasi Sosial

Pemikiran fikih Aswaja memiliki implikasi terhadap transformasi sosial karena hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dan kehidupan masyarakat.

Pendekatan masalah memberikan dasar bagi fikih untuk terlibat dalam persoalan sosial. Prinsip perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama dapat dikembangkan dalam konteks modern menjadi agenda perlindungan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, fikih dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial. Fikih tidak hanya bertugas menjawab pertanyaan “apa hukumnya?”, tetapi juga dapat mengembangkan pertanyaan yang lebih luas: “Bagaimana hukum tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan?”

Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari fikih yang hanya bersifat legal-formal menuju fikih yang memiliki dimensi sosial dan etik.

Dalam konteks Aswaja, transformasi sosial berbasis fikih dapat dirumuskan:

Fikih Normatif
↓

Maqāṣid al-Syar'ah



Maslahah



Keadilan Sosial



Pemberdayaan Masyarakat



Transformasi Sosial

Dengan demikian, fikih Aswaja dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Prinsip hukum Islam tidak berhenti pada kepatuhan individual, tetapi diarahkan untuk menciptakan tatanan sosial yang menjamin kemaslahatan bersama.

10. Sintesis: Fikih Aswaja sebagai Model Teks, Interpretasi, Konteks, dan Masalah

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa Aswaja sebagai pemikiran fikih memiliki karakter epistemologis yang integratif. Penghormatan terhadap mazhab menjaga kesinambungan tradisi, sedangkan ijtihad menjaga dinamika pemikiran. Qiyas memungkinkan penerapan prinsip syariat terhadap persoalan baru, ijma' menegaskan pentingnya otoritas kolektif, dan masalah memberikan orientasi terhadap tujuan hukum.

Model fikih Aswaja dapat dirumuskan sebagai berikut:

TEKS



INTERPRETASI



KONTEKS



MASLAHAH

Model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Teks memberikan legitimasi normatif.

Interpretasi memberikan pemahaman metodologis.

Konteks memberikan relevansi sosial.

Maslahah memberikan orientasi etis.

Dengan demikian, fikih Aswaja merupakan suatu proses dinamis yang menghubungkan wahyu, tradisi keilmuan, kemampuan intelektual, realitas sosial, dan tujuan syariat.

Jika teologi Aswaja dapat dirumuskan sebagai:

Teologi Aswaja = Wahyu + Akal + Moderasi

Maka pemikiran fikih Aswaja dapat dirumuskan sebagai:

Fikih Aswaja = Teks + Interpretasi + Konteks + Masalah

Kedua rumusan tersebut memiliki hubungan yang erat. Teologi memberikan dasar epistemologis bahwa wahyu merupakan sumber utama, sedangkan akal menjadi instrumen pemahaman. Fikih kemudian menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam metodologi hukum melalui interpretasi, ijtihad, qiyas, ijma', dan pertimbangan masalah.

Pada akhirnya, Aswaja sebagai pemikiran fikih menunjukkan bahwa keberagamaan tidak harus memilih antara kesetiaan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap perubahan. Keduanya dapat dipertemukan melalui metodologi yang tepat. Tradisi memberikan akar, ijtihad memberikan kemampuan bergerak, konteks memberikan arah penerapan, dan masalah memberikan tujuan.

Oleh karena itu, fikih Aswaja dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan moderasi keagamaan dan transformasi sosial di Indonesia. Ia memungkinkan umat Islam mempertahankan identitas keagamaannya sekaligus merespons perubahan zaman secara konstruktif. Dalam kerangka inilah Aswaja sebagai pemikiran fikih berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang religius, moderat, toleran, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Aswaja sebagai Pemikiran Tasawuf dan Akhlak

Aswaja sebagai pemikiran tasawuf dan akhlak merupakan dimensi penting dalam konstruksi keberagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah. Jika teologi memberikan landasan keyakinan dan fikih memberikan pedoman normatif bagi tindakan manusia, maka tasawuf dan akhlak memberikan dimensi spiritual dan etis yang membentuk kualitas batin serta perilaku sosial seorang Muslim. Dalam kerangka Aswaja, keberagamaan yang ideal tidak hanya diukur dari ketepatan keyakinan dan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari kualitas hati, kebersihan jiwa, dan kemuliaan akhlak.

Tradisi tasawuf Sunni dalam perkembangan pemikiran Islam memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan karakter Aswaja. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar dalam proses integrasi antara syariat dan tasawuf adalah Abū Hāmid al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M). Melalui karya-karyanya, terutama *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, al-Ghazālī memperlihatkan bahwa syariat, fikih, spiritualitas, dan akhlak merupakan unsur yang saling melengkapi dalam pembentukan manusia yang sempurna.³⁸

Dalam perspektif ini, tasawuf Aswaja bukanlah tasawuf yang memisahkan kehidupan spiritual dari kehidupan sosial. Sebaliknya, tasawuf diarahkan pada proses penyucian jiwa yang menghasilkan perubahan perilaku. Seseorang yang mengalami peningkatan spiritual seharusnya semakin rendah hati, ikhlas, sabar, peduli terhadap sesama, dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Dengan demikian, spiritualitas memiliki konsekuensi sosial.

Secara konseptual, hubungan antara tasawuf dan akhlak dalam Aswaja dapat dirumuskan:

³⁸ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.); W. Montgomery Watt, *Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963).

Syariat
↓
Akhlak
↓
Spiritualitas
↓
Kemaslahatan Sosial

Skema tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan pedoman normatif, akhlak menjadi bentuk aktualisasi nilai, spiritualitas memberikan kedalaman batin, sedangkan kemaslahatan sosial menjadi salah satu konsekuensi dari keberagamaan yang matang.

Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai utama yang menjadi bagian penting dalam tradisi tasawuf dan akhlak Aswaja meliputi tawadhu', ikhlas, sabar, zuhud, wara', mahabbah, dan ukhuwah. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajaran moral individual, tetapi juga memiliki relevansi terhadap pembentukan masyarakat yang moderat, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan.

1. Integrasi Syariat dan Tasawuf

Dalam tradisi Aswaja, syariat dan tasawuf tidak diposisikan sebagai dua jalan keberagamaan yang saling bertentangan. Syariat memberikan bentuk lahiriah dan aturan normatif, sedangkan tasawuf memberikan dimensi batin dan orientasi spiritual. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk keberagamaan yang utuh.

Al-Ghazālī merupakan salah satu tokoh yang memberikan formulasi sistematis mengenai hubungan tersebut. Menurutnya, praktik keagamaan yang hanya berhenti pada aspek lahiriah berpotensi kehilangan dimensi spiritual, sedangkan spiritualitas yang tidak berakar pada syariat berpotensi kehilangan pedoman normatif. Oleh karena itu, syariat dan tasawuf harus berjalan secara integratif.³⁹

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Syariat	→	Mengatur	Perbuatan
Tasawuf	→	Menyucikan	Niat
Akhlak	→	Memperbaiki	Perilaku
Kemaslahatan → Mewujudkan Manfaat Sosial			

Dalam konteks ini, syariat dapat dipahami sebagai jalan normatif, sedangkan tasawuf merupakan proses internalisasi nilai-nilai agama ke dalam jiwa. Akhlak menjadi indikator eksternal dari keberhasilan proses spiritual tersebut.

Dengan demikian, seorang Muslim tidak cukup hanya melaksanakan ibadah secara formal, tetapi juga dituntut untuk memahami makna spiritual dan etis di balik ibadah tersebut. Salat,

³⁹ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*; Eric Ormsby, *Theodicy in Islamic Thought: The Dispute over al-Ghazali's "Best of All Possible Worlds"* (Princeton: Princeton University Press, 1984).

misalnya, tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana pembentukan ketakwaan dan pencegahan terhadap perilaku buruk. Puasa tidak hanya berhubungan dengan menahan makan dan minum, tetapi juga melatih pengendalian diri. Zakat tidak hanya berhubungan dengan kewajiban finansial, tetapi juga membangun kepedulian sosial.

Dalam perspektif ini, integrasi syariat dan tasawuf menghasilkan keberagamaan yang tidak terjebak pada formalisme. Syariat memberikan disiplin, tasawuf memberikan kedalaman, dan akhlak memberikan dampak sosial.

2. Tawadhu': Kerendahan Hati sebagai Etika Keilmuan

Tawadhu' merupakan sikap rendah hati yang lahir dari kesadaran bahwa seluruh pengetahuan, kemampuan, dan kelebihan manusia pada hakikatnya merupakan karunia Allah. Dalam tradisi tasawuf dan pendidikan pesantren, *tawadhu'* menjadi salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu.

Tawadhu' tidak berarti merendahkan diri secara berlebihan atau kehilangan kepercayaan diri. *Tawadhu'* berarti menempatkan diri secara proporsional, tidak sombong terhadap ilmu, kekuasaan, harta, maupun kedudukan. Dalam konteks keilmuan, *tawadhu'* mendorong seseorang untuk menyadari keterbatasan pengetahuannya dan terbuka terhadap proses belajar.

Nilai *tawadhu'* memiliki relevansi penting dalam tradisi Aswaja karena dapat menjadi penangkal terhadap sikap merasa paling benar (*truth claim*) yang berlebihan. Seseorang yang memiliki *tawadhu'* akan lebih mampu menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah merendahkan orang lain.

Dalam konteks sosial, *tawadhu'* juga dapat menjadi dasar bagi kepemimpinan yang melayani. Seorang pemimpin yang memiliki *tawadhu'* tidak memandang kekuasaan sebagai sarana dominasi, tetapi sebagai amanah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dengan demikian:

Tawadhu' → Kesadaran Keterbatasan → Menghargai Orang Lain → Dialog → Moderasi

Nilai *tawadhu'* memiliki hubungan langsung dengan prinsip *tasamuh* dan *tawassuth*. Kerendahan hati memungkinkan seseorang menerima kemungkinan bahwa pemahamannya tidak selalu sempurna. Dari sinilah lahir keterbukaan terhadap dialog dan perbedaan.

3. Ikhlas: Kemurnian Orientasi dalam Beragama

Ikhlas merupakan kemurnian niat dalam melakukan suatu amal hanya karena Allah. Dalam tradisi tasawuf, *ikhlas* merupakan salah satu unsur penting dalam proses penyucian jiwa karena kualitas amal tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriahnya, tetapi juga oleh orientasi batinnya.

Ikhlas memiliki dimensi personal dan sosial. Pada tingkat personal, *ikhlas* membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap pujian dan pengakuan manusia. Pada tingkat sosial, *ikhlas* mendorong seseorang melakukan kebaikan tanpa menjadikan keuntungan pribadi sebagai tujuan utama.

Dalam konteks gerakan sosial-keagamaan, nilai ikhlas memiliki relevansi besar. Pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial idealnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan organisasi atau individu, tetapi pada kemaslahatan masyarakat.

Ikhlas juga dapat menjadi mekanisme etis untuk mengendalikan kecenderungan komersialisasi agama. Ketika aktivitas keagamaan hanya berorientasi pada keuntungan material atau popularitas, maka dimensi spiritualnya dapat mengalami degradasi. Oleh karena itu, ikhlas berfungsi sebagai pengingat bahwa aktivitas keagamaan harus memiliki orientasi transendental sekaligus sosial.

Dengan demikian:

Ikhlas → Kemurnian Niat → Integritas Amal → Pelayanan → Kemaslahatan

Nilai ini menjadikan spiritualitas tidak berhenti pada pengalaman batin, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Sabar: Ketahanan Spiritual dan Sosial

Sabar merupakan kemampuan untuk bertahan, mengendalikan diri, dan tetap berada dalam jalan kebaikan ketika menghadapi kesulitan. Dalam tradisi tasawuf, sabar merupakan salah satu maqām penting dalam perjalanan spiritual.

Sabar tidak berarti pasif menerima keadaan. Sabar justru mengandung kekuatan untuk mengendalikan emosi, menghadapi kesulitan, dan tetap berusaha memperbaiki keadaan. Dalam konteks sosial, nilai sabar memiliki hubungan dengan kemampuan membangun ketahanan masyarakat (*social resilience*).

Dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat, konflik, dan ketidakpastian, sikap sabar dapat mencegah munculnya respons emosional dan kekerasan. Sabar memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan refleksi sebelum mengambil keputusan.

Dalam konteks moderasi keagamaan:

Sabar → Pengendalian Diri → Menghindari Reaksi Ekstrem → Dialog → Perdamaian

Dengan demikian, sabar memiliki fungsi strategis dalam membangun masyarakat moderat. Seseorang yang memiliki kesabaran cenderung tidak mudah terprovokasi dan mampu menyelesaikan perbedaan secara damai.

5. Zuhud: Kritik terhadap Materialisme

Zuhud merupakan sikap tidak menjadikan dunia dan kenikmatan material sebagai tujuan utama kehidupan. Zuhud tidak berarti meninggalkan dunia secara total, tetapi menempatkan harta, kekuasaan, dan materi secara proporsional.

Dalam perspektif al-Ghazālī, keterikatan berlebihan terhadap dunia dapat menjadi sumber penyakit hati. Karena itu, zuhud berfungsi sebagai proses pembebasan batin dari dominasi materialisme.⁴⁰

Dalam konteks kontemporer, nilai zuhud memiliki relevansi terhadap kritik atas konsumerisme dan materialisme. Masyarakat modern sering kali mengukur keberhasilan berdasarkan kepemilikan material, popularitas, dan status sosial. Tradisi zuhud menawarkan perspektif alternatif bahwa keberhasilan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh kualitas moral dan manfaat yang diberikan kepada orang lain.

Zuhud juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan kekuasaan. Seorang pemimpin yang memiliki sikap zuhud tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri, tetapi sebagai amanah.

Dalam konteks transformasi sosial:

Zuhud → Pengendalian Hasrat Material → Integritas → Anti-Korupsi → Keadilan Sosial

Dengan demikian, zuhud dapat menjadi sumber etika sosial yang penting dalam menghadapi tantangan kapitalisme, konsumerisme, dan korupsi.

6. Wara': Etika Kehati-hatian Moral

Wara' merupakan sikap berhati-hati dalam menghindari perkara yang meragukan dan berpotensi membawa seseorang kepada perbuatan yang dilarang. Dalam tradisi tasawuf, *wara'* merupakan bentuk pengendalian diri yang lebih tinggi daripada sekadar menghindari perkara haram secara eksplisit.

Wara' memiliki relevansi besar terhadap etika kehidupan publik. Dalam konteks sosial, sikap *wara'* dapat mendorong seseorang untuk berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan, mengelola harta, dan mengambil keputusan yang berdampak terhadap orang lain.

Dalam dunia modern yang penuh dengan konflik kepentingan, nilai *wara'* dapat menjadi prinsip etika untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang tidak hanya bertanya apakah suatu tindakan secara formal diperbolehkan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepantasan, integritas, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan demikian:

Wara' → Kehati-hatian → Integritas → Akuntabilitas → Kepercayaan Publik

Nilai *wara'* memperluas dimensi fikih dari sekadar pertanyaan tentang halal dan haram menuju kesadaran etis mengenai tanggung jawab dan dampak sosial suatu tindakan.

⁴⁰ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Kitāb *Dhamm al-Dunyā*; Sherif, M. A., *Ghazali's Theory of Virtue* (Albany: State University of New York Press, 1975).

7. Mahabbah: Cinta sebagai Dasar Relasi Sosial

Mahabbah atau cinta merupakan salah satu konsep penting dalam tradisi tasawuf. Cinta kepada Allah menjadi dasar utama spiritualitas, tetapi cinta tersebut kemudian memiliki implikasi terhadap hubungan manusia dengan sesama makhluk.

Dalam tradisi tasawuf Sunni, cinta kepada Allah tidak dipahami sebagai pengalaman individual yang terpisah dari kehidupan sosial. Cinta kepada Allah seharusnya melahirkan kasih sayang kepada sesama manusia, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghormatan terhadap kehidupan.

Konsep *mahabbah* memiliki relevansi kuat dengan gagasan moderasi keagamaan. Jika keberagaman dibangun atas dasar cinta, maka dakwah tidak dilakukan dengan kebencian dan kekerasan, tetapi dengan hikmah, kasih sayang, dan keteladanan.

Dalam konteks sosial:

Mahabbah → Kasih Sayang → Empati → Toleransi → Perdamaian

Nilai ini menjadi penting dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi basis bagi hubungan sosial lintas kelompok, agama, etnis, dan budaya.

8. Ukhuwah: Spiritualitas yang Berorientasi Sosial

Ukhuwah merupakan konsep persaudaraan yang menjadi salah satu nilai penting dalam tradisi Islam. Dalam konteks Aswaja, *ukhuwah* dapat dikembangkan dalam beberapa dimensi, yaitu *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah basyariyah*.

Ukhuwah Islamiyah menekankan persaudaraan sesama Muslim. *Ukhuwah wathaniyah* menekankan persaudaraan kebangsaan sebagai sesama warga negara. Sementara *ukhuwah basyariyah* menekankan persaudaraan kemanusiaan secara universal.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa spiritualitas Aswaja memiliki orientasi sosial yang luas. Identitas keagamaan tidak harus menjadi penghalang bagi hubungan kemanusiaan. Sebaliknya, kesadaran spiritual seharusnya memperluas solidaritas.

Dalam konteks transformasi sosial, *ukhuwah* menjadi dasar bagi pembangunan solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren dan organisasi sosial-keagamaan dapat menjadi ruang aktualisasi *ukhuwah* melalui pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian:

Ukhuwah → Solidaritas → Gotong Royong → Pemberdayaan → Transformasi Sosial

Nilai *ukhuwah* menjadikan tasawuf tidak bersifat individualistik. Pengalaman spiritual diarahkan untuk membangun hubungan sosial yang lebih harmonis.

9. Tasawuf dan Akhlak sebagai Fondasi Moderasi Keagamaan

Berdasarkan uraian mengenai tawadhu', ikhlas, sabar, zuhud, wara', mahabbah, dan ukhuwah, dapat dilihat bahwa nilai-nilai tasawuf Aswaja memiliki hubungan langsung dengan prinsip moderasi keagamaan.

Tawadhu' mencegah kesombongan dan klaim kebenaran absolut.

Ikhlas menjaga kemurnian orientasi amal.

Sabar mencegah reaksi emosional dan ekstrem.

Zuhud membebaskan manusia dari dominasi materialisme.

Wara' membangun integritas dan kehati-hatian moral.

Mahabbah menumbuhkan kasih sayang dan toleransi.

Ukhuwah membangun solidaritas sosial.;

Keseluruhan nilai tersebut dapat dirumuskan:

Tawadhu' → Anti-Eksklusivisme

Ikhlas → Integritas

Sabar → Ketahanan dan Perdamaian

Zuhud → Kritik Materialisme

Wara' → Etika dan Akuntabilitas

Mahabbah → Kasih Sayang

Ukhuwah → Solidaritas Sosial

Dengan demikian, tasawuf dan akhlak memiliki fungsi strategis dalam membangun moderasi yang bersifat substantif. Moderasi tidak hanya berupa sikap sosial terhadap kelompok lain, tetapi juga merupakan hasil dari transformasi batin yang melahirkan perilaku moderat.

Dalam konteks ini, moderasi dapat dipahami sebagai proses:

Penyucian Jiwa (*Tazkiyat al-Nafs*)

↓

Pembentukan Akhlak

↓

Pengendalian Ego dan Hawa Nafsu

↓

Toleransi dan Kasih Sayang

↓

Keadilan dan Kemaslahatan Sosial

Dengan demikian, moderasi keagamaan dalam perspektif tasawuf Aswaja memiliki akar spiritual yang kuat. Sikap moderat bukan hanya tuntutan eksternal, tetapi lahir dari kemampuan internal manusia untuk mengendalikan ego dan hawa nafsu.

10. Tasawuf dan Akhlak dalam Tradisi Pesantren

Pesantren merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai tasawuf dan akhlak Aswaja. Pendidikan pesantren tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui keteladanan kiai, kehidupan bersama, disiplin, pengabdian, dan praktik ibadah.

Tradisi pesantren menempatkan adab sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Hubungan antara santri dan kiai tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga moral dan spiritual. Santri belajar menghormati guru, menjaga etika, hidup sederhana, dan mengembangkan solidaritas dengan sesama.

Tradisi tersebut memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai tasawuf. Kesederhanaan dapat dikaitkan dengan zuhud, penghormatan kepada guru dengan tawadhu', ketekunan belajar dengan sabar, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ikhlas dan ukhuwah.⁴

Dalam konteks ini, pesantren menjadi ruang penting bagi proses internalisasi nilai, bukan sekadar transfer pengetahuan. Nilai-nilai Aswaja menjadi habitus yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian:

Kitab Tasawuf
↓
Pembelajaran
↓
Keteladanan Kiai
↓
Pembiasaan
↓
Internalisasi Nilai
↓
Akhlak Santri
↓
Pengabdian Sosial

Proses tersebut menunjukkan bahwa tasawuf Aswaja memiliki hubungan langsung dengan transformasi individu dan masyarakat. Pembentukan spiritualitas individu menjadi dasar bagi pembentukan etika sosial.

11. Dari Spiritualitas Individual Menuju Kemaslahatan Sosial

Salah satu temuan penting dalam pembahasan ini adalah bahwa tasawuf Aswaja tidak berhenti pada dimensi spiritual individual. Nilai-nilai tasawuf justru dapat menjadi energi moral bagi transformasi sosial.

Tawadhu' dapat melahirkan kepemimpinan yang rendah hati. Ikhlas dapat melahirkan pelayanan sosial yang tulus. Sabar dapat memperkuat ketahanan masyarakat. Zuhud dapat menjadi kritik terhadap keserakahan. Wara' dapat memperkuat integritas publik. Mahabbah dapat melahirkan toleransi. Ukhuwah dapat membangun solidaritas.

Dengan demikian, hubungan antara spiritualitas dan transformasi sosial dapat dirumuskan:

Spiritualitas
↓
Akhlak
↓

Etika Sosial
↓
Solidaritas
↓
Keadilan
↓
Kemaslahatan Sosial

Model tersebut memperlihatkan bahwa tasawuf memiliki potensi besar untuk menjadi sumber etika publik. Spiritualitas tidak hanya berfungsi untuk membangun hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga membentuk cara manusia memperlakukan sesama.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat yang plural. Spiritualitas yang berorientasi pada kasih sayang dan ukhuwah dapat menjadi basis bagi pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif.

12. Sintesis: Aswaja sebagai Integrasi Syariat, Akhlak, Spiritualitas, dan Kemaslahatan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa Aswaja sebagai pemikiran tasawuf dan akhlak merupakan dimensi yang menghubungkan aspek normatif, spiritual, moral, dan sosial.

Syariat memberikan pedoman.
Akhlak mengaktualisasikan pedoman dalam perilaku.
Spiritualitas memberikan kedalaman batin.
Kemaslahatan sosial menjadi orientasi praksis.

Dengan demikian:

SYARIAT
↓
Pedoman Normatif
↓
AKHLAK
↓
Pembentukan Karakter
↓
SPIRITUALITAS
↓
Penyucian Jiwa
↓
KEMASLAHATAN SOSIAL
↓
Transformasi Masyarakat

Model tersebut memperlihatkan bahwa tasawuf dan akhlak dalam Aswaja bukanlah pelengkap periferan dalam kehidupan beragama. Keduanya merupakan unsur penting yang menghubungkan dimensi teologis dan fikih dengan kehidupan sosial.

Jika teologi Aswaja dapat dirumuskan sebagai:

Teologi Aswaja = Wahyu + Akal + Moderasi

dan pemikiran fikih Aswaja dirumuskan sebagai:

Fikih Aswaja = Teks + Interpretasi + Konteks + Masalah

maka pemikiran tasawuf dan akhlak Aswaja dapat dirumuskan sebagai:

Tasawuf dan Akhlak Aswaja = Syariat + Spiritualitas + Akhlak + Kemaslahatan

Ketiga dimensi tersebut membentuk satu kesatuan pemikiran:

AKIDAH → *Apa yang diyakini*

FIKIH → *Bagaimana aturan dijalankan*

TASAWUF → *Bagaimana jiwa dibentuk*

AKHLAK → *Bagaimana manusia berperilaku*

KEMASLAHATAN → *Bagaimana kehidupan sosial dibangun*

Dengan demikian, Aswaja sebagai pemikiran tasawuf dan akhlak memberikan kontribusi penting terhadap konstruksi Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*. Tasawuf memberikan dimensi kedalaman spiritual, sedangkan akhlak menerjemahkan spiritualitas ke dalam tindakan. Nilai tawadhu', ikhlas, sabar, zuhud, wara', mahabbah, dan ukhuwah menjadi modal moral untuk membangun kehidupan sosial yang moderat.

Pada akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa spiritualitas dalam tradisi Aswaja tidak bersifat individualistik, tetapi memiliki orientasi sosial. Semakin dalam spiritualitas seseorang, idealnya semakin kuat kepeduliannya terhadap sesama. Dengan demikian, tasawuf Aswaja dapat menjadi sumber etika sosial yang mendorong moderasi keagamaan, solidaritas, keadilan, dan transformasi sosial.

Dalam konteks artikel ini, dimensi tasawuf dan akhlak melengkapi dimensi teologi dan fikih. Teologi memberikan dasar keyakinan, fikih memberikan kerangka normatif, tasawuf memberikan kedalaman spiritual, dan akhlak menjadi aktualisasi dalam kehidupan sosial. Keempatnya kemudian bermuara pada satu tujuan, yaitu terwujudnya kehidupan yang berorientasi pada kemaslahatan, kedamaian, keadilan, dan transformasi sosial.

. Prinsip Dasar Pemikiran Aswaja

Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* tidak hanya dibangun atas fondasi teologi, fikih, tasawuf, dan akhlak, tetapi juga diwujudkan dalam seperangkat prinsip yang menjadi pedoman dalam memahami dan menjalankan kehidupan keagamaan dan sosial. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan karakter dasar pemikiran Ahlussunnah wal Jama'ah yang berusaha menghindari sikap ekstrem, menjaga keseimbangan, menghormati perbedaan, menegakkan keadilan, membangun kerja sama, dan mengembangkan kerendahan hati.

Dalam konteks pemikiran Aswaja di Indonesia, prinsip tersebut sering dirumuskan melalui konsep tawassuth, tawazun, tasamuh, i'tidal, ta'awun, dan tawadhu'. Keenam prinsip ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. *Tawassuth* memberikan orientasi jalan tengah, *tawazun* membangun keseimbangan, *tasamuh* mengembangkan toleransi, *i'tidal* menegakkan

keadilan, *ta'awun* mendorong kerja sama, sedangkan *tawadhu'* membentuk karakter rendah hati.

Secara konseptual, empat prinsip utama dapat dirumuskan sebagai:

Tawassuth + Tawazun + Tasamuh + I'tidal = Paradigma Pemikiran Aswaja

Sementara itu, *ta'awun* dan *tawadhu'* menjadi nilai praksis yang memungkinkan paradigma tersebut diwujudkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, prinsip Aswaja dapat dipahami sebagai hubungan antara paradigma pemikiran dan etika tindakan.

Model tersebut dapat digambarkan:



Dalam perspektif penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar slogan normatif, tetapi merupakan bagian dari konstruksi *manhaj al-fikr* yang memiliki konsekuensi terhadap cara memahami agama, mengelola perbedaan, membangun relasi sosial, dan melakukan transformasi masyarakat.

1. Tawassuth: Jalan Tengah sebagai Orientasi Pemikiran

Tawassuth secara umum bermakna mengambil posisi tengah atau tidak berlebihan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Prinsip ini menjadi salah satu karakter penting keberagamaan Aswaja karena menolak kecenderungan ekstrem (*ghuluw*) maupun sikap meremehkan prinsip-prinsip agama.

Dalam kerangka *manhaj al-fikr*, tawassuth tidak berarti mengambil posisi kompromistis dalam setiap persoalan. Tawassuth lebih tepat dipahami sebagai kemampuan menempatkan suatu persoalan secara proporsional berdasarkan dalil, konteks, dan tujuan yang hendak dicapai. Jalan tengah bukan berarti kehilangan prinsip, melainkan kemampuan mempertahankan prinsip dengan cara yang bijaksana dan tidak berlebihan.

Dalam pemikiran keagamaan, tawassuth dapat menjadi jalan untuk menghindari dua kecenderungan ekstrem. Di satu sisi terdapat pemahaman yang terlalu tekstual dan kaku sehingga kurang memperhatikan konteks. Di sisi lain terdapat pemahaman yang terlalu bebas sehingga kehilangan pijakan normatif. Aswaja berusaha mempertemukan keduanya melalui pendekatan yang mengintegrasikan teks dan konteks.

Modelnya dapat dirumuskan:

Tekstualisme Ekstrem $\leftarrow$ Tawassuth $\rightarrow$ Liberalisme Ekstrem

Tawassuth menempatkan pemikiran keagamaan di antara dua kutub tersebut dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar agama.

Dalam konteks sosial, tawassuth juga mendorong sikap moderat dalam menghadapi perbedaan. Perbedaan tidak langsung dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai realitas yang membutuhkan kebijaksanaan. Sikap ini memungkinkan dialog dan musyawarah berkembang.

Dengan demikian, tawassuth dapat dirumuskan sebagai:

Tawassuth = Keteguhan Prinsip + Proporsionalitas + Kebijaksanaan

Prinsip ini menjadi dasar penting bagi moderasi keagamaan karena mendorong umat untuk menghindari sikap ekstrem dan membangun keberagamaan yang damai.

2. Tawazun: Keseimbangan dalam Kehidupan Keagamaan

Tawazun berarti keseimbangan. Dalam paradigma Aswaja, keseimbangan merupakan prinsip yang mengatur hubungan antara berbagai dimensi kehidupan manusia. Keseimbangan tidak berarti menyamakan semua hal, tetapi menempatkan setiap unsur secara proporsional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Dalam dimensi keagamaan, tawazun dapat diwujudkan dalam keseimbangan antara:

Wahyu $\leftrightarrow$ Akal
Syariat $\leftrightarrow$ Hakikat
Dunia $\leftrightarrow$ Akhirat
Individu $\leftrightarrow$ Masyarakat
Tradisi $\leftrightarrow$ Pembaruan
Hak $\leftrightarrow$ Kewajiban

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Aswaja tidak memandang kehidupan secara dikotomis. Akal tidak dipertentangkan dengan wahyu, dunia tidak dipisahkan secara mutlak dari akhirat, dan tradisi tidak harus bertentangan dengan pembaruan.

Dalam konteks pemikiran, tawazun memiliki fungsi epistemologis. Ia mendorong integrasi antara sumber pengetahuan yang berbeda. Wahyu menjadi sumber normatif, akal menjadi instrumen pemahaman, pengalaman sosial menjadi sumber pertimbangan kontekstual, dan tradisi keilmuan menjadi basis kesinambungan.

Dengan demikian:

Tawazun = Integrasi + Proporsionalitas + Keseimbangan

Prinsip tawazun juga memiliki relevansi terhadap persoalan modern. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, misalnya, Aswaja tidak harus mengambil posisi menolak atau menerima secara total. Teknologi dapat diterima sejauh memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip etika dan kemaslahatan.

Dalam konteks pesantren, prinsip tawazun dapat diwujudkan melalui integrasi antara kitab kuning dan ilmu pengetahuan modern, antara pembelajaran tradisional dan teknologi digital, serta antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Oleh karena itu, tawazun menjadi prinsip penting dalam membangun model pendidikan dan pemikiran Islam yang adaptif tanpa kehilangan identitas.

3. Tasamuh: Toleransi dalam Mengelola Perbedaan

Tasamuh berarti toleransi atau sikap menghargai perbedaan. Dalam paradigma Aswaja, tasamuh memiliki posisi penting karena kehidupan manusia selalu ditandai oleh keragaman pemikiran, mazhab, budaya, dan identitas sosial.

Tasamuh tidak berarti menganggap semua pendapat benar secara mutlak atau menghilangkan identitas keagamaan. Tasamuh berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda selama tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Dalam tradisi keilmuan Islam, tasamuh dapat dilihat dalam penghargaan terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilāf*). Perbedaan dalam masalah *furū'iyah* tidak semestinya menjadi alasan untuk saling menyisahkan atau memutus hubungan sosial.

Prinsip tersebut dapat dirumuskan:

Perbedaan → Dialog → Penghormatan → Toleransi → Kerukunan

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, tasamuh memiliki relevansi yang sangat besar. Masyarakat hidup dalam keragaman agama, etnis, budaya, bahasa, dan tradisi. Oleh karena itu, keberagaman yang tidak memiliki kemampuan mengelola perbedaan berpotensi melahirkan konflik.

Tasamuh memberikan dasar etis bagi umat Islam untuk berinteraksi secara damai dengan kelompok yang berbeda. Dalam konteks Aswaja, toleransi menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan persatuan masyarakat.

Tasamuh juga memiliki hubungan erat dengan tradisi pesantren. Pesantren mengenalkan santri pada berbagai pendapat ulama melalui kajian kitab fikih, tafsir, hadis, dan usul fikih. Keragaman pendapat tersebut secara tidak langsung membentuk kesadaran bahwa dalam tradisi Islam terdapat ruang bagi perbedaan interpretasi.

Dengan demikian, tasamuh dapat menjadi instrumen untuk membangun moderasi keagamaan berbasis penghormatan terhadap keragaman.

4. I'tidal: Keadilan sebagai Orientasi Etis

I'tidal berarti tegak lurus, adil, dan menempatkan sesuatu secara proporsional. Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan (*'adl*) dalam Islam. Dalam konteks Aswaja, *i'tidal* menjadi prinsip yang memastikan bahwa moderasi tidak hanya berarti mengambil posisi tengah, tetapi juga berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Tawassuth memberikan jalan tengah, sedangkan *i'tidal* memberikan orientasi moral. Jalan tengah tanpa keadilan dapat berubah menjadi kompromi yang tidak memiliki prinsip. Sebaliknya, keadilan tanpa kebijaksanaan dapat diterapkan secara kaku. Karena itu, *tawassuth* dan *i'tidal* harus berjalan bersama.

Hubungan keduanya dapat dirumuskan:

Tawassuth → Proporsionalitas
I'tidal → Keadilan

Keduanya menghasilkan:

Moderasi Berbasis Keadilan

I'tidal memiliki dimensi personal sekaligus sosial. Pada tingkat personal, manusia dituntut untuk bersikap adil terhadap dirinya sendiri. Pada tingkat sosial, keadilan harus diwujudkan dalam hubungan antarmanusia.

Dalam konteks transformasi sosial, prinsip *i'tidal* dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan pengelolaan sumber daya. Pemikiran Aswaja yang berorientasi pada *i'tidal* tidak dapat membenarkan diskriminasi, eksploitasi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian:

$I'tidal = Keadilan + Kesetaraan + Proporsionalitas + Tanggung Jawab$

Prinsip ini menjadikan Aswaja tidak hanya sebagai paradigma keberagamaan, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam membangun kehidupan sosial yang adil.

5. Ta'awun: Kerja Sama sebagai Gerakan Sosial

Ta'awun berarti saling menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Jika *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* terutama membentuk kerangka berpikir dan etika, maka *ta'awun* merupakan prinsip yang mengarahkan nilai tersebut ke dalam tindakan kolektif.

Dalam konteks Aswaja, keberagamaan tidak berhenti pada kesalehan individual. Nilai agama harus diterjemahkan menjadi kerja sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. *Ta'awun* menjadi jembatan antara spiritualitas dan gerakan sosial.

Modelnya dapat dirumuskan:

Kesadaran Keagamaan
↓
Kepedulian Sosial
↓
Kerja Sama
↓
Pemberdayaan
↓
Kemaslahatan

Ta'awun memiliki relevansi kuat dengan tradisi pesantren dan organisasi sosial-keagamaan. Pendidikan, dakwah, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan pengembangan masyarakat merupakan bentuk nyata dari prinsip saling membantu.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ta'awun dapat menjadi basis bagi pengembangan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat. Masyarakat tidak hanya bergantung pada negara, tetapi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan melalui solidaritas dan kerja sama.

Dengan demikian, ta'awun memperlihatkan bahwa Aswaja sebagai pemikiran memiliki konsekuensi gerakan. Nilai-nilai Aswaja harus diwujudkan dalam tindakan kolektif yang berorientasi pada kemaslahatan.

6. Tawadhu': Kerendahan Hati sebagai Etika Intelektual

Tawadhu' berarti rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Dalam konteks Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*, tawadhu' memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar sikap personal. Tawadhu' merupakan etika intelektual yang memungkinkan seseorang menyadari keterbatasan pengetahuannya.

Kesadaran terhadap keterbatasan pengetahuan memiliki peran penting dalam menghindari klaim kebenaran yang berlebihan. Seseorang yang tawadhu' akan menyadari bahwa pemahamannya terhadap teks agama memiliki keterbatasan dan dapat didialogkan dengan pemahaman orang lain.

Dalam tradisi keilmuan pesantren, tawadhu' menjadi bagian dari adab menuntut ilmu. Santri belajar untuk menghormati guru, menghargai ulama, dan tidak terburu-buru mengklaim dirinya sebagai otoritas keagamaan.

Prinsip ini dapat dirumuskan:

Tawadhu' → Kesadaran Keterbatasan → Dialog → Menghargai Perbedaan → Moderasi

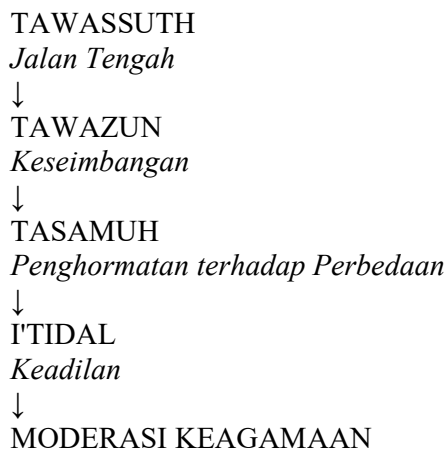
Dalam konteks era digital, nilai tawadhu' menjadi semakin penting. Kemudahan akses informasi memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan secara cepat, tetapi akses informasi tidak selalu identik dengan otoritas keilmuan. Karena itu, tawadhu' intelektual diperlukan agar seseorang tidak mudah merasa paling benar hanya karena memperoleh informasi dari internet atau media sosial.

Tawadhu' juga dapat menjadi etika penting dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Teknologi dapat membantu manusia memperoleh informasi, tetapi keputusan moral dan keagamaan tetap membutuhkan tanggung jawab manusia, kebijaksanaan, dan pertimbangan etis.

7. Relasi Antara Tawassuth, Tawazun, Tasamuh, dan I'tidal

Keempat prinsip utama Aswaja memiliki hubungan yang bersifat integratif. Tawassuth memberikan orientasi jalan tengah, tawazun menjaga keseimbangan, tasamuh mengatur hubungan dengan perbedaan, dan i'tidal memberikan orientasi keadilan.

Hubungan tersebut dapat digambarkan:



Tawassuth tanpa tawazun dapat menghasilkan jalan tengah yang tidak seimbang. Tawazun tanpa tasamuh dapat menghasilkan keseimbangan yang tidak sensitif terhadap keragaman. Tasamuh tanpa i'tidal dapat berubah menjadi toleransi tanpa batas yang mengabaikan keadilan. Karena itu, keempatnya harus dipahami sebagai satu kesatuan.

Model konseptualnya:

Tawassuth = *Bagaimana mengambil posisi?*
Tawazun = *Bagaimana menjaga keseimbangan?*
Tasamuh = *Bagaimana menghadapi perbedaan?*
I'tidal = *Bagaimana menegakkan keadilan?*

Keempat pertanyaan tersebut membentuk satu paradigma pemikiran yang utuh.

Dengan demikian:

Tawassuth + Tawazun + Tasamuh + I'tidal = Paradigma Pemikiran Aswaja

Paradigma tersebut menjadi fondasi bagi pembentukan cara berpikir yang moderat, toleran, seimbang, dan berkeadilan.

8. Integrasi Ta'awun dan Tawadhu' dalam Praksis Aswaja

Jika empat prinsip pertama membentuk paradigma pemikiran, maka *ta'awun* dan *tawadhu'* berfungsi sebagai nilai praksis yang menghidupkan paradigma tersebut dalam kehidupan sosial.

Hubungannya dapat dirumuskan:

Tawassuth



Cara mengambil posisi secara moderat

Tawazun



Cara menjaga keseimbangan

Tasamuh



Cara mengelola perbedaan

I'tidal



Cara menegakkan keadilan

Ta'awun



Cara membangun kerja sama

Tawadhu'



Cara menjaga etika diri



GERAKAN SOSIAL-KEAGAMAAN

Dengan demikian, Aswaja tidak hanya berhenti pada pemikiran normatif. Ia memiliki potensi untuk berkembang menjadi gerakan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam kerangka artikel ini, hubungan antara *manhaj al-fikr* dan *harakah al-ijtima'iyyah* dapat dirumuskan:

Nilai Aswaja



Manhaj al-Fikr



Internalisasi dalam Individu



Pembentukan Etika Sosial



Ta'awun dan Solidaritas



Gerakan Sosial-Keagamaan
↓
Transformasi Sosial

Model tersebut memperlihatkan bahwa gerakan sosial Aswaja memiliki akar pada pemikiran. Gerakan tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari nilai dan paradigma yang telah diinternalisasikan.

9. Prinsip Aswaja dan Moderasi Keagamaan

Prinsip dasar Aswaja memiliki hubungan erat dengan konsep moderasi keagamaan. Moderasi tidak hanya berarti berada di tengah antara dua ekstrem, tetapi merupakan proses membangun keberagamaan yang adil, seimbang, toleran, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, moderasi dapat dirumuskan:

Moderasi = Tawassuth + Tawazun + Tasamuh + I'tidal

Sementara *ta'awun* dan *tawadhu'* menjadi nilai yang mengaktualisasikan moderasi tersebut dalam kehidupan sosial.

Moderasi yang dibangun berdasarkan prinsip Aswaja memiliki beberapa karakter:

1. Tidak ekstrem dalam memahami agama.
2. Tidak mudah mengkafirkan atau menyesatkan kelompok lain.
3. Menghargai perbedaan dalam persoalan yang memungkinkan adanya ikhtilaf.
4. Menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan.
5. Menempatkan keadilan sebagai prinsip kehidupan sosial.
6. Mengembangkan kerja sama dalam persoalan kemanusiaan.
7. Membangun kerendahan hati dalam kehidupan intelektual dan keagamaan.

Dengan demikian, moderasi Aswaja bukan sekadar strategi menghadapi radikalisme atau ekstremisme, tetapi merupakan paradigma keberagamaan yang berakar dalam tradisi intelektual dan spiritual Islam.

10. Prinsip Aswaja sebagai Basis Transformasi Sosial

Prinsip-prinsip Aswaja memiliki potensi besar untuk menjadi basis transformasi sosial. Tawassuth mendorong masyarakat menghindari konflik ekstrem. Tawazun menjaga keseimbangan kehidupan. Tasamuh menciptakan ruang hidup bersama. I'tidal mendorong keadilan. Ta'awun membangun solidaritas. Tawadhu' mencegah kesombongan dan dominasi.

Jika prinsip tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan sosial, maka dapat menghasilkan model transformasi:

Tawassuth → Mencegah Ekstremisme
Tawazun → Menjaga Keseimbangan
Tasamuh → Membangun Kerukunan
I'tidal → Menegakkan Keadilan

Ta'awun → Memperkuat Solidaritas
Tawadhu' → Membentuk Etika Publik



Masyarakat Moderat, Adil, Toleran, dan Inklusif

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Dalam pendidikan, *tawassuth* dan *tawazun* dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Dalam kehidupan sosial, *tasamuh* menjadi dasar penghormatan terhadap keragaman. Dalam bidang ekonomi, *i'tidal* dapat menjadi landasan bagi keadilan dan pemerataan. Dalam pemberdayaan masyarakat, *ta'awun* menjadi basis kerja sama. Dalam kepemimpinan, *tawadhu'* menjadi etika untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, Aswaja dapat dipahami sebagai paradigma yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan nilai keagamaan dengan agenda transformasi sosial.

11. Relevansi Prinsip Aswaja di Era Kontemporer

Tantangan kehidupan kontemporer semakin kompleks. Masyarakat menghadapi polarisasi politik, ekstremisme keagamaan, intoleransi, disinformasi digital, konsumerisme, krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan perubahan teknologi yang sangat cepat.

Dalam kondisi tersebut, prinsip Aswaja memiliki relevansi strategis. *Tawassuth* dapat menjadi dasar untuk menghadapi polarisasi. *Tawazun* dapat menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. *Tasamuh* dapat menjadi basis menghadapi intoleransi. *I'tidal* dapat menjadi prinsip menghadapi ketidakadilan. *Ta'awun* dapat memperkuat solidaritas masyarakat. *Tawadhu'* dapat menjadi etika dalam menghadapi ledakan informasi.

Khusus dalam konteks era digital, prinsip tersebut dapat dikembangkan menjadi etika digital Aswaja:

Tawassuth → Tidak menyebarkan konten ekstrem.
Tawazun → Menyeimbangkan informasi dan verifikasi.
Tasamuh → Menghormati perbedaan di ruang digital.
I'tidal → Tidak menyebarkan fitnah dan hoaks.
Ta'awun → Menggunakan teknologi untuk kemanfaatan.
Tawadhu' → Menyadari keterbatasan pengetahuan.

Dengan demikian, nilai Aswaja dapat ditransformasikan ke dalam konteks baru tanpa kehilangan akar tradisinya.

12. Sintesis Prinsip Dasar Pemikiran Aswaja

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa prinsip dasar Aswaja membentuk suatu sistem pemikiran yang integratif. *Tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* merupakan empat prinsip utama yang membentuk paradigma pemikiran. Sementara *ta'awun* dan *tawadhu'* menjadi nilai yang menerjemahkan paradigma tersebut ke dalam praksis kehidupan sosial.

Model konseptualnya dapat dirumuskan:

TAWASSUTH

Jalan Tengah

+

TAWAZUN

Keseimbangan

+

TASAMUH

Toleransi

+

I'TIDAL

Keadilan

PARADIGMA PEMIKIRAN ASWAJA

Kemudian paradigma tersebut diaktualisasikan melalui:

TA'AWUN

Kerja Sama

+

TAWADHU'

Kerendahan Hati

ETIKA PRAXIS ASWAJA

Selanjutnya:

Paradigma Pemikiran

↓

Internalisasi Nilai

↓

Etika Praksis

↓

Gerakan Sosial-Keagamaan

↓

Moderasi

↓

Transformasi Sosial

Sintesis ini memperkuat argumentasi utama artikel bahwa Aswaja tidak hanya dapat dipahami sebagai doktrin teologis atau identitas kelompok, tetapi juga sebagai manhaj al-fikr yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan praksis sosial.

Dengan demikian, prinsip Aswaja dapat ditempatkan dalam dua dimensi yang saling berhubungan. Pertama, sebagai paradigma pemikiran, Aswaja membangun cara memahami agama melalui tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Kedua, sebagai etika gerakan, Aswaja mengaktualisasikan nilai tersebut melalui ta'awun dan tawadhu'.

Dalam perspektif artikel ini, hubungan tersebut menjadi fondasi konseptual bagi rumusan:

ASWAJA = MANHAJ AL-FIKR + HAKAKAH AL-IJTIMAIYYAH

Sebagai *manhaj al-fikr*, Aswaja membentuk cara berpikir yang moderat, seimbang, toleran, dan adil. Sebagai *harakah al-ijtima'iyah*, Aswaja mendorong kerja sama, solidaritas, pemberdayaan, dan transformasi sosial.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar Aswaja memiliki relevansi strategis dalam membangun kehidupan keagamaan dan sosial di Indonesia. Tawassuth memberikan arah moderasi, tawazun menjaga keseimbangan, tasamuh mengelola keragaman, i'tidal menegakkan keadilan, ta'awun membangun solidaritas, dan tawadhu' membentuk etika kerendahan hati. Keseluruhannya membentuk paradigma yang memungkinkan tradisi Aswaja terus berkembang sebagai kekuatan intelektual, spiritual, dan sosial yang responsif terhadap tantangan zaman.

. Dari Pemikiran Menuju Gerakan

Salah satu persoalan penting dalam memahami Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) adalah bagaimana suatu konstruksi pemikiran keagamaan dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat. Aswaja tidak hanya dapat dipahami sebagai seperangkat doktrin teologis, fikih, tasawuf, dan akhlak, tetapi juga sebagai sebuah paradigma pemikiran (*manhaj al-fikr*) yang mampu melahirkan praksis sosial dan gerakan kemasyarakatan. Dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut dapat dilihat melalui proses panjang transmisi pengetahuan, internalisasi nilai, pembentukan tradisi, pelembagaan institusi, dan artikulasi gerakan sosial-keagamaan.

Dengan demikian, perubahan dari pemikiran menuju gerakan tidak berlangsung secara spontan. Ia merupakan proses sosial-intelektual yang berlangsung secara bertahap melalui mekanisme pendidikan, transmisi keilmuan, pembentukan habitus, dakwah, dan pengorganisasian masyarakat. Proses tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

PEMIKIRAN

↓

NILAI

↓

TRADISI

↓

INSTITUSI

↓

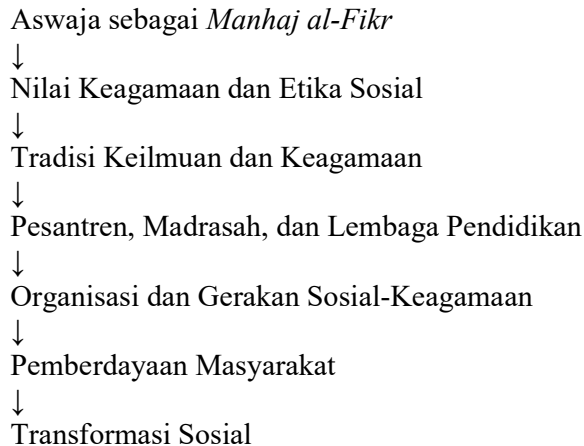
GERAKAN

↓

TRANSFORMASI SOSIAL

Model tersebut menjadi salah satu temuan konseptual penting dalam penelitian ini. Aswaja sebagai pemikiran menghasilkan seperangkat nilai seperti *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, *i'tidal*, *ta'awun*, dan *tawadhu'*. Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasikan melalui tradisi keagamaan dan pendidikan. Tradisi selanjutnya dilembagakan melalui pesantren, madrasah, sekolah, organisasi sosial-keagamaan, dan berbagai institusi masyarakat. Dari institusi tersebut lahir gerakan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara pemikiran dan gerakan dapat dirumuskan:



Proses tersebut menunjukkan bahwa Aswaja memiliki dimensi pemikiran sekaligus praksis. Ia bukan hanya berbicara tentang bagaimana manusia memahami agama, tetapi juga bagaimana pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

1. Pemikiran sebagai Titik Awal Gerakan

Setiap gerakan sosial pada dasarnya membutuhkan kerangka pemikiran yang memberikan arah, legitimasi, dan tujuan. Dalam konteks Aswaja, kerangka pemikiran tersebut berakar pada tradisi Sunni yang berkembang melalui teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, fikih empat mazhab, serta tasawuf Sunni. Ketiga dimensi tersebut kemudian membentuk cara pandang keagamaan yang mengintegrasikan aspek akidah, syariat, spiritualitas, dan akhlak.

Pemikiran Aswaja memiliki karakter moderat karena berusaha mempertemukan berbagai dimensi yang sering dipertentangkan. Dalam teologi, terdapat keseimbangan antara wahyu dan akal. Dalam fikih, terdapat hubungan antara teks, interpretasi, konteks, dan kemaslahatan. Dalam tasawuf, terdapat hubungan antara syariat, spiritualitas, dan akhlak. Sementara dalam kehidupan sosial, terdapat hubungan antara keberagamaan dan tanggung jawab kemanusiaan.

Dari sinilah lahir prinsip-prinsip dasar Aswaja, yaitu *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*, yang kemudian dilengkapi dengan *ta'awun* dan *tawadhu'*. Nilai tersebut memberikan orientasi bagi tindakan sosial.

Secara konseptual:





Praksis Sosial

Dengan demikian, pemikiran Aswaja menjadi sumber legitimasi dan orientasi moral bagi gerakan sosial-keagamaan.

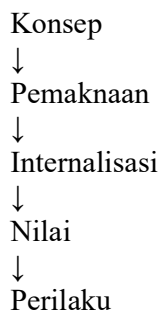
2. Dari Pemikiran Menuju Nilai

Pemikiran tidak akan menjadi kekuatan sosial apabila tidak diterjemahkan menjadi nilai yang dapat dipahami dan diinternalisasikan oleh masyarakat. Dalam konteks Aswaja, nilai menjadi jembatan antara konsep abstrak dan tindakan konkret.

Nilai *tawassuth*, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai konsep moderasi, tetapi diwujudkan dalam sikap tidak mudah melakukan takfir, tidak mudah melakukan kekerasan, dan menghindari ekstremisme. *Tawazun* diterjemahkan dalam keseimbangan antara agama dan kehidupan sosial, tradisi dan modernitas, serta kepentingan individu dan masyarakat.

Tasamuh diwujudkan dalam penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan *i'tidal* diwujudkan dalam komitmen terhadap keadilan. *Ta'awun* diterjemahkan dalam kerja sama sosial, sementara *tawadhu'* membentuk etika dalam hubungan antarmanusia.

Dengan demikian, proses transformasi pemikiran menjadi nilai dapat digambarkan:



Proses ini memperlihatkan bahwa kekuatan Aswaja tidak hanya terletak pada kemampuan mempertahankan doktrin, tetapi juga pada kemampuannya mengubah doktrin menjadi orientasi moral dan sosial.

3. Tradisi sebagai Media Transmisi Nilai Aswaja

Nilai yang telah terbentuk kemudian ditransmisikan melalui tradisi. Tradisi menjadi mekanisme penting dalam mempertahankan kesinambungan pemikiran dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam konteks pesantren, transmisi tersebut dilakukan melalui pengajian kitab kuning, *bandongan*, *sorogan*, musyawarah, *bahtsul masa'il*, praktik ibadah, pembiasaan adab, dan

keteladanan kiai. Tradisi tersebut tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan habitus santri.⁴¹

Dalam proses tersebut, Aswaja tidak hanya dipelajari sebagai materi pelajaran, tetapi dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Santri belajar menghormati guru sebagai bentuk *tawadhu'*, hidup sederhana sebagai bentuk *zuhud*, menghargai perbedaan pendapat sebagai bentuk *tasamuh*, serta bekerja bersama sebagai bentuk *ta'awun*.

Dengan demikian, tradisi berfungsi sebagai media:

Transmisi Pengetahuan

+

Internalisasi Nilai

+

Pembentukan Karakter

Reproduksi Tradisi Aswaja

Tradisi tersebut memungkinkan pemikiran Aswaja bertahan sekaligus berkembang sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi masyarakat.

4. Pesantren sebagai Basis Transformasi Pemikiran Menjadi Gerakan

Pesantren merupakan salah satu institusi utama yang menghubungkan pemikiran Aswaja dengan gerakan sosial. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki fungsi sebagai pusat transmisi ilmu, pembentukan karakter, reproduksi tradisi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam sejarah Islam Indonesia, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial masyarakat. Kiai dan pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk orientasi keagamaan dan sosial masyarakat di sekitarnya.⁴²

Proses tersebut dapat dirumuskan:

Kitab Kuning

↓

Kiai dan Ulama

↓

Santri

↓

⁴¹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), khususnya pembahasan tentang akhlak, adab, dan penyucian jiwa.

⁴² M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019).

Internalisasi Nilai Aswaja

↓

Pengabdian kepada Masyarakat

↓

Gerakan Sosial

Pesantren dengan demikian menjadi ruang reproduksi intelektual sekaligus ruang produksi gerakan. Pengetahuan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas atau masjid, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan sosial.

Pengembangan pendidikan, pelayanan masyarakat, pengelolaan lembaga sosial, dakwah, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk konkret dari transformasi nilai Aswaja.

Dalam konteks ini, pesantren dapat dipahami sebagai laboratorium sosial Aswaja, yaitu ruang tempat nilai keagamaan diuji dan diterapkan dalam kehidupan nyata.

5. Madrasah sebagai Ruang Pelembagaan Nilai Aswaja

Selain pesantren, madrasah menjadi institusi penting dalam proses pelembagaan pemikiran Aswaja. Madrasah memungkinkan nilai-nilai Aswaja masuk ke dalam sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Melalui madrasah, nilai *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan sikap sosial.

Dalam konteks pendidikan, Aswaja dapat dikembangkan sebagai paradigma yang mengintegrasikan:

Ilmu Keagamaan

↔

Ilmu Pengetahuan

↔

Akhlak

↔

Keterampilan Sosial

Model tersebut sejalan dengan prinsip *tawazun* yang menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

Madrasah juga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaan. Dengan demikian, madrasah menjadi ruang penting untuk mentransformasikan Aswaja dari tradisi keilmuan menjadi kompetensi sosial dan kewargaan.

6. Pendidikan sebagai Instrumen Transformasi Sosial

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam mengubah pemikiran menjadi gerakan. Melalui pendidikan, nilai-nilai Aswaja ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendidikan Aswaja tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang memahami ajaran agama, tetapi juga manusia yang mampu hidup bersama dalam masyarakat plural. Karena itu, pendidikan harus mengembangkan sikap toleransi, keadilan, tanggung jawab, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam perspektif ini, pendidikan Aswaja memiliki tiga fungsi:

1. Fungsi Transformatif, yaitu mengubah cara berpikir.
2. Fungsi Formatif, yaitu membentuk karakter.
3. Fungsi Transmisif, yaitu mewariskan tradisi keilmuan.

Ketiga fungsi tersebut dapat dirumuskan:

Pendidikan
↓
Transformasi Kognitif
↓
Pembentukan Karakter
↓
Internalisasi Nilai Aswaja
↓
Kesiapan Berpartisipasi dalam Masyarakat

Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen penting untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya memahami Aswaja sebagai identitas, tetapi mampu menjadikannya sebagai paradigma kehidupan.

7. Dakwah sebagai Aktualisasi Nilai Aswaja

Dakwah merupakan ruang penting bagi aktualisasi pemikiran Aswaja. Dalam paradigma Aswaja, dakwah tidak semata-mata bertujuan meningkatkan jumlah pengikut, tetapi mengajak manusia menuju kehidupan yang lebih baik melalui pendekatan yang bijaksana.

Prinsip *tawassuth* mengarahkan dakwah agar tidak ekstrem. *Tasamuh* mendorong penghormatan terhadap keragaman. *Tawazun* menjaga keseimbangan antara teks dan konteks. *I'tidal* memastikan dakwah tetap berorientasi pada keadilan.

Dakwah yang berlandaskan nilai Aswaja dapat dirumuskan:

Dakwah Bil-Hikmah
↓
Dialog
↓
Keteladanan
↓
Pemberdayaan



Perubahan Sosial

Dalam konteks masyarakat modern, dakwah juga mengalami transformasi melalui media digital. Media sosial, platform video, podcast, dan berbagai kanal digital menjadi ruang baru bagi penyebaran nilai Aswaja. Namun, transformasi digital tersebut juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, dan penyebaran paham keagamaan yang ekstrem.

Karena itu, dakwah Aswaja perlu mengembangkan strategi digital yang mengedepankan literasi, verifikasi informasi, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi aktivitas penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya digital yang moderat dan bertanggung jawab.

8. Organisasi Sosial sebagai Pelembagaan Gerakan Aswaja

Transformasi Aswaja menjadi gerakan sosial semakin kuat ketika nilai-nilainya dilembagakan melalui organisasi. Organisasi menyediakan struktur, kepemimpinan, jaringan, sumber daya, dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan nilai keagamaan diterjemahkan menjadi program sosial.

Dalam konteks Madura, organisasi sosial-keagamaan memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi menjadi ruang artikulasi nilai keagamaan dalam kehidupan publik.

Secara konseptual:

Nilai Aswaja



Organisasi



Pengorganisasian Masyarakat



Program Sosial



Pemberdayaan



Transformasi

Organisasi memungkinkan gerakan sosial memiliki keberlanjutan. Jika nilai hanya berada pada tingkat individu, dampaknya mungkin terbatas. Namun ketika nilai tersebut diorganisasikan, ia dapat menghasilkan perubahan yang lebih luas.

Dengan demikian, organisasi sosial-keagamaan menjadi salah satu bentuk konkret dari *harakah al-ijtima'iyah*.

9. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Nyata Gerakan Aswaja

Gerakan Aswaja menemukan bentuk paling konkret ketika nilai-nilainya diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berbeda dengan sekadar pemberian bantuan. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi dan menyelesaikan persoalan secara mandiri.

Dalam perspektif Aswaja, pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai bidang: pendidikan; ekonomi; kesehatan; sosial; lingkungan; pengembangan keterampilan; penguatan masyarakat desa; pengembangan kewirausahaan; literasi digital.

Prinsip *ta'awun* menjadi dasar utama dalam proses tersebut. Masyarakat tidak dipandang sebagai objek yang pasif, tetapi sebagai subjek perubahan.

Model pemberdayaan dapat dirumuskan:

Ta'awun
↓
Partisipasi
↓
Peningkatan Kapasitas
↓
Kemandirian
↓
Keadilan Sosial

Dalam konteks ini, gerakan Aswaja tidak berhenti pada kegiatan ritual atau simbolik, tetapi diarahkan pada penyelesaian persoalan konkret masyarakat.

10. Dari Gerakan Sosial Menuju Transformasi Sosial

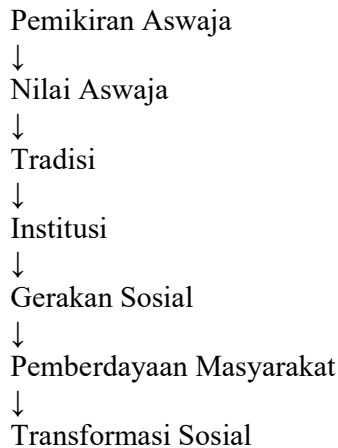
Gerakan sosial merupakan tahap penting, tetapi tujuan akhirnya bukan sekadar membangun organisasi atau memperbanyak kegiatan. Tujuan yang lebih fundamental adalah menghasilkan transformasi sosial.

Transformasi sosial berarti perubahan yang menyentuh struktur, relasi, kesadaran, dan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks Aswaja, transformasi tersebut dapat mencakup perubahan dari:

Eksklusivisme → Inklusivisme
Intoleransi → Tasamuh
Ketimpangan → Keadilan
Individualisme → Ta'awun
Ekstremisme → Tawassuth
Ketidakseimbangan → Tawazun

Dengan demikian, transformasi sosial merupakan konsekuensi dari internalisasi nilai Aswaja dalam kehidupan masyarakat.

Modelnya dapat dirumuskan:



Model ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pemikiran dan transformasi sosial bersifat berjenjang dan berkesinambungan.

11. Aswaja sebagai *Manhaj al-Fikr* dan *Harakah al-Ijtima'iyah*

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa Aswaja memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dimensi pemikiran dan dimensi gerakan.

Sebagai manhaj al-fikr, Aswaja memberikan kerangka epistemologis dan etis dalam memahami agama dan realitas. Kerangka tersebut diwujudkan melalui prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*.

Sebagai harakah al-ijtima'iyah, Aswaja menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan kolektif melalui pendidikan, dakwah, organisasi, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Hubungan tersebut dapat dirumuskan:

ASWAJA

Manhaj al-Fikr

↓
Tawassuth
Tawazun
Tasamuh
I'tidal

+

Harakah al-Ijtima'iyah

↓
Ta'awun
Pendidikan
Dakwah
Organisasi
Pemberdayaan

=

Moderasi Keagamaan + Transformasi Sosial

Model ini menjadi dasar argumentasi bahwa Aswaja tidak tepat jika hanya direduksi menjadi identitas kelompok atau doktrin teologis. Aswaja merupakan konstruksi pemikiran yang memiliki kemampuan untuk melahirkan praksis sosial.

12. Sintesis Model Transformasi Pemikiran Aswaja Menjadi Gerakan

Berdasarkan hasil analisis, proses transformasi Aswaja dari pemikiran menuju gerakan dapat disintesiskan dalam enam tahap utama.

Pertama, tahap pemikiran. Aswaja membangun kerangka pemahaman keagamaan melalui teologi, fikih, tasawuf, dan akhlak.

Kedua, tahap nilai. Pemikiran tersebut menghasilkan nilai *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, *i'tidal*, *ta'awun*, dan *tawadhu'*.

Ketiga, tahap tradisi. Nilai tersebut ditransmisikan melalui kitab kuning, pengajian, pendidikan pesantren, keteladanan kiai, dan praktik kehidupan sehari-hari.

Keempat, tahap institusi. Tradisi kemudian dilembagakan melalui pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, lembaga dakwah, dan organisasi sosial-keagamaan.

Kelima, tahap gerakan. Institusi melahirkan berbagai bentuk gerakan dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan.

Keenam, tahap transformasi sosial. Gerakan tersebut menghasilkan perubahan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penguatan solidaritas, moderasi keagamaan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, model akhir dapat dirumuskan:

PEMIKIRAN → NILAI → TRADISI → INSTITUSI → GERAKAN → TRANSFORMASI SOSIAL

Model tersebut menjadi kontribusi konseptual penting artikel ini. Aswaja dipahami bukan sebagai konsep yang statis, tetapi sebagai sistem pemikiran yang memiliki mekanisme transformasi dari ranah ide ke ranah praksis.

Dalam perspektif ini, pesantren menjadi ruang reproduksi pemikiran dan nilai; madrasah menjadi ruang pelembagaan pendidikan; pendidikan menjadi sarana transformasi kesadaran; dakwah menjadi media penyebaran nilai; organisasi sosial menjadi instrumen pengorganisasian; dan pemberdayaan masyarakat menjadi praksis transformasi sosial.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan utama penelitian bagaimana pemikiran Aswaja dapat berubah menjadi gerakan sosial? adalah bahwa perubahan tersebut berlangsung melalui proses internalisasi, transmisi, pelembagaan, pengorganisasian, dan praksis sosial.

Aswaja menjadi gerakan bukan karena meninggalkan dimensi pemikirannya, melainkan justru karena berhasil menerjemahkan pemikiran tersebut ke dalam nilai dan tindakan. Pemikiran memberikan arah, nilai memberikan orientasi moral, tradisi memberikan kesinambungan, institusi memberikan struktur, gerakan memberikan daya kolektif, dan transformasi sosial menjadi tujuan akhirnya.

Oleh karena itu, hubungan antara Aswaja sebagai pemikiran dan Aswaja sebagai gerakan dapat dirumuskan secara sintetis:

ASWAJA = MANHAJ AL-FIKR + HARAKAH AL-IJTIMA'YYAH

Manhaj al-Fikr menghasilkan cara berpikir moderat, seimbang, toleran, dan adil.

Harakah al-Ijtima'iyah menghasilkan kerja sama, pemberdayaan, solidaritas, dan transformasi.

Keduanya bertemu dalam satu orientasi:

MODERASI KEAGAMAAN UNTUK TRANSFORMASI SOSIAL

Dalam konteks Indonesia, model tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan Aswaja sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga hubungan dinamis antara tradisi dan perubahan. Aswaja tidak cukup hanya diwariskan sebagai doktrin, tetapi harus terus dihidupkan melalui pendidikan, dakwah, organisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Aswaja dapat tetap menjadi kekuatan intelektual dan sosial yang relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk ekstremisme, intoleransi, polarisasi, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan perubahan teknologi digital.

Pada akhirnya, transformasi pemikiran Aswaja menjadi gerakan menunjukkan bahwa tradisi keagamaan memiliki kemampuan untuk menjadi kekuatan perubahan sosial apabila nilai-nilainya diinternalisasikan, dilembagakan, dan diaktualisasikan secara kontekstual. Dalam kerangka tersebut, Aswaja bukan hanya warisan intelektual masa lalu, tetapi juga paradigma yang dapat membentuk masa depan masyarakat Madura yang moderat, inklusif, berkeadilan, dan berkemaslahatan

Pesantren sebagai Basis Gerakan Aswaja

Pesantren merupakan salah satu institusi terpenting dalam proses transformasi pemikiran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) menjadi gerakan sosial-keagamaan di Madura. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan, reproduksi tradisi intelektual, pembentukan karakter, dan pengorganisasian masyarakat. Dalam konteks tersebut, pesantren memiliki posisi strategis sebagai institusi yang menghubungkan antara Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* dengan Aswaja sebagai *harakah al-ijtima'iyah*.

Secara historis, pesantren telah menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara khususnya di Madura. Melalui jaringan ulama, kiai, santri, masjid, madrasah, dan masyarakat, pesantren membentuk ekosistem keilmuan yang memungkinkan ajaran Islam diwariskan sekaligus dikembangkan sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Tradisi tersebut menjadikan pesantren sebagai salah satu institusi yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kesinambungan tradisi Islam Sunni sekaligus merespons perubahan sosial.

Dalam konteks Aswaja, pesantren memiliki tiga fungsi utama:

Pusat produksi pengetahuan; Pusat transmisi tradisi; Pusat gerakan sosial.

Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu ekosistem yang memungkinkan pemikiran Aswaja berkembang menjadi praksis sosial.

Model konseptualnya dapat dirumuskan:

PESANTREN

Pusat Produksi Pengetahuan

↓

Kitab Kuning – Halaqah – Sorogan – Bandongan – Musyawarah

Pusat Transmisi Tradisi

↓

Sanad – Talaqqi – Kiai-Santri

Pusat Gerakan Sosial

↓

Dakwah – Pendidikan – Ekonomi – Kesehatan – Pemberdayaan

↓

$$\text{PESANTREN} = \text{PUSAT PEMIKIRAN} + \text{PUSAT PENDIDIKAN} + \text{PUSAT GERAKAN}$$

Model ini memperlihatkan bahwa pesantren memiliki fungsi yang bersifat integratif. Pengetahuan tidak hanya diproduksi untuk kepentingan akademik, tetapi juga ditransmisikan menjadi tradisi dan diaktualisasikan melalui gerakan sosial.

1. Pesantren sebagai Pusat Produksi Pengetahuan Aswaja

Fungsi pertama pesantren adalah sebagai pusat produksi dan reproduksi pengetahuan. Produksi pengetahuan dalam konteks pesantren memiliki karakter yang khas karena berlangsung dalam hubungan antara teks, guru, murid, tradisi, dan konteks sosial.

Kitab kuning menjadi salah satu sumber utama dalam proses tersebut. Melalui kitab kuning, santri mempelajari berbagai disiplin ilmu Islam, seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, nahwu, sharaf, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Kitab kuning tidak hanya berfungsi sebagai bahan bacaan, tetapi juga menjadi medium untuk menghubungkan santri dengan tradisi intelektual Islam yang panjang.⁴³

⁴³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).

Dalam proses pembelajaran, pengetahuan tidak diterima secara pasif. Santri berinteraksi dengan teks melalui berbagai metode pembelajaran, seperti *sorogan*, *bandongan*, *halaqah*, dan *musyawarah*. Setiap metode memiliki fungsi epistemologis yang berbeda.

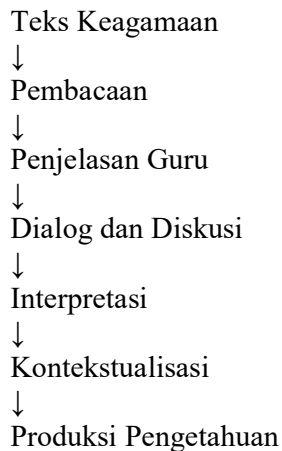
Sorogan menekankan interaksi individual antara santri dan kiai atau ustaz. Dalam metode ini, santri membaca dan menjelaskan teks di hadapan guru sehingga guru dapat mengoreksi bacaan, pemahaman, dan interpretasinya.

Bandongan merupakan metode pembelajaran kolektif ketika kiai atau ustaz membaca dan menjelaskan kitab, sementara santri menyimak dan memberikan makna atau catatan pada teks.

Halaqah membangun ruang pembelajaran berbasis komunitas yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan santri.

Sementara itu, musyawarah memberikan ruang bagi santri untuk mendiskusikan persoalan, menguji argumentasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam tradisi pesantren, forum *bahtsul masa'il* menjadi salah satu bentuk penting dari proses tersebut karena santri dan ulama berusaha menjawab persoalan aktual berdasarkan sumber-sumber keislaman dan metodologi fikih.⁴⁴

Dengan demikian, proses produksi pengetahuan di pesantren dapat digambarkan:



Proses ini menunjukkan bahwa pesantren bukan sekadar tempat reproduksi pengetahuan lama. Pesantren juga memiliki mekanisme untuk mengembangkan pengetahuan melalui proses interpretasi dan kontekstualisasi.

⁴⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926–1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

Dalam konteks Aswaja, produksi pengetahuan tersebut berlangsung dalam kerangka *manhaj* yang menghargai tradisi ulama sekaligus membuka ruang bagi ijtihad dan pemecahan persoalan baru. Oleh karena itu, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pemikiran Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

2. Kitab Kuning sebagai Basis Intelektual Gerakan Aswaja

Kitab kuning memiliki posisi penting dalam pembentukan tradisi intelektual pesantren. Melalui kitab kuning, santri memperoleh akses terhadap khazanah keilmuan Islam klasik yang menjadi bagian dari fondasi pemikiran Aswaja.

Dalam bidang akidah, pesantren banyak memperkenalkan tradisi teologi Sunni melalui karya-karya ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam bidang fikih, pesantren mengajarkan tradisi empat mazhab, khususnya mazhab Syafi'i yang memiliki pengaruh kuat di Madura. Dalam bidang tasawuf, pesantren mengembangkan tradisi tasawuf Sunni yang mengintegrasikan syariat, spiritualitas, dan akhlak.

Dengan demikian:

Kitab Akidah

→ Fondasi Teologis

Kitab Fikih

→ Fondasi Hukum

Kitab Tasawuf

→ Fondasi Spiritual

Kitab Akhlak

→ Fondasi Etis

↓

Konstruksi Keilmuan Aswaja

Konstruksi tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan cara pandang santri dalam memahami agama dan kehidupan sosial.

Kitab kuning juga berfungsi sebagai media transmisi *worldview* atau pandangan hidup. Santri tidak hanya mempelajari isi teks, tetapi juga menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti *tawadhu'*, *wara'*, *zuhud*, *ikhlas*, *sabar*, *tasamuh*, dan penghormatan terhadap ulama.

Dengan demikian, kitab kuning memiliki dua fungsi sekaligus:

Fungsi Epistemologis

→ Menghasilkan pengetahuan.

Fungsi Aksiologis

→ Membentuk nilai dan karakter.

Keduanya menjadikan kitab kuning sebagai salah satu basis penting bagi pembentukan gerakan Aswaja.

3. Halaqah, Sorogan, Bandongan, dan Musyawarah sebagai Ekosistem Keilmuan

Tradisi pembelajaran pesantren membentuk suatu ekosistem keilmuan yang khas. Metode *sorogan*, *bandongan*, *halaqah*, dan *musyawarah* bukan sekadar metode pedagogis, tetapi merupakan bagian dari mekanisme produksi dan transmisi pengetahuan.

Sorogan membangun relasi personal antara guru dan santri. Hubungan tersebut memungkinkan proses koreksi dan pembimbingan berlangsung secara intensif.

Bandongan menciptakan ruang transmisi pengetahuan secara kolektif. Kiai menjadi sumber otoritas keilmuan, sementara santri membangun pemahaman melalui proses menyimak dan mencatat.

Halaqah menciptakan ruang interaksi intelektual yang memungkinkan diskusi dan pertukaran gagasan.

Sementara *musyawarah* mendorong kemampuan analitis dan argumentatif. Santri tidak hanya menerima pendapat, tetapi dilatih untuk memahami dasar argumentasi dan membandingkan berbagai pandangan.

Dengan demikian, metode tersebut dapat dirumuskan:

Sorogan → Pendalaman Individual
Bandongan → Transmisi Kolektif
Halaqah → Interaksi Keilmuan
Musyawarah → Pengembangan Nalar Kritis

↓

Ekosistem Produksi Pengetahuan Pesantren

Ekosistem ini memperlihatkan bahwa pesantren memiliki mekanisme internal untuk menjaga kesinambungan tradisi sekaligus membuka ruang pengembangan pemikiran.

4. Pesantren sebagai Pusat Transmisi Tradisi Aswaja

Fungsi kedua pesantren adalah sebagai pusat transmisi tradisi. Tradisi Aswaja diwariskan bukan hanya melalui teks, tetapi melalui hubungan antara guru dan murid yang berlangsung secara langsung dan berkesinambungan.

Dalam tradisi pesantren, konsep sanad memiliki posisi penting. Sanad menunjukkan kesinambungan transmisi keilmuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tidak dipahami hanya sebagai informasi, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan sumber dan proses transmisinya.

Konsep sanad tersebut memiliki dimensi epistemologis sekaligus etis. Secara epistemologis, sanad memberikan legitimasi terhadap sumber pengetahuan. Secara etis, sanad menanamkan kesadaran bahwa ilmu memiliki tanggung jawab moral.

Model transmisi tersebut dapat dirumuskan:

Ulama
↓
Kiai
↓
Santri
↓
Masyarakat

Namun, proses tersebut tidak hanya berlangsung secara vertikal. Setelah memperoleh ilmu, santri diharapkan mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan tersebut dalam masyarakat.

Dengan demikian:

Sanad → Transmisi Ilmu
Talaqqi → Validasi Keilmuan
Kiai-Santri → Pembentukan Adab
Pengabdian → Aktualisasi Ilmu

Keempat unsur tersebut membentuk mekanisme reproduksi tradisi Aswaja yang khas.

5. Talaqqi dan Relasi Kiai-Santri sebagai Pembentukan Habitus Aswaja

Talaqqi memiliki makna penting dalam tradisi pendidikan pesantren. Melalui talaqqi, proses pembelajaran berlangsung secara langsung antara guru dan murid. Pengetahuan tidak hanya disampaikan dalam bentuk informasi, tetapi juga melalui keteladanan, sikap, dan praktik kehidupan.

Dalam konteks ini, relasi kiai-santri menjadi ruang pembentukan *habitus*. Santri belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang dilakukan oleh kiai.

Kiai menjadi figur yang merepresentasikan nilai-nilai keilmuan dan akhlak. Sikap tawadhu', kesederhanaan, kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian sosial yang ditampilkan oleh kiai dapat menjadi bagian dari proses internalisasi nilai bagi santri.

Dengan demikian:

Talaqqi
↓
Relasi Kiai-Santri
↓
Keteladanan
↓
Internalisasi Nilai



Pembentukan Habitus

Dalam perspektif sosiologi Pierre Bourdieu, habitus merupakan disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan kemudian memengaruhi cara individu berpikir dan bertindak.⁴⁵ Dalam konteks pesantren, habitus Aswaja terbentuk melalui interaksi berulang antara santri dengan tradisi keilmuan, kiai, kitab kuning, ritual keagamaan, dan kehidupan kolektif pesantren.

Karena itu, pesantren tidak hanya memproduksi santri yang memiliki pengetahuan agama, tetapi juga membentuk subjek sosial yang memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Aswaja dalam kehidupan masyarakat.

6. Pesantren sebagai Pusat Gerakan Sosial Aswaja

Fungsi ketiga pesantren adalah sebagai pusat gerakan sosial. Fungsi ini menunjukkan bahwa pesantren tidak berhenti pada produksi dan transmisi pengetahuan, tetapi menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan sosial.

Dalam konteks ini, gerakan sosial pesantren dapat dilihat dalam beberapa bidang:

Dakwah; Pendidikan; Ekonomi; Kesehatan; Pemberdayaan masyarakat.

Kelima bidang tersebut menunjukkan bahwa gerakan Aswaja memiliki dimensi yang luas.

Dakwah menjadi sarana penyebaran nilai keagamaan. Pendidikan menjadi instrumen transformasi kesadaran. Ekonomi menjadi sarana pemberdayaan dan kemandirian. Kesehatan menjadi bentuk pelayanan sosial. Sementara pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dengan demikian:

Ilmu



Nilai



Pengabdian



Gerakan Sosial



Kemaslahatan

⁴⁵ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, trans. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

Model ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diproduksi di pesantren memiliki orientasi praksis.

7. Dakwah Pesantren sebagai Gerakan Aswaja

Dakwah merupakan salah satu bentuk paling awal dari gerakan sosial pesantren. Dakwah pesantren tidak hanya berlangsung melalui ceramah, tetapi juga melalui pendidikan, keteladanan, pelayanan sosial, dan pendampingan masyarakat.

Dalam paradigma Aswaja, dakwah berorientasi pada *hikmah*, kebijaksanaan, dan kemaslahatan. Prinsip *tawassuth* mendorong dakwah yang moderat, *tasamuh* mendorong penghormatan terhadap perbedaan, dan *i'tidal* mendorong keberpihakan pada keadilan.

Dakwah pesantren dapat dirumuskan:

Dakwah

Pendidikan + Keteladanan + Pelayanan + Pemberdayaan

Model tersebut memperlihatkan bahwa dakwah merupakan proses transformasi sosial yang berkelanjutan.

Di era digital, dakwah pesantren juga mengalami perluasan ruang. Pesantren dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan kajian keislaman, memperkuat literasi keagamaan, dan menghadirkan narasi Islam yang moderat. Namun, digitalisasi dakwah juga menuntut penguatan literasi informasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam disinformasi atau ekstremisme digital.

8. Pendidikan Pesantren sebagai Gerakan Sosial

Pendidikan merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang paling strategis. Melalui pendidikan, pesantren melakukan transformasi individu dan masyarakat secara simultan.

Pendidikan pesantren memiliki orientasi yang lebih luas daripada transfer pengetahuan. Ia mencakup pembentukan karakter, pembiasaan ibadah, pengembangan akhlak, dan penanaman tanggung jawab sosial.

Dalam konteks Aswaja, pendidikan pesantren dapat membentuk karakter:

Tawassuth → Moderat

Tawazun → Seimbang

Tasamuh → Toleran

I'tidal → Adil

Ta'awun → Solidaritas

Tawadhu' → Rendah Hati

Nilai tersebut kemudian menjadi modal sosial bagi santri untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan pesantren tidak hanya menghasilkan *educated person*, tetapi juga *social actor* yang mampu menjadi agen perubahan.

9. Pesantren dan Gerakan Ekonomi Masyarakat

Gerakan Aswaja juga dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi. Pesantren memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui koperasi, unit usaha, kewirausahaan santri, pertanian, peternakan, perdagangan, dan berbagai bentuk ekonomi produktif.

Gerakan ekonomi pesantren dapat dikembangkan berdasarkan prinsip:

Ta'awun → Kerja sama
I'tidal → Keadilan
Tawazun → Keseimbangan
Maslahah → Kemanfaatan

Dengan demikian, ekonomi pesantren tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan dan kemaslahatan masyarakat.

Pesantren dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi lokal dengan melibatkan santri, alumni, wali santri, dan masyarakat sekitar. Model tersebut memungkinkan pesantren membangun kemandirian sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini:

Pesantren
↓
Produksi Pengetahuan
↓
Kewirausahaan
↓
Pemberdayaan Ekonomi
↓
Kemandirian Masyarakat

Gerakan ekonomi tersebut menjadi salah satu bentuk aktualisasi prinsip *ta'awun* dan *i'tidal*.

10. Pesantren dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu bidang yang dapat menjadi bagian dari gerakan sosial pesantren. Pelayanan kesehatan berbasis pesantren menunjukkan bahwa keberagamaan memiliki dimensi kemanusiaan yang konkret.

Pesantren dapat berkontribusi melalui penyuluhan kesehatan, layanan kesehatan dasar, sanitasi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan edukasi pola hidup sehat.

Dalam perspektif Aswaja, pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai bentuk *ta'awun* dan *masalahah*. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan bagian dari tanggung jawab sosial.

Dengan demikian:

Nilai Keagamaan
↓
Kepedulian terhadap Kehidupan
↓
Pelayanan Kesehatan
↓
Peningkatan Kualitas Hidup

Pesantren dengan demikian dapat memperluas fungsi sosialnya dari pusat pendidikan menjadi pusat pelayanan masyarakat.

11. Pesantren sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk paling luas dari gerakan sosial pesantren. Pemberdayaan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sendiri.

Pesantren dapat berperan dalam pemberdayaan melalui: pelatihan keterampilan; pendidikan kewirausahaan; pengembangan ekonomi lokal; pendampingan UMKM; Nliterasi digital; Npengembangan pertanian; pelestarian lingkungan; pendidikan masyarakat; penguatan kapasitas pemuda.

Dalam konteks tersebut, pesantren menjadi mediator antara pengetahuan keagamaan dan kebutuhan masyarakat.

Model pemberdayaan dapat dirumuskan:

Pengetahuan
↓
Pendampingan
↓
Partisipasi
↓
Peningkatan
↓
Kemandirian
↓
Transformasi Sosial

Kapasitas

Model tersebut menunjukkan bahwa gerakan Aswaja memiliki orientasi emansipatoris. Masyarakat tidak diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya.

12. Pesantren sebagai Jembatan antara *Manhaj al-Fikr* dan *Harakah al-Ijtima'iyah*

Berdasarkan uraian di atas, pesantren memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* dan Aswaja sebagai *harakah al-ijtima'iyah*.

Sebagai *manhaj al-fikr*, Aswaja menyediakan kerangka pemikiran.

Sebagai pesantren, kerangka tersebut diproduksi, dipelajari, dan ditransmisikan.

Sebagai gerakan, nilai tersebut diterjemahkan menjadi tindakan sosial.

Hubungan tersebut dapat digambarkan:

ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR

↓

Akidah – Fikih – Tasawuf – Akhlak

↓

Tawassuth – Tawazun – Tasamuh – I'tidal

↓

PESANTREN

↓

Produksi Pengetahuan

+

Transmisi Tradisi

+

Pembentukan Karakter

↓

HARAKAH AL-IJTIMA'YYAH

↓

Dakwah – Pendidikan – Ekonomi – Kesehatan – Pemberdayaan

↓

TRANSFORMASI SOSIAL

Dengan demikian, pesantren dapat dipahami sebagai institusi yang mengubah ide menjadi nilai, nilai menjadi tradisi, tradisi menjadi institusi, dan institusi menjadi gerakan.

13. Pesantren sebagai Pusat Pemikiran, Pendidikan, dan Gerakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama yang saling terintegrasi.

Pertama, pesantren sebagai pusat pemikiran. Pesantren memproduksi dan mengembangkan pengetahuan melalui kajian kitab kuning, musyawarah, *bahtsul masa'il*, dan berbagai forum keilmuan.

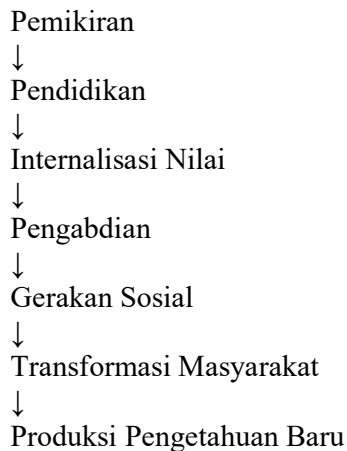
Kedua, pesantren sebagai pusat pendidikan. Pesantren mentransmisikan pengetahuan dan nilai melalui hubungan kiai-santri, sanad, talaqqi, dan pembiasaan kehidupan keagamaan.

Ketiga, pesantren sebagai pusat gerakan. Pesantren menerjemahkan ilmu dan nilai menjadi tindakan melalui dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Model tersebut dapat dirumuskan:

PESANTREN = PUSAT PEMIKIRAN + PUSAT PENDIDIKAN + PUSAT GERAKAN

Ketiga fungsi tersebut membentuk suatu siklus:



Siklus ini menunjukkan bahwa pesantren bukan institusi yang statis. Pesantren memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi sekaligus transformasi. Tradisi dipertahankan, tetapi pada saat yang sama terus diinterpretasikan dalam menghadapi persoalan baru.

14. Relevansi Pesantren sebagai Basis Gerakan Aswaja di Era Kontemporer

Di tengah perubahan sosial yang cepat, pesantren menghadapi tantangan baru. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan budaya, globalisasi, ekstremisme, intoleransi, dan krisis lingkungan menuntut pesantren untuk terus mengembangkan kapasitas intelektual dan sosialnya.

Dalam konteks tersebut, pesantren perlu memperkuat tiga fungsi utama:

Pertama, penguatan produksi pengetahuan. Pesantren perlu mengembangkan kajian yang mengintegrasikan khazanah klasik dengan ilmu pengetahuan modern.

Kedua, penguatan transmisi tradisi. Tradisi sanad, talaqqi, dan adab harus tetap dipertahankan, tetapi dapat dikembangkan melalui teknologi digital tanpa kehilangan otoritas keilmuan.

Ketiga, penguatan gerakan sosial. Pesantren perlu memperluas kontribusinya dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pesantren masa depan dapat dikembangkan sebagai Pesantren Digital-Humanis, yaitu pesantren yang mampu memanfaatkan teknologi modern tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, sanad keilmuan, dan tradisi Aswaja.

Model transformasinya dapat dirumuskan:

Tradisi Pesantren
+
Teknologi Digital

+
Ilmu Pengetahuan Modern
+
Nilai Aswaja
↓
Pesantren Adaptif dan Humanis
↓
Gerakan Sosial-Keagamaan
↓
Transformasi Masyarakat

Dengan demikian, digitalisasi tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap tradisi pesantren. Sebaliknya, teknologi dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperluas akses pengetahuan dan memperkuat gerakan sosial, selama tetap berada dalam kerangka etika dan otoritas keilmuan.

15. Sintesis: Pesantren sebagai Basis Gerakan Aswaja

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki posisi strategis dalam mengubah Aswaja dari sebuah sistem pemikiran menjadi gerakan sosial-keagamaan.

Proses tersebut berlangsung melalui mekanisme:

1. Produksi Pengetahuan

Kitab kuning, halaqah, sorogan, bandongan, dan musyawarah menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan Aswaja.

2. Transmisi Tradisi

Sanad, talaqqi, dan hubungan kiai-santri mentransmisikan ilmu, nilai, dan adab dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Internalisasi Nilai

Santri menginternalisasikan tawassuth, tawazun, tasamuh, i'tidal, ta'awun, dan tawadhu'.

4. Pembentukan Habitus

Nilai tersebut membentuk karakter dan pola pikir santri.

5. Pengabdian Sosial

Santri dan alumni mengaktualisasikan ilmu melalui dakwah dan pelayanan masyarakat.

6. Gerakan Sosial

Pesantren mengembangkan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan.

7. Transformasi Sosial

Gerakan tersebut menghasilkan masyarakat yang lebih moderat, toleran, berkeadilan, dan mandiri.

Dengan demikian, model konseptual akhir dapat dirumuskan:

ASWAJA

Manhaj al-Fikr

↓

PESANTREN

Produksi Pengetahuan

+

Transmisi Tradisi

+

Pembentukan Karakter

↓

HARAKAH AL-IJTIMA'IYYAH

Dakwah

+

Pendidikan

+

Ekonomi

+

Kesehatan

+

Pemberdayaan

↓

TRANSFORMASI SOSIAL

Temuan ini memperkuat tesis utama artikel bahwa pesantren merupakan basis penting bagi artikulasi Aswaja sebagai pemikiran sekaligus gerakan. Pesantren tidak hanya mempertahankan tradisi keilmuan Aswaja, tetapi juga memproduksi pengetahuan, membentuk habitus, membangun jaringan sosial, dan mengembangkan praksis pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, rumusan:

$\text{Pesantren} = \text{Pusat Pemikiran} + \text{Pusat Pendidikan} + \text{Pusat Gerakan}$

merupakan sintesis konseptual yang menjelaskan posisi strategis pesantren dalam perkembangan Aswaja di Indonesia. Sebagai pusat pemikiran, pesantren menjaga kesinambungan intelektual. Sebagai pusat pendidikan, pesantren mentransmisikan ilmu dan nilai. Sebagai pusat gerakan, pesantren menerjemahkan nilai tersebut ke dalam tindakan sosial.

Dalam kerangka yang lebih luas, pesantren menjadi ruang transformasi dari epistemologi menuju aksiologi, dari pengetahuan menuju nilai, dan dari nilai menuju gerakan. Dengan demikian, hubungan antara Aswaja dan pesantren dapat dirumuskan:

Aswaja sebagai Pemikiran

↓

Pesantren sebagai Ruang Produksi dan Transmisi

↓

Aswaja sebagai Nilai

↓
Pesantren sebagai Ruang Internalisasi
↓
Aswaja sebagai Gerakan
↓
Pesantren sebagai Basis Aksi Sosial
↓
Transformasi Sosial Indonesia

Pada titik inilah pesantren memiliki relevansi strategis dalam menjawab tantangan Madura kontemporer. Pesantren dapat menjadi kekuatan yang menghubungkan tradisi Islam klasik dengan modernitas, agama dengan ilmu pengetahuan, spiritualitas dengan kehidupan sosial, serta pendidikan dengan pemberdayaan. Melalui fungsi tersebut, pesantren tidak hanya menjadi penjaga tradisi Aswaja, tetapi juga menjadi aktor transformasi sosial yang mampu menghadirkan Islam yang moderat, toleran, adil, dan berkemaslahatan.

Aswaja dan Gerakan Nahdlatul Ulama

Pembahasan mengenai Aswaja sebagai pemikiran dan gerakan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi sosial-keagamaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, NU dapat dipahami sebagai salah satu institusi yang mengartikulasikan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) ke dalam kehidupan sosial, pendidikan, dakwah, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara Aswaja dan NU tidak semata-mata bersifat identitas organisasi, tetapi juga merupakan hubungan antara manhaj al-fikr dan gerakan sosial-keagamaan.

Aswaja memberikan landasan pemikiran dan nilai, sedangkan NU menyediakan ruang kelembagaan untuk mengaktualisasikan nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren menjadi salah satu basis sosial dan kultural yang menghubungkan antara pemikiran Aswaja, organisasi NU, dan masyarakat.

Hubungan tersebut dapat dirumuskan:

ASWAJA → NU → PESANTREN → MASYARAKAT

Aswaja
↓
Landasan Teologis, Fikih, Tasawuf, dan Akhlak
↓
Nahdlatul Ulama
↓
Pelebagaan Nilai dan Gerakan Sosial-Keagamaan
↓
Pesantren
↓
Transmisi Ilmu, Tradisi, dan Pembentukan Kader
↓
Masyarakat
↓
Pendidikan – Dakwah – Sosial – Kesehatan – Ekonomi – Kebangsaan – Pemberdayaan

Model tersebut menunjukkan bahwa Aswaja memiliki dimensi pemikiran yang kemudian memperoleh bentuk kelembagaan melalui NU dan basis kultural melalui pesantren. Dari kedua ruang tersebut, nilai-nilai Aswaja diterjemahkan menjadi gerakan sosial yang menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat.

1. Nahdlatul Ulama sebagai Institusi Artikulasi Aswaja

Nahdlatul Ulama didirikan pada 1926 oleh para ulama dengan latar belakang tradisi keilmuan pesantren. Kehadiran NU tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan Islam di Indonesia dan upaya mempertahankan kesinambungan tradisi keagamaan Ahlul sunnah wal Jama'ah. Dalam perjalanan sejarahnya, NU berkembang menjadi organisasi yang memiliki perhatian luas terhadap persoalan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebangsaan, dan kemasyarakatan.⁴⁶

Dalam konteks tersebut, NU dapat dipahami sebagai institusi yang melakukan artikulasi Aswaja dalam kehidupan publik. Jika Aswaja merupakan kerangka pemikiran dan nilai, maka NU menjadi salah satu wadah yang menerjemahkan kerangka tersebut menjadi gerakan yang terorganisasi.

Artikulasi tersebut dapat digambarkan:

Aswaja sebagai *Manhaj al-Fikr*

↓

Nilai Tawassuth, Tawazun, Tasamuh, dan I'tidal

↓

Pelebagaan melalui NU

↓

Program dan Gerakan Sosial

↓

Transformasi Masyarakat

Dalam perspektif ini, NU bukan sekadar organisasi yang menggunakan identitas Aswaja, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat prinsip-prinsip Aswaja diinterpretasikan, dikembangkan, dan dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, hubungan antara Aswaja dan NU bersifat dinamis. Aswaja memberikan kerangka normatif dan metodologis, sementara NU mengembangkan bentuk praksis yang sesuai dengan konteks sosial Indonesia.

2. Aswaja sebagai Landasan Pemikiran Gerakan NU

Sebagai organisasi yang berakar pada tradisi pesantren, NU menjadikan Aswaja sebagai salah satu fondasi utama pemikiran keagamaannya. Tradisi Aswaja dalam NU tercermin dalam

⁴⁶ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

penerimaan terhadap teologi Asy'ariyah-Maturidiyah, fikih empat mazhab, serta tasawuf Sunni.⁴⁷

Kerangka tersebut membentuk karakter pemikiran NU yang cenderung moderat dan adaptif. Dalam bidang fikih, misalnya, penghormatan terhadap mazhab memberikan ruang bagi kesinambungan tradisi keilmuan. Namun, tradisi tersebut tidak selalu dipahami secara kaku karena terdapat mekanisme *bahtsul masa'il* untuk membahas persoalan baru.

Dalam bidang sosial, prinsip *tawassuth* dan *tawazun* mendorong NU untuk mengambil posisi moderat. *Tasamuh* menjadi dasar dalam membangun hubungan dengan kelompok yang berbeda, sedangkan *i'tidal* memberikan orientasi terhadap keadilan.

Dengan demikian, prinsip Aswaja dapat diterjemahkan menjadi:

Tawassuth → Moderasi Gerakan
Tawazun → Keseimbangan
Tasamuh → Toleransi
I'tidal → Keadilan
Ta'awun → Solidaritas
Tawadhu' → Etika Kepemimpinan

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan gerakan sosial-keagamaan NU.

3. NU dan Pesantren: Relasi Genealogis dan Kultural

Hubungan antara NU dan pesantren merupakan salah satu karakteristik penting dalam perkembangan Islam Madura. Banyak ulama pendiri dan penggerak NU memiliki latar belakang pesantren. Oleh karena itu, pesantren menjadi salah satu basis kultural yang penting bagi perkembangan organisasi NU.⁴⁸

Namun, hubungan NU dan pesantren tidak dapat dipahami sebagai hubungan struktural yang sederhana. Tidak semua pesantren secara organisatoris berada di bawah NU, dan tidak semua kiai pesantren memiliki keterlibatan langsung dalam struktur organisasi NU. Meskipun demikian, terdapat hubungan historis, intelektual, dan kultural yang kuat antara tradisi pesantren dan pemikiran keagamaan NU.

Hubungan tersebut dapat digambarkan:

Tradisi Keilmuan Islam
↓

⁴⁷ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2006).

⁴⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).

Ulama dan Kiai
↓
Pesantren
↓
Transmisi Aswaja
↓
Nahdlatul Ulama
↓
Gerakan Sosial-Keagamaan
↓
Masyarakat

Pesantren berfungsi sebagai ruang reproduksi keilmuan dan kaderisasi, sementara NU menjadi salah satu wadah artikulasi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pesantren dan NU memiliki hubungan simbiosis dalam pengembangan gerakan Aswaja, meskipun keduanya tetap merupakan entitas yang berbeda.

4. Pendidikan sebagai Gerakan Aswaja NU

Pendidikan merupakan salah satu bidang utama gerakan NU. Melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal, nilai-nilai Aswaja ditransmisikan kepada generasi muda.

Gerakan pendidikan NU mencakup pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga pendidikan masyarakat. Pendidikan menjadi sarana strategis untuk menghubungkan tradisi keilmuan Islam dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam perspektif Aswaja, pendidikan memiliki tujuan yang lebih luas daripada transfer pengetahuan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, moderat, dan memiliki kepedulian sosial.

Model pendidikan Aswaja dapat dirumuskan:

Ilmu
+
Akhlak
+
Moderasi
+
Kepedulian Sosial

Pendidikan Transformatif

Pendidikan yang dikembangkan melalui jaringan NU juga memiliki fungsi sosial. Lembaga pendidikan dapat menjadi ruang mobilitas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu bentuk konkret dari perubahan Aswaja dari pemikiran menjadi gerakan.

.5. Dakwah sebagai Artikulasi Aswaja

Dakwah menjadi salah satu instrumen utama NU dalam menyebarkan nilai-nilai Aswaja. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah keagamaan, tetapi juga melalui pendidikan, pengajian, media, kegiatan sosial, dan keteladanan.

Dalam paradigma Aswaja, dakwah harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Prinsip *tawassuth* menghindarkan dakwah dari sikap ekstrem, *tasamuh* mendorong penghormatan terhadap perbedaan, dan *tawazun* memungkinkan keseimbangan antara prinsip agama dan realitas sosial.

Dakwah Aswaja dapat dirumuskan:

Dakwah
↓
Pemahaman Keagamaan
↓
Internalisasi Nilai
↓
Pembentukan Karakter
↓
Perubahan Sosial

Dalam konteks masyarakat Madura yang plural, dakwah berbasis Aswaja memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan sosial. Dakwah tidak hanya berorientasi pada penguatan identitas kelompok, tetapi juga diarahkan pada pembangunan kehidupan bersama.

6. Gerakan Sosial NU

Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama artikulasi Aswaja dalam kehidupan masyarakat. Prinsip *ta'awun* menjadi landasan etis bagi pengembangan gerakan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan.

Gerakan sosial NU berkembang dalam berbagai bentuk, seperti pelayanan sosial, bantuan kemanusiaan, pengembangan lembaga sosial, pendampingan masyarakat, dan berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan.

Gerakan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman tidak berhenti pada dimensi ritual. Nilai agama diterjemahkan menjadi tindakan sosial yang konkret.

Modelnya:

Aswaja
↓
Ta'awun
↓
Kepedulian Sosial
↓
Pengorganisasian
↓
Pelayanan Masyarakat

↓
Kemaslahatan

Dalam konteks ini, NU dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *harakah al-ijtima'iyyah* yang mengartikulasikan nilai keagamaan dalam ruang sosial.

7. Gerakan Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan

Bidang kesehatan menjadi salah satu ruang penting bagi aktualisasi nilai Aswaja. Pelayanan kesehatan dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari *ta'awun* dan kepedulian terhadap kehidupan manusia.

Melalui lembaga dan jaringan sosialnya, gerakan NU dapat berkontribusi dalam pengembangan pelayanan kesehatan, edukasi kesehatan masyarakat, penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, dan pelayanan kepada kelompok rentan.

Dalam perspektif Aswaja, pelayanan kesehatan merupakan bentuk praksis dari nilai kemaslahatan.

Nilai Keagamaan
↓
Ta'awun
↓
Pelayanan Kesehatan
↓
Perlindungan Kehidupan
↓
Kemaslahatan Masyarakat

Dengan demikian, gerakan kesehatan memperlihatkan bahwa Aswaja memiliki dimensi humanistik yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

8. Gerakan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Gerakan ekonomi merupakan bagian penting dari transformasi sosial. Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi akan lebih mampu membangun kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam konteks ini, prinsip *ta'awun* dan *i'tidal* dapat menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan pemberdayaan.

Gerakan ekonomi dapat diarahkan pada: pengembangan koperasi; kewirausahaan masyarakat; pemberdayaan UMKM; penguatan ekonomi pesantren; pelatihan keterampilan; pengembangan ekonomi lokal; pendampingan kelompok rentan.

Modelnya:

Ta'awun
↓

Kerja Sama Ekonomi

↓

Peningkatan Kapasitas

↓

Kemandirian

↓

Pemberdayaan

↓

Keadilan Sosial

Dalam perspektif Aswaja, ekonomi tidak hanya dinilai dari pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga dari aspek keadilan dan kemaslahatan.

4.8.9. NU dan Politik Kebangsaan

Salah satu dimensi penting gerakan NU adalah keterlibatannya dalam kehidupan kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, khususnya Madura, hubungan antara agama dan negara menjadi persoalan penting yang membutuhkan pendekatan moderat.

Prinsip Aswaja seperti *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal* dapat menjadi dasar bagi sikap kebangsaan yang menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan komitmen terhadap kehidupan bernegara.

Dalam perspektif ini, politik kebangsaan tidak harus dipahami sebagai politik praktis, tetapi sebagai komitmen terhadap keutuhan negara, demokrasi, keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan masyarakat.

Konsep *hubbul wathan* minal iman sering digunakan dalam wacana keislaman (di Madura) terutama, untuk menegaskan pentingnya kecintaan terhadap tanah air. Meskipun ungkapan tersebut bukan hadis Nabi yang dapat dijadikan sumber normatif secara langsung, ia telah berkembang sebagai ungkapan populer yang mencerminkan semangat kebangsaan dalam tradisi keislaman di Madura.

Dalam konteks gerakan NU, komitmen kebangsaan dapat dirumuskan:

Keislaman

+

Keindonesiaan

+

Kebangsaan

+

Kemanusiaan

Kemaslahatan Bersama

Kerangka ini menunjukkan bahwa Aswaja dapat menjadi basis bagi pengembangan Islam yang berakar pada tradisi sekaligus memiliki komitmen terhadap kehidupan kebangsaan.

10. Aswaja, NU, dan Moderasi Keagamaan

Salah satu kontribusi penting NU dalam konteks Indonesia adalah pengembangan moderasi keagamaan. Moderasi dalam perspektif Aswaja berakar pada prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*.

Prinsip tersebut memiliki implikasi terhadap kehidupan sosial:

Tawassuth

→ Menolak ekstremisme.

Tawazun

→ Menjaga keseimbangan.

Tasamuh

→ Menghormati perbedaan.

I'tidal

→ Menegakkan keadilan.

Dalam konteks masyarakat plural, prinsip tersebut menjadi penting untuk menjaga kehidupan bersama. Moderasi tidak berarti menghilangkan identitas keagamaan, tetapi membangun cara beragama yang mampu menghormati keragaman dan hidup berdampingan secara damai.

Dengan demikian, gerakan moderasi keagamaan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktualisasi Aswaja dalam ruang publik.

11. NU sebagai Gerakan Masyarakat Sipil

Dalam perspektif sosiologis, NU dapat dianalisis sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki kemampuan untuk mengorganisasi masyarakat secara mandiri.

NU memiliki jaringan organisasi yang luas dan beragam, mulai dari tingkat nasional hingga komunitas lokal. Jaringan tersebut memungkinkan nilai keagamaan diterjemahkan menjadi berbagai bentuk pelayanan sosial.

Dalam konteks ini, NU berfungsi sebagai:

Institusi Keagamaan

↓

Institusi Pendidikan

↓

Institusi Sosial

↓

Institusi Pemberdayaan

↓

Aktor Masyarakat Sipil

Posisi tersebut menunjukkan bahwa gerakan Aswaja tidak hanya berlangsung di ruang masjid atau pesantren, tetapi juga di ruang publik.

Melalui organisasi, Aswaja dapat berinteraksi dengan negara, masyarakat, dan berbagai kelompok sosial. Interaksi tersebut memungkinkan nilai-nilai keagamaan berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan publik.

12. Hubungan Aswaja, NU, Pesantren, dan Masyarakat

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hubungan antara Aswaja, NU, pesantren, dan masyarakat dapat dirumuskan sebagai suatu ekosistem sosial-keagamaan.

ASWAJA → NU → PESANTREN → MASYARAKAT

Namun, hubungan tersebut tidak bersifat linear semata. Terdapat proses timbal balik di antara keempat unsur tersebut.

Aswaja memberikan nilai dan kerangka pemikiran.

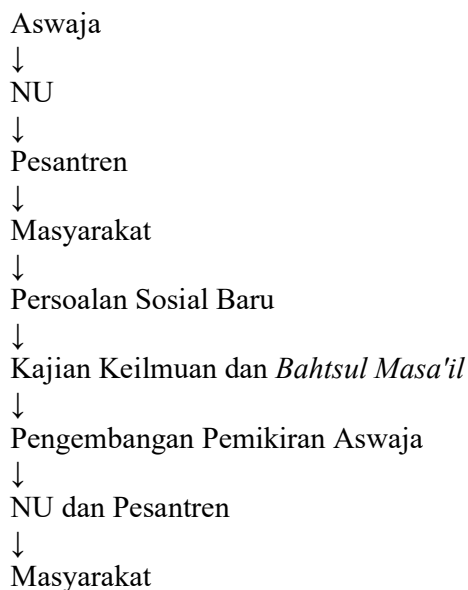
NU melakukan artikulasi dan pelembagaan nilai.

Pesantren menjadi basis transmisi pengetahuan dan kaderisasi.

Masyarakat menjadi ruang aktualisasi dan evaluasi praksis.

Selanjutnya, pengalaman masyarakat dapat menghasilkan persoalan baru yang kemudian dibawa kembali ke ruang keilmuan untuk dikaji.

Model siklusnya:



Model ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemikiran dan gerakan bersifat dinamis. Gerakan sosial tidak hanya menjadi hasil dari pemikiran, tetapi juga dapat menjadi sumber munculnya persoalan baru yang mendorong perkembangan pemikiran.

13. NU sebagai Jembatan antara Tradisi dan Transformasi

Salah satu tantangan utama organisasi keagamaan adalah bagaimana menjaga tradisi tanpa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Dalam konteks tersebut, NU memiliki posisi strategis karena berakar pada tradisi pesantren tetapi berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat modern.

Aswaja memberikan prinsip dasar untuk mengelola hubungan antara tradisi dan perubahan. *Tawazun* memungkinkan keseimbangan antara warisan masa lalu dan kebutuhan masa kini. *Tawassuth* mencegah sikap ekstrem dalam menghadapi perubahan. *Tasamuh* membuka ruang dialog. Sementara *i'tidal* memastikan perubahan tetap berorientasi pada keadilan.

Modelnya:

Tradisi
↑↓
Dialog
↑↓
Kontekstualisasi
↑↓
Inovasi
↑↓
Transformasi

Dalam konteks ini, NU dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi Islam klasik dan modernitas (Madura)

14. NU dan Transformasi Sosial (Madura)

Gerakan NU dapat dilihat sebagai salah satu bentuk transformasi sosial berbasis nilai keagamaan. Transformasi tersebut berlangsung melalui berbagai sektor.

Pendidikan → Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dakwah → Transformasi kesadaran keagamaan.

Sosial → Penguatan solidaritas masyarakat.

Kesehatan → Peningkatan kualitas hidup.

Ekonomi → Pemberdayaan dan kemandirian.

Politik Kebangsaan → Penguatan kehidupan demokratis dan kebangsaan.

Pemberdayaan Masyarakat → Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.

Jika seluruh bidang tersebut berjalan secara sinergis, maka gerakan Aswaja dapat menghasilkan perubahan sosial yang lebih luas.

Model transformasinya:

Aswaja sebagai Pemikiran
↓
NU sebagai Institusi
↓
Pesantren sebagai Basis Kultural
↓
Pendidikan dan Dakwah
↓
Gerakan Sosial dan Pemberdayaan
↓
Transformasi Masyarakat

Dengan demikian, NU dapat dipahami sebagai salah satu aktor penting dalam proses transformasi sosial berbasis nilai-nilai Aswaja.

4.8.15. Relevansi Gerakan Aswaja-NU di Era Kontemporer

Tantangan masyarakat Madura saat ini semakin kompleks. Polarisasi politik, ekstremisme, intoleransi, kesenjangan ekonomi, krisis lingkungan, disinformasi digital, dan perkembangan kecerdasan buatan menuntut adanya respons sosial-keagamaan yang adaptif.

Dalam konteks tersebut, prinsip Aswaja yang diartikulasikan melalui gerakan NU memiliki relevansi strategis.

Tawassuth dapat menjadi basis untuk menghadapi polarisasi dan ekstremisme.

Tawazun dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan teknologi dan modernisasi.

Tasamuh dapat menjadi dasar pengelolaan keragaman.

I'tidal dapat menjadi orientasi dalam menghadapi ketidakadilan.

Ta'awun dapat memperkuat solidaritas masyarakat.

Tawadhu' dapat menjadi etika dalam menghadapi ledakan informasi dan otoritas pengetahuan digital.

Dengan demikian, tantangan kontemporer menuntut agar gerakan Aswaja-NU tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga melakukan inovasi kelembagaan dan sosial.

Dalam konteks digital, misalnya, NU dan pesantren dapat mengembangkan:

Literasi Digital Keagamaan
↓
Dakwah Moderat
↓
Verifikasi Informasi
↓
Pencegahan Hoaks dan Ekstremisme

↓

Masyarakat Digital yang Beretika

Demikian pula dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan, nilai Aswaja dapat dikembangkan menjadi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4.8.16. Sintesis: Aswaja sebagai Pemikiran dan Gerakan melalui NU

Berdasarkan hasil pembahasan, hubungan antara Aswaja dan NU menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan dapat berkembang menjadi gerakan sosial melalui proses pelebagaan dan praksis.

Model sintesisnya dapat dirumuskan:

ASWAJA

Manhaj al-Fikr

↓

Akidah – Fikih – Tasawuf – Akhlak

↓

Tawassuth – Tawazun – Tasamuh – I'tidal

↓

NAHDLATUL ULAMA

Institusi Artikulasi Aswaja

↓

PESANTREN

Basis Keilmuan dan Kaderisasi

↓

MASYARAKAT

Ruang Aktualisasi dan Transformasi Gerakan tersebut diwujudkan melalui:

Pendidikan

+

Dakwah

+

Sosial

+

Kesehatan

+

Ekonomi

+

Politik Kebangsaan

+

Pemberdayaan Masyarakat

↓

MODERASI KEAGAMAAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL

Dengan demikian, Aswaja sebagai pemikiran tidak berhenti pada wilayah doktrinal. Melalui NU dan jaringan pesantren, nilai-nilai Aswaja mengalami proses institusionalisasi dan transformasi menjadi gerakan sosial-keagamaan.

Dalam perspektif artikel ini, NU dapat diposisikan sebagai salah satu aktor historis dan institusional dalam artikulasi Aswaja di Madura, sementara pesantren berfungsi sebagai basis kultural dan epistemologis. Masyarakat menjadi ruang tempat nilai-nilai tersebut diuji dan diaktualisasikan.

Hubungan tersebut dapat dirumuskan:

ASWAJA = MANHAJ AL-FIKR

NU = INSTITUSI ARTIKULASI

PESANTREN = BASIS KULTURAL DAN KEILMUAN

GERAKAN SOSIAL = HAKAH AL-IJTIMAI'YYAH

MASYARAKAT = RUANG TRANSFORMASI

Dengan demikian:

ASWAJA → NU → PESANTREN → MASYARAKAT → TRANSFORMASI SOSIAL

Model ini memperkuat tesis utama penelitian bahwa Aswaja dapat dipahami sebagai pemikiran sekaligus gerakan. Sebagai pemikiran, Aswaja menyediakan prinsip dan metodologi keberagamaan. Sebagai gerakan, Aswaja memperoleh bentuk kelembagaan melalui NU dan basis sosial melalui pesantren serta jaringan masyarakat.

Pada akhirnya, kekuatan Aswaja dalam konteks Indonesia terletak pada kemampuannya menghubungkan tradisi dengan modernitas, agama dengan kemanusiaan, keilmuan dengan praksis, serta identitas keislaman dengan komitmen kebangsaan. Melalui pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, kesehatan, ekonomi, politik kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat, Aswaja dapat terus dikembangkan sebagai kekuatan transformasi sosial yang moderat, inklusif, berkeadilan, dan berkemaslahatan.

Dengan demikian, temuan konseptual subbab ini dapat dirumuskan dalam model:

PEMIKIRAN ASWAJA

↓

NILAI ASWAJA

↓

NU SEBAGAI INSTITUSI



PESANTREN SEBAGAI BASIS KEILMUAN DAN KULTURAL



GERAKAN SOSIAL-KEAGAMAAN



Pendidikan – Dakwah – Sosial – Kesehatan – Ekonomi – Kebangsaan – Pemberdayaan



MODERASI KEAGAMAAN



TRANSFORMASI SOSIAL MADURA

Model tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Aswaja bukan sekadar warisan pemikiran masa lalu, tetapi merupakan paradigma yang dapat terus diaktualisasikan melalui institusi, tradisi, dan gerakan sosial untuk menjawab tantangan masyarakat Madura masa kini dan masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai Aswaja sebagai Pemikiran dan Gerakan: Genealogi Intelektual, Moderasi Keagamaan, dan Transformasi Sosial di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) tidak cukup dipahami hanya sebagai doktrin teologis, identitas kelompok keagamaan, atau tradisi keislaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aswaja merupakan konstruksi intelektual sekaligus praksis sosial yang memiliki kesinambungan antara dimensi pemikiran dan gerakan. Dalam kerangka tersebut, Aswaja dapat dipahami melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* dan Aswaja sebagai *harakah al-ijtima'iyah*. Sebagai *manhaj al-fikr*, Aswaja menyediakan kerangka berpikir keagamaan yang moderat, seimbang, toleran, dan berkeadilan; sedangkan sebagai *harakah al-ijtima'iyah*, Aswaja menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kolektif dan transformasi sosial.

Secara genealogis, pemikiran Aswaja berkembang melalui proses panjang dalam sejarah intelektual Islam. Akar pemikirannya dapat ditelusuri dari tradisi Nabi Muhammad saw., para sahabat, tabi'in, ulama salaf, hingga terbentuknya sistem pemikiran teologis, fikih, dan tasawuf yang kemudian menjadi bagian penting dari tradisi Sunni. Dalam perkembangan intelektualnya, teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah memberikan fondasi dalam bidang akidah, empat mazhab fikih memberikan kerangka metodologis dalam memahami hukum Islam, sedangkan tasawuf Sunni memberikan dimensi spiritual dan akhlak. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk sintesis keilmuan yang menjadi karakter penting pemikiran Aswaja.

Dengan demikian, pemikiran Aswaja dapat dirumuskan sebagai:

Aswaja = Akidah + Fikih + Tasawuf + Akhlak

Akidah memberikan fondasi keimanan, fikih memberikan kerangka normatif dan metodologis, tasawuf memberikan kedalaman spiritual, sedangkan akhlak menerjemahkan seluruh nilai tersebut ke dalam perilaku manusia. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa Aswaja memiliki karakter epistemologis yang tidak memisahkan antara dimensi normatif dan praksis, antara ilmu dan amal, serta antara kesalehan individual dan tanggung jawab sosial.

Dalam dimensi teologis, Aswaja mengembangkan pola hubungan yang seimbang antara wahyu dan akal. Akal digunakan sebagai instrumen untuk memahami wahyu, sedangkan wahyu menjadi sumber orientasi dan batas bagi penggunaan akal. Dalam bidang fikih, Aswaja menghargai tradisi mazhab sekaligus membuka ruang bagi *ijtihad*, *qiyas*, *ijma'*, dan pertimbangan kemaslahatan. Sementara dalam tasawuf, Aswaja menghubungkan syariat, spiritualitas, dan akhlak. Dengan demikian, karakter utama pemikiran Aswaja terletak pada kemampuannya membangun keseimbangan antara teks dan konteks, antara tradisi dan pembaruan, serta antara idealitas agama dan realitas sosial.

Prinsip-prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* menjadi fondasi penting bagi konstruksi pemikiran tersebut. *Tawassuth* menegaskan pentingnya jalan tengah, *tawazun* menekankan keseimbangan, *tasamuh* mengembangkan toleransi, dan *i'tidal* menegaskan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadikan Aswaja memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi masyarakat yang plural dan kompleks. Dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut dapat dikembangkan menjadi paradigma moderasi keagamaan yang berorientasi pada perdamaian, penghormatan terhadap perbedaan, dan kemaslahatan sosial.

Pada dimensi praksis, Aswaja berkembang menjadi gerakan melalui berbagai institusi dan ruang sosial. Pesantren menjadi salah satu basis utama dalam transmisi dan reproduksi tradisi Aswaja. Melalui kitab kuning, *talaqqi*, *sorogan*, *bandongan*, musyawarah, dan hubungan kiai-santri, pesantren tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, adab, dan orientasi sosial santri. Pesantren dengan demikian berfungsi sebagai pusat produksi pengetahuan, pusat pendidikan, pusat transmisi tradisi, dan pusat gerakan sosial.

Aswaja juga diwujudkan melalui pendidikan, dakwah, organisasi sosial-keagamaan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi, pelestarian budaya, serta perjuangan kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, artikulasi Aswaja melalui organisasi keagamaan dan jaringan pesantren menunjukkan bahwa Aswaja tidak hanya bergerak dalam wilayah ritual dan doktrin, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial dan kebangsaan. Dengan demikian, hubungan antara Aswaja, pesantren, organisasi sosial-keagamaan, dan masyarakat membentuk jaringan yang memungkinkan nilai-nilai Aswaja diterjemahkan menjadi gerakan nyata.

Temuan penting lainnya adalah bahwa Aswaja memiliki kemampuan melakukan dialektika antara teks, tradisi, dan konteks. Dalam konteks Islam Nusantara, kemampuan tersebut terlihat dalam proses interaksi antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal. Tradisi seperti tahlilan, yasinan, maulidan, istighasah, ziarah kubur, dan manaqiban menjadi contoh bagaimana ekspresi keberagaman dapat berkembang dalam ruang budaya masyarakat. Dalam kerangka Aswaja, tradisi tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan membawa kemaslahatan. Kemampuan melakukan dialog antara teks dan konteks inilah yang menjadi salah satu kekuatan Islam kultural di Indonesia.

Aswaja juga memiliki kontribusi penting dalam membangun moderasi keagamaan. Dalam menghadapi ekstremisme, radikalisme, intoleransi, takfirisme, dan kekerasan atas nama agama, nilai-nilai Aswaja dapat menjadi basis bagi pengembangan keberagaman yang moderat. Moderasi Aswaja tidak berarti menghilangkan prinsip atau identitas keagamaan, tetapi menempatkan keyakinan dalam kerangka keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan bersama. Dengan demikian, paradigma Aswaja dapat dirumuskan:

Aswaja → Moderasi → Toleransi → Perdamaian → Kemaslahatan

Dalam dimensi kebangsaan, Aswaja menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme tidak harus ditempatkan sebagai dua entitas yang bertentangan. Sejarah pesantren dan ulama di Indonesia menunjukkan adanya kontribusi penting dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan bangsa, dan penguatan kehidupan kebangsaan. Komitmen terhadap Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kehidupan masyarakat yang plural dapat dipahami sebagai bagian dari praksis kebangsaan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, Aswaja memiliki dimensi kebangsaan yang kuat. Aswaja tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama dan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa. Prinsip *hubbul wathan* dapat dikembangkan sebagai kesadaran kebangsaan yang menempatkan cinta tanah air, persatuan, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari etika kehidupan bersama.

Namun demikian, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru bagi keberlanjutan Aswaja. Digitalisasi, media sosial, fragmentasi otoritas keagamaan, munculnya *influencer* agama, *algorithmic authority*, dan perkembangan *artificial intelligence* telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memproduksi pengetahuan keagamaan. Perubahan tersebut melahirkan tantangan baru terhadap otoritas ulama, sanad, kitab kuning, dan tradisi *talaqqi*. Dalam konteks ini, Aswaja tidak dapat merespons perubahan dengan sekadar mempertahankan pola lama secara eksklusif. Aswaja perlu melakukan transformasi dari Aswaja Tradisional menuju Aswaja Transformatif. Transformasi tersebut bukan berarti meninggalkan tradisi, tetapi mengaktualisasikan nilai-nilai tradisi dalam konteks kehidupan baru.

Aswaja Tradisional → Aswaja Transformatif

Transformasi tersebut harus tetap mempertahankan fondasi utama Aswaja, yaitu:

sanad keilmuan sebagai mekanisme kesinambungan dan validasi ilmu, adab sebagai etika dalam memperoleh dan mengamalkan ilmu, otoritas keilmuan sebagai mekanisme pertanggungjawaban pengetahuan; tradisi kitab kuning sebagai warisan intelektual Islam; *talaqqi* dan hubungan guru-murid sebagai proses pembentukan ilmu dan karakter.

Pada saat yang sama, Aswaja perlu mengembangkan kemampuan baru yang sesuai dengan tantangan masa depan, yaitu: literasi digital; literasi media dan informasi; pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis; pendidikan modern dan integratif; penguatan ekonomi umat; gerakan ekologis; pemberdayaan masyarakat; pengembangan jaringan sosial dan kewirausahaan.

Dengan demikian, transformasi Aswaja bukanlah transformasi yang memutus mata rantai tradisi, tetapi transformasi yang mempertemukan kontinuitas dan perubahan. Dari keseluruhan temuan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa Aswaja merupakan pemikiran sekaligus gerakan. Aswaja sebagai pemikiran memberikan kerangka epistemologis dan metodologis dalam memahami agama dan realitas, sedangkan Aswaja sebagai gerakan menerjemahkan pemikiran tersebut ke dalam praksis sosial. Keduanya membentuk hubungan dialektis yang saling memperkuat.

Aswaja sebagai *Manhaj al-Fikr*

↓

Melahirkan Nilai

↓

Ditransmisikan melalui Tradisi

↓

Diinstitusionalisasikan melalui Pesantren dan Organisasi

↓

Diwujudkan dalam Gerakan



Menghasilkan Transformasi Sosial

Dengan demikian, artikel ini dapat ditegaskan kembali:

ASWAJA = MANHAJ AL-FIKR + HAKAKAH AL-IJTIMAIYYAH

Sebagai *manhaj al-fikr*, Aswaja berakar pada sintesis teologi Asy'ariyah-Maturidiyah, fikih empat mazhab, dan tasawuf Sunni yang kemudian membentuk karakter pemikiran moderat, seimbang, toleran, dan berkeadilan. Sebagai *harakah al-ijtima'iyah*, Aswaja diwujudkan melalui pesantren, pendidikan, dakwah, organisasi sosial-keagamaan, pemberdayaan masyarakat, perjuangan kebangsaan, dan berbagai bentuk pelayanan sosial.

Oleh karena itu, masa depan Aswaja tidak cukup hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga oleh kemampuan untuk melakukan inovasi dan transformasi. Aswaja harus mampu menjadi tradisi yang hidup (*living tradition*), yaitu tradisi yang tetap memiliki akar historis dan epistemologis, tetapi mampu memberikan jawaban terhadap persoalan baru.

Dalam perspektif ini, Aswaja Transformatif dapat dirumuskan sebagai:

ASWAJA TRANSFORMATIF

= AKIDAH + SANAD + MODERASI + TEKNOLOGI + JARINGAN + AKSI SOSIAL

Kesimpulan akhir artikel ini adalah bahwa Aswaja memiliki potensi besar untuk menjadi paradigma keagamaan dan gerakan sosial yang relevan bagi masa depan Indonesia. Kekuatan tersebut terletak pada kemampuannya mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan kebutuhan perubahan sosial. Aswaja dapat tetap menjaga sanad, adab, otoritas keilmuan, dan kitab kuning, sekaligus mengembangkan literasi digital, memanfaatkan AI, memperkuat pendidikan modern, membangun ekonomi umat, mengembangkan gerakan ekologis, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dengan paradigma tersebut, Aswaja tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi menjadi kekuatan transformatif yang mampu menghadirkan Islam yang berilmu, moderat, toleran, berkeadilan, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Aswaja masa depan adalah Aswaja yang berakar kuat pada tradisi, terbuka terhadap pembaruan, kritis terhadap teknologi, kokoh dalam keilmuan, dan nyata dalam aksi sosial.

Pada akhirnya, transformasi dari Aswaja Tradisional menuju Aswaja Transformatif bukanlah proses meninggalkan masa lalu, melainkan proses menghidupkan kembali nilai-nilai terbaik tradisi untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Dalam kerangka inilah Aswaja dapat terus hadir sebagai *manhaj al-fikr* yang memberikan arah pemikiran dan sekaligus sebagai *harakah al-ijtima'iyah* yang menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2020. *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka.
- Abu Zahrah, Muhammad. n.d. *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Ash'ari, Abū al-Ḥasan. 1952. *Al-Luma' fī al-Radd 'alā Ahl al-Zaygh wa al-Bida'*. Beirut: Dār al-Mashriq.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. 1993. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alfa, Mohammad Asrori. "Menggagas Alternatif Pemikiran Aswaja di Tengah Kehidupan Masyarakat Berbasis Pesantren." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*.

- Al-Māturīdī, Abū Manṣūr. 1970. *Kitāb al-Tawhīd*. Edited by Fathallah Kholeif. Beirut: Dar El-Machreq.
- Al-Qaradawī, Yusuf. 1985. *Al-Ijtihad fī al-Sharī'ah al-Islamiyyah ma'a Nazharat Tahliliyyah fī al-Ijtihad al-Mu'asir*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Al-Shātibī, Abū Ishāq. 2004. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ṭahāwī, Abū Ja'far. n.d. *Al-ʿAqīdah al-Ṭahāwiyyah*.
- Azizy, A. Qodri. 2003. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. n.d. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Bush, Robin. 2009. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Campbell, Heidi A., ed. 2013. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. London: Routledge.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fealy, Greg. n.d. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Fathoni, M. 2019. "A Paradigm Shift of 'Aswaja An-Nahdliyyah'." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 14 (2): 305–326.
- Frank, Richard M. 1978. *Beings and Their Attributes: The Teaching of the Basrian School of the Mu'tazila in the Classical Period*. Albany: State University of New York Press.
- Gunawan, Deni. 2016. "Ahlussunnah wal Jamaah Sebagai Manhajul Fikr." *NU Online*, 16 Oktober 2016.
- Hallaq, Wael B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodgson, Marshall G. S. 1974. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2003. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Makdisi, George. 1981. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Muzadi, Abdul Muchith. 2006. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan*. Jakarta: UI-Press.
- Ormsby, Eric. 1984. *Theodicy in Islamic Thought: The Dispute over al-Ghazali's "Best of All Possible Worlds"*. Princeton: Princeton University Press.
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.

- Ridwan, Ahmad, and Ansor Feri Mahmudi. 2023. "The Internalization of Wasathiyah (Moderation) Values Through Pesantren-Based Education." *Journal of Educational Research and Practice* 1 (1).
- Sherif, M. A. 1975. *Ghazali's Theory of Virtue*. Albany: State University of New York Press.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siradj, Said Aqil. 2006. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan.
- Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-. n.d. *Sunan al-Tirmidhī*. Kitāb al-Fitan, Bāb Mā Jā'a fī Luzūm al-Jamā'ah.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS
- Watt, W. Montgomery. 1973. *The Formative Period of Islamic Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926–1999*. Yogyakarta: LKiS.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.